

**PERAN KOORDINASI BAPPEDA**

**DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT**

Studi pada BAPPEDA dan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan  
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) di 3 Kecamatan  
Kabupaten Sidoarjo

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk menempuh gelar sarjana  
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**ZASKYA RIZKY KARUNDINI**

**105030101111120**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

**MALANG**

**2014**

**MOTTO**

*Orang yang mengatakan matahari mendatangkan kebahagiaan adalah orang  
yang tidak pernah menari di tengah hujan*

*~Pengarang tak Dikenal*




**TANDA PENGESAHAN**

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu  
Administrasi Universitas Brawijaya, pada:


Hari : Kamis  
Tanggal : 21 Agustus 2014  
Jam : 08.00 WIB  
Skripsi atas nama : Zaskya Rizky Karundini  
Judul : Peran Koordinasi Bappeda dalam Meningkatkan  
Pembangunan Masyarakat (Studi pada Bappeda dan Tim  
Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung  
Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) di 3  
Kecamatan Kabupaten Sidoarjo)

**Dan dinyatakan lulus  
MAJELIS PENGUJI**

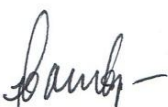
**Ketua**

  
**Dr. Choirul Saleh, M. Si**  
NIP. 19600112 198701 1 001


**Anggota**

  
**Dr. Suryadi, MS**  
NIP. 19601103 198703 1 003

**Anggota**

  
**Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS**  
NIP. 19610905 198601 1 002

**Anggota**

  
**Niken Lastiti, V. A., S.Sos, MAP**  
NIP. 19810210 200501 2 002

**PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, Saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 20).

Malang, 24 Juli 2014



**Zaskya Rizky Karundini**  
NIM. 105030101111120

## RINGKASAN

Zaskya Rizky Karundini, 2014. **PERAN KOORDINASI BAPPEDA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT (Studi pada Bappeda dan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJLSP) di 3 Kecamatan Kabupaten Sidoarjo)**. Dr. Choirul Saleh, M. Si, Dr. Suryadi, MS. 241 Hal + xv

---

Koordinasi merupakan salah satu unsur pembangunan. Bappeda sebagai penyusun dan pelaksana pembangunan di daerah melakukan peran koordinasinya untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pembangunan, salah satunya yaitu Bappeda Kabupaten Sidoarjo dengan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSLP) kecamatan bentukan Bappeda. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu, *pertama* bagaimana peran Bappeda dalam upaya pembentukan Tim Koordinasi Kecamatan, *kedua* bagaimana koordinasi Bappeda dengan Tim Koordinasi, dan *ketiga* apa faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi koordinasi Bappeda dengan Tim Koordinasi Kecamatan.

Penelitian ini adalah penelitian yang berbasis pada penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini mengambil kesimpulan, yakni (1) Bappeda sebagai pembentuk Tim Koordinasi melaksanakan perannya sebagai perencana, sebagai koordinator, dan sebagai pengevaluasi. Tahapan pembentukan dimulai dari melakukan kajian pada tahun 2012, pembentukan regulasi pada tahun 2013, serta penguatan dan optimalisasi pada tahun 2014. (2) Koordinasi antara Bappeda dengan Tim Koordinasi Kecamatan yang diteliti tidak semua berjalan dengan efektif dan sesuai dengan nilai-nilai pengembangan masyarakat (3) Adapun faktor pendukung koordinasi antara Bappeda dengan Tim Koordinasi kecamatan yaitu adanya anggota yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan adanya hubungan informal diluar hubungan formal. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu: kurangnya komunikasi dan integrasi antar anggota, terkendala masalah dana, dan kesibukan masing-masing anggota tim. Saran dalam penelitian ini yaitu agar dalam Keputusan Bupati Sidoarjo perlu menangani masalah sanksi agar menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab. Kemudian, sering dilakukan komunikasi dan saling memberikan motivasi mengenai tugas pokok dan fungsi masing-masing anggota.

**Kata Kunci:** Peranan, Koordinasi, Bappeda, Pembangunan Masyarakat, Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP), Kecamatan

## SUMMARY

Zaskya Rizky Karundini, 2014. **THE ROLE OF BAPPEDA COORDINATION IN INCREASING COMMUNITY DEVELOPMENT (The study of Bappeda and Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) in the 3 sub district of Sidoarjo regency)**. Dr. Choirul Saleh, M. Si, Dr. Suryadi, MS. 241 pages + xv

---

Coordination is the one of development elements. Bappeda as the compiler and implementer of development in the region, Bappeda conduct the coordination role in in order to implement it's duty and function in developments, one of them is Bappeda in Sidoarjo regency with the Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) which is formed by Bappeda. Therefore, the problems of this study are *first*, what is the role of Bappeda in establishing the Tim Koordinasi Kecamatan, *second*, how is the coordination of Bappeda with the Tim Koordinasi Kecamatan, *third*, what are the supporting and inhibiting factor which influence the coordination of Bappeda with the Tim Koordinasi Kecamatan.

This study used descriptive analysis of qualitative approach. Data sources of this study are primary and secondary data. The technique of collecting the data used interview and documentation. The research methods which are used in this study are data collection, data reduction, data display, and drawing conclusion/verification.

The result of the research showed that (1) Bappeda as the compiler of coordination team implemented its role as a planner, coordinator, and evaluator. This establishment is started from conducting the research in 2012, establishing the regulation in 2013, also reinforcing the team in 2014. (2) Coordination between Bappeda and the Tim Koordinasi Kecamatan which is analyzed in this study did not work effectively and appropriate with the community development values. (3) The supporting factors of coordination between Bappeda and Tim Koordinasi Kecamatan are the presence of the members who have been implement the tasks and its function and the existence of informal relationship beside a formal relationship. While the inhibiting factors are the lack of communication and integration between the members, funding obstacle, and the flurry of the team members. The suggestions of this study are the Sidoarjo regent need to handle the sanction in order to carry out their duties based on the responsibility. Then, communication between the members and giving a motivation each other about the main duty and function have to be done.

Keywords: Role, coordination, Bappeda, community development, Management Coordination Program Team and Corporate Social Responsibility (CSR), sub district

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Peran Koordinasi Bappeda dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat, Studi pada Bappeda dan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJLSP) di 3 Kecamatan Kabupaten Sidoarjo.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si, selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik sekaligus sebagai Ketua Komisi Pembimbing Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
4. Bapak Dr. Suryadi, MS, selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan bantuan bimbingan dan pengarahan dari awal proses penyusunan skripsi ini.

5. Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda Sukarnodan Ibunda Nur Khunaini yang senantiasa memberi doa dan juga dukungan baik secara moril dan materiil.
6. Ibu Ir. Rosida Winayu sebagai Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Kabupaten Sidoarjo dan sebagai Ketua Tim Fasilitasi Program Kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Kabupaten Sidoarjo yang telah membantu dalam penelitian.
7. Bapak Ali Muzakki, SE sebagai Kepala Sub Bidang Perekonomian Bappeda Kabupaten Sidoarjo yang telah membantu dalam penelitian ini.
8. Bapak Iswadi, selaku Sekretaris Kecamatan Waru dan sebagai Sekretaris II Tim Koordinasi Kecamatan Waru yang telah membantu dalam penelitian.
9. Bapak Suyud Supriadi, SP.MM selaku Kepala Seksi Pembangunan Fisik Kecamatan Sidoarjo dan sebagai Anggota Pelaksana Tim Koordinasi Tim Koordinasi Kecamatan Sidoarjo yang telah membantu dalam penelitian ini.
10. Ibu Dra. Hj. Lenny Nurmalasari selaku Kepala Seksi Perekonomian dan Anggota Pelaksana Tim Koordinasi TJLSP Kecamatan Jabon yang juga membantu dan mempermudah dalam penelitian.
11. Bapak Mustamir selaku Seksi Humas dan juga Anggota Bidang Sosial Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kecamatan Jabon yang telah membantu dalam penelitian ini.



12. Adikku tersayang Rafi Rizqullah Karundian yang senantiasa memberi doa serta dukungan memberikan doa dan semangatnya selama pengerjaan skripsi ini.
13. Segenap keluarga besar H. Nur Khasan dan Hj. Aspiyah yang telah memberikan doa, dukungan, dan semangatnya selama pengerjaan skripsi ini.
14. Kelima sahabat tercinta saya Nofriana Devi Mutomima, Putri Permata Taqwa, Nurul Afifah, Dian Purnama Sari, dan Henny Prasetyowati yang juga telah memberikan dukungan, doa, dan semangatnya.
15. Sahabat saya Aini Alfiyatul Bariroh dan teman-teman Kos Kerto Waluyo No. 15 (Kos Spiderman), Elok, Yayuk, Lila, Ningrum, Asih, Nisaul, Naila, Anik, Mbak Fitri, Lalak, Uwit, Inke dan teman-teman lainnya yang telah memberikan dukungan, doa dan semangatnya.
16. Sahabat-sahabat saya Nurul Yaqin, Muchammad Dzulfikar, FitronFahmi Faruqi yang juga memberikan doa dan dukungannya.
17. Kedua sahabat jauh Wahyu Asri Nurvytasari dan Ayudya Ramadhani yang senantiasa mengirimkan doa dan dukungannya.
18. Sahabat-sahabatku Ranger I Publik 2010 yang selalu memberikan pengertian dan semangat serta dukungan selama pengerjaan skripsi ini.
19. Keluarga besar Marching Band Ekalavya Suara Brawijaya yang telah membantu dan mendukung saya baik secara moril dan materiil.
20. Rekan-rekan seperjuangan FIA angkatan 2010, dan semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Agustus 2014

Penulis



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>MOTTO .....</b>	<b>i</b>
<b>TANDA PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SUMMARY .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kontribusi Penelitian.....	11
E. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Teori <i>Good Governance</i> .....	14
1. Pengertian <i>Good Governance</i> .....	14
2. Unsur dalam <i>Good Governance</i> .....	16
3. Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> .....	19
B. Teori Pembangunan .....	21
1. Definisi Pembangunan .....	21
2. Pembangunan/Pengembangan Masyarakat ( <i>Community Development</i> )	25
C. CSR ( <i>Corporate Social Responsibility</i> ) / Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJLSP).....	31
1. Pengertian <i>Corporate Social Responsibility</i> .....	31
2. Model atau Pola <i>Corporate Social Responsibility</i> .....	32
D. Teori Partisipasi dan Peranan.....	34
1. Partisipasi .....	34
2. Peranan .....	39
E. Teori Birokrasi .....	41
1. Pengertian Birokrasi .....	41
2. Ciri-ciri Birokrasi .....	43
F. Teori Koordinasi .....	44
1. Pengertian Koordinasi .....	44
2. Tujuan dan Manfaat Koordinasi.....	45
3. Syarat – syarat Koordinasi .....	47
4. Ketergantungan dalam Koordinasi .....	49
5. Jenis – jenis Koordinasi.....	51

6. Bentuk-bentuk Koordinasi .....	54
7. Metode dan Teknik Koordinasi .....	56
8. Koordinasi dalam Perspektif Administrasi Publik .....	60
9. Fungsi Koordinasi dalam Pembangunan .....	62
10. Koordinasi dalam Perspektif Good Governance.....	63

**BAB III METODE PENELITIAN .....** 65

A. Jenis Penelitian.....	65
B. Fokus Penelitian.....	66
C. Lokasi Penelitian.....	68
D. Jenis dan Sumber Data.....	69
E. Teknik Pengumpulan Data.....	71
F. Instrumen Penelitian.....	72
G. Teknik Analisis Data .....	73

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....** 76

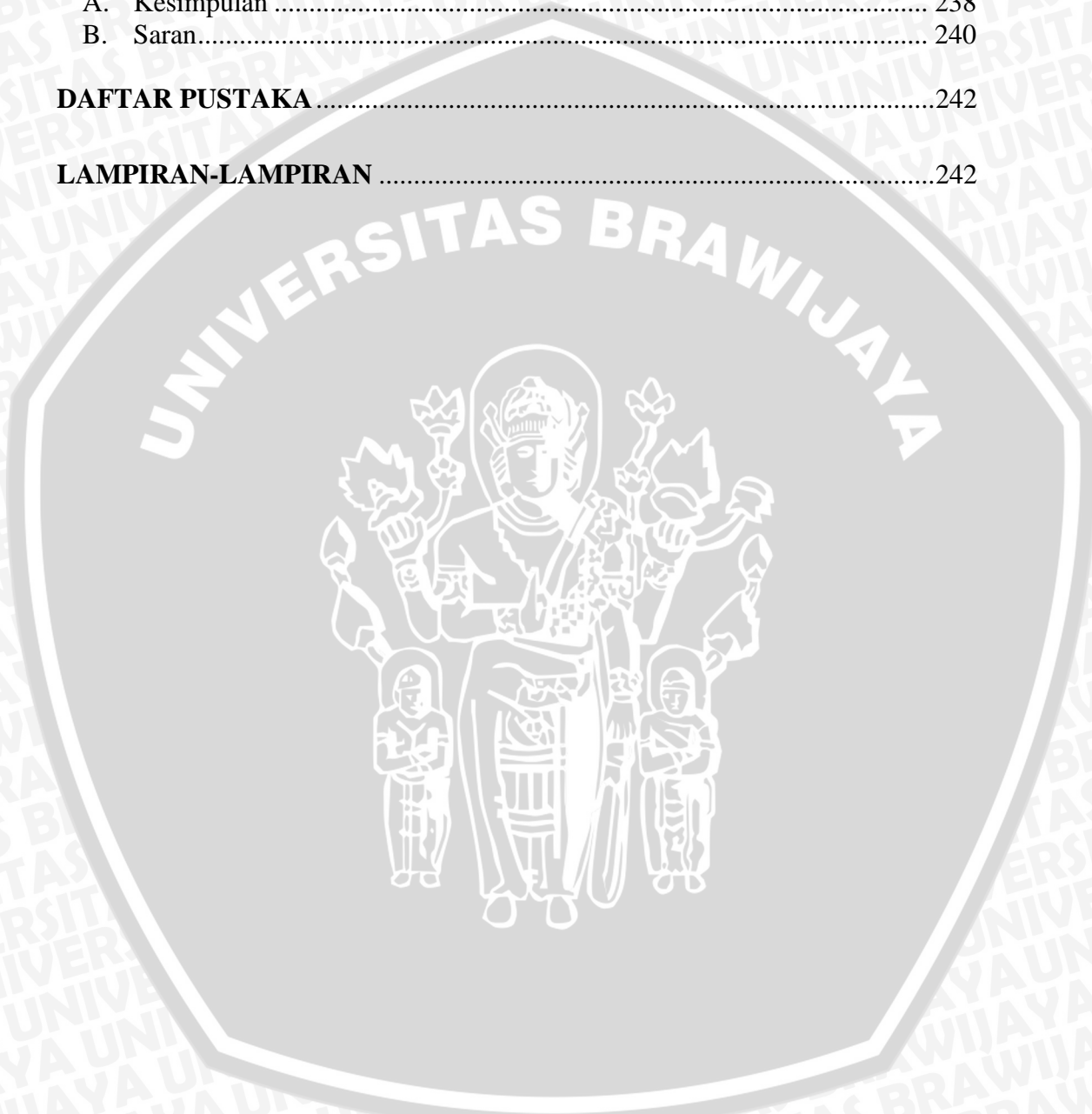
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	76
1. Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo .....	76
2. Kondisi Geografis dan Demografis Kabupaten Sidoarjo .....	77
3. Sejarah Singkat Kabupaten Sidoarjo .....	78
4. Pembagian Wilayah Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo .....	82
5. Visi dan Misi Kabupaten Sidoarjo .....	83
6. Gambaran Umum Instansi.....	84
7. Kecamatan Jabon.....	93
8. Kecamatan Sidoarjo .....	96
9. Kecamatan Waru .....	104
B. Penyajian Data Fokus Penelitian.....	111
1. Peran Bappeda dalam Upaya Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP).....	111
a. Peran Bappeda dalam Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) .....	112
b. Tujuan dan Sasaran Bappeda dalam Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) .....	113
c. Aktor yang Terlibat dalam Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) .....	119
d. Mekanisme Prosedur dalam Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) .....	124
2. Koordinasi Antar Bappeda dengan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP).....	138



a.	Koordinasi dengan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kecamatan Waru .....	138
b.	Koordinasi dengan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kecamatan Sidoarjo .....	144
c.	Koordinasi dengan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kecamatan Jabon .....	151
3.	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Koordinasi Antara Bappeda dengan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP).....	1632
a.	Faktor Pendukung .....	162
b.	Faktor Penghambat .....	166
C.	Pembahasan dan Analisis Data .....	170
1.	Peran Bappeda dalam Upaya Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP).....	170
a.	Peran Bappeda dalam Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) .....	170
b.	Tujuan dan Sasaran Bappeda dalam Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) .....	171
c.	Aktor yang Terlibat dalam Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) .....	175
d.	Mekanisme Prosedur dalam Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) .....	176
2.	Koordinasi Antar Bappeda dengan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP).....	191
a.	Koordinasi dengan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kecamatan Waru .....	192
b.	Koordinasi dengan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kecamatan Sidoarjo .....	203
c.	Koordinasi dengan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kecamatan Jabon .....	214
3.	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Koordinasi Antar Bappeda dengan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP).....	232



a. Faktor Pendukung .....	232
b. Faktor Penghambat .....	233
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	238
A. Kesimpulan .....	238
B. Saran .....	240
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	242
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	242



## DAFTAR TABEL

No	Judul	Hal.
1	Pembagian Wilayah Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo	82
2	Data Kependudukan Kecamatan Jabon Tahun 2013	93
3	Luas Wilayah, Ketinggian dan Jarak dari Desa/Kelurahan ke Ibukota Kecamatan Tahun 2012	95
4	Data Kependudukan Kecamatan Sidoarjo	96
5	Luas Wilayah, Ketinggian dan Jarak dari Desa/Kelurahan ke Ibukota Kecamatan Tahun 2011	98
6	Banyaknya Industri Besar/średang dan Jumlah Tenaga Kerja menurut KLUI tahun 2011	99
7	Banyaknya Industri Kecil dan Jumlah Tenaga Kerja menurut KLUI tahun 2011	101
8	Banyaknya Industri Kerajinan Rakyat dan Jumlah Tenaga Kerja menurut KLUI tahun 2011	102
9	Data Kependudukan Kecamatan Waru	104
10	Luas Wilayah, Ketinggian dan Jarak dari Desa/Kelurahan ke Ibukota Kecamatan Tahun 2012	105
11	Banyaknya Industri Besar/średang dan Jumlah Tenaga Kerja menurut KLUI tahun 2012	107
12	Banyaknya Industri Kecil dan Jumlah Tenaga Kerja menurut KLUI tahun 2012	108
13	Banyaknya Industri Kerajinan Rakyat dan Jumlah Tenaga Kerja menurut KLUI tahun 2012	110
14	Tugas Pokok dan Fungsi Posisi Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan TJLSP	132
15	Susunan Anggota Tim Koordinasi Kecamatan Waru	139
16	Susunan Anggota Tim Koordinasi Kecamatan Sidoarjo	144
17	Susunan Anggota Tim Koordinasi Kecamatan Jabon	151

## DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Hal.
1	Keseimbangan Tiga Komponen	16
2	Komponen dalam analisis data (Interactive model)	75
3	Peta Kabupaten Sidoarjo	77
4	Bagan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Sidoarjo	87
5	Peta Kecamatan Jabon	93
6	Peta Kecamatan Sidoarjo	96
7	Peta Kecamatan Waru	104
8	Format Laporan Pelaksanaan Kegiatan	117
9	Format Laporan Evaluasi Kegiatan	118
10	RAPAT: Suasana sosialisasi Perda nomor 2 tahun 2013 dan Perbup nomor 40 tahun 2013 tentang CSR di kantor Bappeda	128
11	Struktur Organisasi Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan TJLSP	131
12	Mekanisme program pembangunan inklusif dan partisipatif Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)	136
13	Penyerahan Secara Simbolis Bantuan 1.000 Bibit Pohon Mangga PT.Pertamina Gas Kepada Kecamatan Jabon sebagai Hasil Koordinasi dalam Tim Koordinasi Kecamatan Jabon	161
14	Pemberian Bantuan 1.000 Bibit Pohon Mangga oleh PT. Pertamina Gas kepada Kecamatan Jabon sebagai Hasil Koordinasi dalam Tim Koordinasi Kecamatan Jabon	161



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara sebagai sebuah organisasi dalam menyelenggarakan kehidupan masyarakat, memiliki tugas dan fungsi sebagai pengatur kehidupan dalam bernegara untuk menciptakan tujuan-tujuan negara. Pemerintah sebagai pelaksana dalam menjalankan tujuan negara memiliki beberapa peranan. Peranan pemerintah Menurut Modul Diklat Kepemimpinan (2008:32) secara lebih spesifik dapat dibagi atas tiga kelompok fungsional, yaitu (1) dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan seperti penyelenggaraan peradilan, pertahanan dan keamanan, mengadakan hubungan diplomatik, dan penyelenggaraan keuangan negara, (2) dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan umum, yaitu memberikan pelayanan dan dukungan, dan (3) dalam rangka penyelenggaraan tugas pembangunan, seperti pembangunan bangsa (*cultural and political development*) dan pembangunan ekonomi dan sosial (*economic and social development*) yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat bangsa.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pembangunan, Menurut Bryant&White yang ditulis oleh Suryono (2010:64), pembangunan terdiri dari lima aspek yaitu:

1. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik individu maupun kelompok (*capacity*);
2. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan pemerataan nilai dan kesejahteraan (*equity*);

3. Pembangunan berarti menaruh kepercayaan pada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai kemampuan yang ada padanya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memiliki dan kekuasaan untuk memutuskan (*empowerment*);
4. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri (*sustainability*); dan
5. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara yang satu dengan negara yang lain dan menciptakan hubungan saling menguntungkan (*simbiosis mutualis*) dan saling menghormati (*interdependensi*).

Dengan demikian kiranya jelas bahwa suatu bangsa yang sedang membangun tidak mungkin melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwa bangsa itu bersikap acuh tak acuh terhadap pembangunan. Gunawan (2008:6) menyebutkan, pembangunan suatu negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, setiap warga negara berperan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan peningkatankualitas hidup masyarakat. Ada tiga golongan yang berperan penting dalam pembangunan sebuah negara: Pemerintah (*Government*), Masyarakat (*Citizen/People/Community*) dan Dunia Usaha (*Corporate*). Dalam hal ini, dunia usaha harus berperan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan pula masyarakat dan lingkungan hidup.

Menurut Lako (2011:3) Swasta atau perseroan dalam melakukan aktivitas bisnis dan mengeruk keuntungan telah menimbulkan dampak-dampak negatif yang merugikan masyarakat serta lingkungan. Dengan begitu Lako (2011:4) juga berpendapat bahwa CSR harus diperlakukan sebagai suatu komitmen berkelanjutan dari perusahaan untuk bertanggung jawab secara ekonomi, sosial, dan ekologis kepada masyarakat, lingkungan serta para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Tanggung jawab tersebut meliputi mencegah dampak-dampak

negatif yang ditimbulkan perusahaan terhadap pihak lain dan lingkungan serta meningkatkan kualitas masyarakat (termasuk karyawan, pemasok, dan pelanggan) dan lingkungan sekitar perusahaan.

John Elkington (1997) menyebutkan bahwa CSR merupakan aktivitas yang mengoptimalkan *triple bottom line* atau 3 P: mengejar keuntungan (*profit*) untuk kepentingan *shareholders*, memperhatikan kepentingan *stakeholders*, dan memenuhi kesejahteraan masyarakat (*people*), serta berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*). Keberlanjutan (*sustainability*) usaha dapat dicapai dari keseimbangan aktivitas yang tercakup dalam 3P tersebut. ([www.cifor.cgiar.org](http://www.cifor.cgiar.org)).

Sehingga CSR sebagai suatu tanggung jawab perusahaan/swasta untuk dapat memberikan kontribusinya terhadap masyarakat maupun lingkungan sekitar disamping menjalankan kegiatan bisnisnya. Sehingga, perusahaan dapat berperan aktif tidak hanya dalam kegiatan intern perusahaan itu sendiri, yaitu mengenai perekonomian perusahaan saja, melainkan juga dapat bertanggung jawab terhadap masalah sosial ekonomi masyarakat dan lingkungan sekitar.

Pemerintah Negara Indonesia melalui Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam pasal 74 ayat 1 menyebutkan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Selain itu, juga dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 15(b), maka setiap perseroan atau penanam modal diwajibkan untuk melakukan sebuah upaya pelaksanaan tanggung jawab perusahaan yang telah

dianggarkan dan dialokasikan sebagai biaya Perseroan. Undang-undang tersebut menegaskan Pemerintah Negara Indonesia untuk dapat memberikan kewajiban bagi yang mendirikan perusahaannya di Indonesia dengan melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan (CSR). Dengan adanya peraturan ini dapat membuka peluang pihak masyarakat dan pemerintah daerah untuk bekerjasama dengan perusahaan/swasta melalui program CSR. Sehingga dapat membantu pemerintah daerah meningkatkan pembangunan di daerahnya melalui program CSR yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan bersangkutan.

Menurut Bimaryanto (2013:1) Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan melalui otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberi kesempatan bagi penongkatan demokrasi dan kinerja daerah yang berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintah, pelayanan masyarakat, dan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan daerah diarahkan untuk mengembangkan daerah dan menyerasikan laju pertumbuhan antar daerah, dan antar daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Pembangunan daerah bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di daerah melalui pembangunan sektoral dengan perencanaan pembangunan oleh daerah yang efisien dan efektif menuju tercapainya kemandirian daerah dan kemajuan yang merata di seluruh pelosok tanah air.

Pembangunan sebagai tujuan negara tidak terlepas dari adanya suatu koordinasi, sehingga pemerintah sebagai salah satu apek penyelenggara pembangunan melakukan peran koordinasinya. Koordinasi merupakan unsur

pembangunan dan pada dasarnya merupakan aspek dari pengendalian yang sangat penting. Dengan koordinasi diharapkan segala permasalahan yang berkaitan dengan aktivitas pembangunan dapat dihindari sekecil mungkin.

George R. Terry dalam Syafiie, dkk (1999:86) menjelaskan bahwa koordinasi adalah sinkronisasi yang teratur (*orderly synchronisation*) dari usaha-usaha (*efforts*) untuk menciptakan pengaturan waktu (*timing*) dan terpimpin (*directing*), dalam hasil pelaksanaan yang harmonis (*harmonious*) dan bersatu untuk menghasilkan tujuan yang telah ditetapkan (*stated objective*). Selain itu juga, menurut Handyaningrat (1991:117) koordinasi dimaksudkan sebagai usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja (unit-unit) organisasi sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuan. Sehingga koordinasi dapat dimaksudkan sebagai suatu kerjasama yang terpadu dengan tugas masing-masing yang menjadi tanggung jawabnya untuk dapat mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan.

Dengan adanya koordinasi dalam menyatukan tugas dan kegiatan untuk dapat mencapai tujuan bersama, maka koordinasi merupakan salah satu unsur penting untuk dapat mencapai tujuan pembangunan. Pembangunan merupakan salah satu tujuan yang telah ditetapkan bersama dalam suatu pemerintahan. Soeparno (1992:7) menyatakan bahwa pembangunan seluruh masyarakat Indonesia harus dilaksanakan diseluruh tanah air secara merata serta dirasakan hasil dan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa kecuali. Pembangunan yang merata yang dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia tersebut tidak terkecuali di Kabupaten Sidoarjo.

Kabupaten Sidoarjo merupakan bagian wilayah Propinsi Jawa Timur yang biasanya disebut sebagai sentra industri karena banyaknya sektor industri yang berkembang di Kabupaten ini. Sektor industri yang ada di Sidoarjo lebih berkembang cukup pesat karena lokasi Sidoarjo yang berdekatan dengan pusat bisnis kawasan Indonesia Timur (Surabaya), Pelabuhan Laut Tanjung Perak maupun Bandar Udara Juanda. Ditambah lagi, sektor industri kecil juga berkembang cukup baik ([www.eastjava.com/](http://www.eastjava.com/))

Menurut Ir. Rosida Winayu selaku Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda, dengan jumlah perusahaan besar sebanyak 600 dan dengan jumlah perusahaan sedang sebanyak 1200, Kabupaten Sidoarjo mempunyai potensi untuk memberdayakan masyarakat sekitar perusahaan yang didirikan melalui program perusahaan yang wajib dilaksanakan karena telah didukung oleh Undang-Undang, yaitu melalui CSR (*Corporate Social Responsibility*). Dengan banyaknya jumlah perusahaan tersebut, memang tepat sekali apabila Bappeda Kabupaten Sidoarjo dapat memberdayakan program dan dana CSR dalam rangka meningkatkan pembangunan masyarakat sekitar.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai unsur perencana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Kemudian dalam menjalankan tugas dan untuk mencapai tujuannya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya (*bappedasidoarjo*)

Berdasarkan salah satu fungsi Bappeda di atas mengenai pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah, melalui CSR dari perusahaan-perusahaan agar dapat terlaksana secara terpadu dan lebih berdaya guna, maka Bappeda Kabupaten Sidoarjo membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJLSP). Tim Koordinasi tersebut ditempatkan di seluruh kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, Tim Koordinasi tersebut dibentuk dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut juga didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2011 mengenai *Kajian Model Kerjasama Pemkab Sidoarjo dengan Swasta Tentang Tanggung Jawab Sosial* yang menyatakan bahwa beberapa perusahaan sudah mulai melakukan program CSR dengan relatif baik, sedangkan sebagian besar belum maksimal bahkan ada 2 perusahaan industri yang karena lokasinya di kompleks industri tidak melakukan CSR. Belum maksimalnya pelaksanaan CSR disebabkan masih terbatasnya pengetahuan dan pemahaman terhadap CSR, bahkan ada perusahaan yang tidak tahu sama sekali sehingga CSR dinilai sebagai beban keuangan perusahaan.

Belum adanya penanganan secara khusus program CSR sehingga setiap perusahaan yang mengelola berbeda-beda pengetahuan dan pemahaman terhadap *stakeholders*. Dengan kata lain pengetahuan dan pemahaman dunia industri masih nampak terbatas sehingga dapat dipahami jika *output* programnya juga masih terbatas. Sebagian industri yang hendak melakukan CSR menghadapi kendala yaitu kesulitan data lapangan terutama sasaran program, dukungan fasilitas pemerintah yang kurang, terbatasnya SDM, ditambah lagi belum adanya peraturan pemerintah mengenai CSR setidaknya pedoman pelaksanaannya. Oleh karena itu, Bappeda membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP).

Tim Koordinasi tersebut dikepalai oleh Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda, Ir. Rosida Winayu. Menurut beliau, dijelaskan bahwa Bappeda membentuk tim koordinasi ini mempunyai beberapa alasan penting, yaitu:

- 1) Mengenai banyaknya perusahaan yang mengalihkan pendanaan dan program CSR nya ke daerah selain Kabupaten Sidoarjo, yang seharusnya pendanaan dan program tersebut adalah agar dapat diberikan dan diupayakan kepada lingkungan/ wilayah di sekitar perusahaan yang didirikan.
- 2) Selain itu karena pelaksanaan CSR oleh perusahaan-perusahaan ini juga masih secara parsial (berjalan masing-masing), sehingga nantinya diharapkan dengan adanya tim koordinasi ini pelaksanaan CSR menjadi simultan.
- 3) Kemudian untuk mengoptimalkan pembangunan desa-desa yang ada di setiap kecamatan. Hal tersebut penting bagi setiap desa yang lingkungannya



ditempati oleh banyaknya industri dan perusahaan, karena industri tersebut berpotensi untuk memberdayakan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar perusahaan yang didirikan.

- 4) Selain itu alasan lain yang mendasari Bappeda adalah untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan alternatif lain pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo. Untuk melaksanakan pembangunan daerah, Kabupaten Sidoarjo selama ini menggunakan dana APBD melalui obligasi, pinjaman daerah dan *Public-Private Partnership* (PPP), namun tidak bisa hanya menggantungkan biaya pembangunan kepada APBD saja, sehingga Bappeda berupaya untuk mengoptimalkan dana dari CSR.

Terdapat landasan hukum yang mendasari terbentuknya Tim Koordinasi tersebut. Landasan hukumnya yaitu Peraturan Bupati nomor 40 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan pada Pasal 7 yang menyebutkan bahwa Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan TJSLP diuraikan dalam Pasal 4 huruf c dibentuk oleh Bupati yang kepengurusannya terdiri dari unsur Pemerintah, Perusahaan dan Masyarakat. Sehingga, melalui tim koordinasi bentukan Bappeda tersebut, dibutuhkan koordinasi antara Bappeda dengan Tim Koordinasi agar dapat melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan fungsi dan tujuannya.

Oleh karena itu, berdasarkan paparan latar belakang diatas mengenai pentingnya koordinasi antara Bappeda dengan Tim Koordinasi Kecamatan dalam meningkatkan pembangunan, peneliti merasa tertarik melakukan penelitian

dengan judul **“Peran Koordinasi Bappeda dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat (Studi pada Bappeda dan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJLSP) di 3KecamatanKabupaten Sidoarjo)”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakahperan Bappeda dalam upaya pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)?
2. Bagaimana koordinasi Bappeda dengan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)?
3. Apa sajakah faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi koordinasi Bappeda dengan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai peran Bappeda dalam upaya pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP).
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis Koordinasi Bappeda dengan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dalam meningkatkan pembangunan masyarakat.

3. Untuk mengetahui mendeskripsikan, dan menganalisis mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat yang yang mempengaruhi koordinasi Bappeda dengan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP).

#### **D. Kontribusi Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1. Kontribusi Akademis**

- a.) Dapat memeberikan wawasan ataupun pengetahuan secara khusus kepada peneliti dan secara umum kepada pembaca.
- b.) Hasil dari penelitian ini menambah khasanah bagi pengembangan ilmu Administrasi Publik, khususnya mengenai koordinasi dalam meningkatkan pembangunan.
- c.) Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi atau rujukan penelitian selanjutnya yang meneliti dan mengkaji permasalahan tentang pembangunan melalui koordinasi.

##### **2. Kontribusi Praktis**

- a.) Sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi pemerintah Bappeda, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan mengenai koordinasi dengan Tim Koordinasi dalam meningkatkan pembangunan.

- b.) Bagi Tim Koordinasi, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menyusun program-program pembangunan masyarakat.
- c.) Bagi masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan masukan untuk dapat meningkatkan pembangunan melalui koordinasi.

### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika ini dibuat agar pembaca mampu dengan mudah memahami isi dan makna yang terkandung serta memahami maksud dan tujuan dari penyusunan skripsi ini. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini membahas latar belakang penelitian mengenai alasan yang mendasari penulis untuk menganalisis dan mengetahui alasan Bappedam membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSLP) untuk meningkatkan pembangunan. Selain itu pada bab ini juga berisi rumusan masalah yang diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan pengertian, pandangan, dan landasan teori yang digunakan menyangkut permasalahan yang terjadi. Teori yang dipakai yaitu Teori *Good Governance*, Teori Pembangunan (Pembangunan Masyarakat), CSR (*Corporate Social Responsibility*), Teori Partisipasi dan Peranan, Teori Birokrasi, dan Teori Koordinasi.

### BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian yang akan dipakai dalam penelitian, di antaranya jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan diakhiri dengan analisis data.

### BAB IV: PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai data-data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Berkaitan dengan tujuan penelitian dan sesuai dengan fokus penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dan diinterpretasikan. Dalam bab ini dihubungkan antara hasil penelitian dengan teori yang ada.

### BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan yang didapatkan dari pembahasan dan hasil selama penelitian. Dalam bab ini juga menguraikan saran-saran yang sesuai dengan kesimpulan yang dicapai.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Teori *Good Governance*

##### 1. Pengertian *Good Governance*

Sumarto (2004: 1-2) menyebutkan bahwa *governance* diartikan sebagai mekanisme, praktek, dan tata cara pemerintah, dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Selain itu, sejatinya konsep *governance* harus dipahami sebagai suatu proses, bukan struktur atau institusi. *Governance* juga menunjukkan inklusivitas. Kalau *government* dilihat sebagai “mereka” maka *governance* adalah “kita”.

Kemudian dalam Sedarmayanti (2004:3) menurut *United Nations Development Program* (UNDP) dalam dokumen kebijakannya yang berjudul “*Governance for Sustainable Human Development*” (1997) mendefinisikan *governance* sebagai *Governance is the exercise of economic, political, and administrative authority to manage a country’s affairs at all levels and means by which states promote social cohesion, integration, and ensure the well being of their population*. Dari pernyataan diatas dapat diartikan sebagai Kepemerintahan adalah pelaksanaan kewenangan/kekuasaan di bidang ekonomi, politik, dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatnya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk

mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat.

Lembaga Administrasi Negara (2000) yang dikutip oleh Endarti (2005: 121-122) menyebutkan arti *good* dalam *good governance* sendiri mengandung dua pengertian:

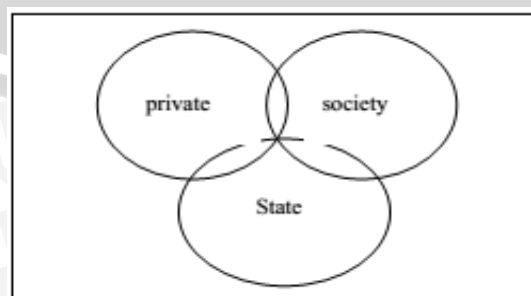
- a. Nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Berdasarkan pengertian ini, *good governance* berorientasi pada: pertama, orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional; kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut;
- b. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Orientasi pertama mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen-elemen konstituenya seperti: *legitimacy* (apakah pemerintah dipilih dan mendapat kepercayaan dari rakyatnya), *accountability* (akuntabilitas), *securing of human rights*, *autonomy and devolution of power*, dan *assurance of civilian control*. Sedangkan orientasi kedua, tergantung pada sejauhmana pemerintahan mempunyai kompetensi, dan sejauhmana struktur serta mekanisme politik serta administratif berfungsi secara efektif dan efisien.

Dengan kata lain, menurut Pratikno dalam Endarti (2005:117) *governance* seharusnya difokuskan pada pengembangan sinergi antara negara, masyarakat bisnis, dan *civil society*, yang dilandasi pada kapasitas untuk membangun konsensus, bekerjasama, dan saling akomodatif yang dilandasi oleh relasi kesetaraan.

Atas dasar uraian di atas mengenai *good governance*, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa *good governance* merupakan suatu proses atau suatu tata cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam suatu negara dengan melibatkan berbagai macam unsur *stakeholders* di dalamnya yaitu pemerintah itu sendiri, swasta, dan masyarakat untuk menangani berbagai macam urusan negara.

## 2. Unsur dalam *Good Governance*

Menurut Taschereau dan Champos, 1997; UNDP, 1997 dalam Thoha yang dikutip oleh Endarti (2003:119), dalam penyelenggaraan *governance* melibatkan tiga unsur utama (domain), yaitu *state* (negara atau pemerintahan), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha), dan *society* (masyarakat), yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing.



**Gambar 1. Keseimbangan Tiga Komponen**

Sumber: Aplikasi Prinsip *Good Governance* dalam Sektor Publik (Endarti, 2005: 119)



a) Pemerintah (*State*)

Menurut Endarti (2005: 123) menyatakan bahwa domain pemerintah (*state*) menjadi domain yang paling memegang peranan penting diantara ketiga domain dalam mewujudkan *good governance*. Memegang peran penting yang dimaksud bukan berarti pemerintah memiliki kekuasaan yang lebih besar dan mendominasi domain-domain lainnya, melainkan karena pentingnya fungsi pengaturan yang memfasilitasi berkembangnya domain sektor swasta dan masyarakat, serta fungsi administratif penyelenggaraan pemerintahan melekat pada domain ini.

Peran pemerintah melalui kebijakan-kebijakan publiknya sangat penting dalam memfasilitasi terjadinya mekanisme pasar yang benar sehingga penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dapat dihindari. Oleh karena itu, upaya-upaya perwujudan ke arah *good governance* dapat dimulai dengan membangun landasan demokratisasi penyelenggaraan negara dan bersamaan dengan itu dilakukan upaya pembenahan penyelenggara pemerintahan sehingga dapat terwujud *good governance*.

b) Sektor Swasta (*Private*)

Menurut Thoha dalam Endarti (2005:124) Dalam konsep *governance*, keberadaan sektor swasta merupakan mitrastrategis pemerintah yang memiliki sumber-sumber daya yang tidak dimiliki oleh pemerintah, sehingga kedudukan diantara mereka adalah sejajar. Peran sektor swasta sebagai mitra strategis pemerintah dalam hal ini sangat diperlukan untuk mendukung terciptanya proses keseimbangan kekuasaan yang

berlangsung dalam tata pemerintahan yang baik. Menurut Effendi dalam Azari, dkk. ed., yang ditulis oleh Endarti (2005:124) Pemerintah tidak lagi tampil menjadi pusatkekuasaan yang mengatur seluruh sendi kehidupan masyarakat, melainkanmerupakan fasilitator dalam penyelenggaraan urusan-urusan publik. Sedangkansektor swasta semakin dituntut perannya sebagai produser atau provider yangmemproduksi barang dan jasa yang diperlukan masyarakat, menciptakan lapanganpekerjaan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

c) Masyarakat (*Society*)

Endarti (2005:124) menyatakan bahwa dalam praktek *governance*, peran masyarakat sama penting dan sejajardengan peran pemerintah dan sektor swasta dalam pembuatan keputusan danpenyelenggaraan pelayanan publik. Dengan demikian partisipasi masyarakatmerupakan salah satu dari karakteristik penting dalam praktek *governance*. Menurut Thoha dalam Endarti (2005:124), partisipasi masyarakat sebagai pilar utama demokrasi sangat dibutuhkan dalam menjalankan *good governance*.

Sedangkan untuk menuju demokrasi perlu terlebih dahulu dibangun *civil society* atau masyarakat madani. Dimana dengan adanya kekuatan *civil society* ini berarti negara telah berhasil melakukan pemberdayaan kepada rakyat, dan telah ada pengakuan atas hubungan yang erat antara kekuatan pemerintah, kekuatan rakyat sipil, dan kekuatan sektor privat. Adapun menurut Effendi dalam Endarti (2005:124) peran masyarakat madani dalam konsep *good governance* adalah menjalankan fungsi-fungsi representasi

kolektif dari rakyat, kemudian penyaluran pelayanan publik serta layanan tanggung jawab terhadap masyarakat lainnya.

### 3. Prinsip-prinsip *Good Governance*

*United Nations Development Program*, UNDP (1997) dalam Sedarmayanti (2004:5-7) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan *good governance*, meliputi:

- a. Partisipasi (*participation*): setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung, maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing.
- b. Aturan hukum (*rule of law*): kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan, dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak asasi manusia.
- c. Transparansi (*transparency*): transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi.
- d. Daya tanggap (*responsiveness*): setiap insitusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*)
- e. Berorientasi konsensus (*consensus orientation*): *good governance* akan bertindak sebagai penengah berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan

terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.

- f. Berkeadilan (*equity*): *good governance* akan memberi kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
- g. Efektifitas dan efisiensi (*effectiveness and efficiency*): setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber-sumber yang tersedia.
- h. Akuntabilitas (*accountability*): para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum), sebagaimana halnya kepada para pemilik (*stakeholders*).
- i. Visi strategis (*strategic vision*): para pimpinan dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan *good governance* dan pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.

*Good governance* merupakan suatu proses atau suatu tata cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam suatu negara dengan melibatkan berbagai macam unsur *stakeholders* di dalamnya yaitu pemerintah itu sendiri, swasta, dan masyarakat untuk menangani berbagai macam urusan negara. Salah satunya berbagai macam urusan negara yaitu pembangunan. Pembangunan yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat melibatkan setiap *stakeholders*.

## B. Teori Pembangunan

### 1. Definisi Pembangunan

Pembangunan biasanya didefinisikan sebagai “rangkaiannya usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*). Apabila definisi sederhana di atas disimak secara cermat, akan muncul ke permukaan paling sedikit tujuh ide pokok. *Pertama*, pembangunan merupakan suatu proses. Berarti pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan yang terdiri dari tahap-tahap yang di satu pihak bersifat independen akan tetapi di pihak lain merupakan “bagian” dari sesuatu yang bersifat tanpa akhir (*never ending*). *Kedua*, pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan. *Ketiga*, bahwa pembangunan dilaksanakan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, jangka sedang, dan jangka pendek. Dan seperti dimaklumi merencanakan berarti mengambil keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan pada jangka waktu tertentu di masa depan. *Keempat*, rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan. Pertumbuhan dimaksudkan sebagai peningkatan kemampuan suatu negara bangsa untuk berkembang dan tidak sekedar mampu mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, dan eksistensinya. Perubahan mengandung makna bahwa suatu negara bangsa harus bersikap antisipatif dan proaktif dalam menghadapi tuntutan situasi yang berbeda dari satu jangka waktu ke jangka waktu yang lain, terlepas apakah situasi yang berbeda itu

dapat diprediksikan sebelumnya atau tidak. Dengan perkataan lain, suatu negara bangsa yang sedang membangun tidak akan puas jika hanya mampu mempertahankan *status quo* yang ada. *Kelima*, pembangunan mengarah kepada modernitas. Modernitas disini diartikan antara lain sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik daripada sebelumnya, cara berpikir yang rasional dan sistem budaya yang kuat tetapi fleksibel. *Keenam*, Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan *per definisi* bersifat multi-dimensional. Artinya, modernitas tersebut mencakup seluruh segi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dapat mengejawantah dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. *Ketujuh*, semua hal yang telah disinggung diatas ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa sehingga negara bangsa yang bersangkutan semakin kukuh fondasinya dan semakin mantap keberadaannya sehingga menjadi negara bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia karena mampu menciptakan situasi yang membuatnya berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara bangsa lain tersebut. (Sondang P. Siagian, 2009:4-5)

Selain itu, Suryono (2010:4) berpendapat, dalam pembangunan (*development*) terkandung unsur-unsur, (1) perubahan: yaitu perubahan dari sesuatu yang dianggap masih kurang menuju kesempurnaan; (2) Tujuan: yaitu tujuan yang diarahkan dari, oleh, dan untuk rakyat (manusia) menuju pelestarian, kesejahteraan, dan kebahagiaan hidup yang lebih baik; dan (3) potensi: yaitu potensi masyarakat yang terdapat dalam masyarakat itu sendiri yang kemudian dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan perencanaan

pembangunan. Dengan demikian, pembangunan merupakan suatu upaya yang terencana dan secara sadar dalam berbagai bidang yang dilakukan oleh suatu negara untuk dapat mencapai tujuan bersama menuju perubahan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Dalam pembangunan, muncul pembangunan alternatif menurut Suparjan dan Hempri Suyatno yang dikutip oleh Zubaedi (2007:169), gagasan pembangunan alternatif tersebut muncul dalam diskursus pembangunan sebagai reaksi terhadap kegagalan model pembangunan pro pertumbuhan ekonomi dalam mengatasi problem kemiskinan, memerhatikan kelestarian lingkungan serta memecahkan aneka problem sosial yang mengimpit masyarakat.

Model pembangunan alternatif menurut Zubaedi (2007:172) menekankan pentingnya pembangunan berbasis masyarakat (*community based development*), berparadigma *bottom-up*, dan lokalitas. Pendekatan yang dipakai dalam model pembangunan alternatif adalah pembangunan tingkat lokal, menyatu dengan budaya lokal, bukan memaksakan suatu model pembangunan dari luar, serta sangat menyertakan partisipasi orang-orang lokal.

Oleh karena itu, model pembangunan alternatif menurut Johan Galtung dalam Zubaedi (20097:173) ini bercirikan partisipatoris dan menekankan kebutuhan pokok dan hak asasi manusia dalam setiap langkahnya. Pembangunan berspektif partisipatoris artinya menekankan partisipasi luas,

aksesibilitas, keterwakilan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi nasib mereka. Sementara pembangunan menekankan pemenuhan kebutuhan pokok dan hak asasi manusia berarti pembangunan berusaha memenuhi tiga kebutuhan pokok, yaitu kesejahteraan ekonomi (*welfare*), kebebasan (*freedom*), dan identitas (*identity*); sebaliknya, membebaskan diri dari empat belenggu kekerasan, yaitu kemiskinan (*poverty*), kerusakan (*destruction*), tekanan (*repression*), dan alienasi (*alienation*).

Esensi pembangunan alternatif adalah memberi peran kepada individu bukan sebagai subjek, melainkan sebagai aktor yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses yang memengaruhi kehidupannya. Konsekuensinya, model pembangunan alternatif memberikan nilai yang sangat tinggi pada inisiatif lokal, cenderung memandirikan masyarakat lokal, memihak kepentingan rakyat, melestarikan lingkungan hidup, memenuhi kebutuhan pokok dan memberdayakan masyarakat dari tekanan struktural ketimpangan sosial-ekonomi.

Sehingga untuk dapat mencapai kebutuhan pokok pembangunan, salah satunya yaitu mencapai kesejahteraan ekonomi (*welfare*), maka menurut Zubaedi (2007:175-176) perlu dilakukan upaya-upaya membangun model pembangunan yang berpijak pada prinsip demokrasi, pertumbuhan ekonomi yang menjamin kepentingan rakyat banyak (*appropriate economic growth*), kesetaraan gender (*gender equality*), dan keadilan antargenerasi (*intergeneration equity*).



Oleh karena itu, konsep pembangunan dan pemberdayaan masyarakat hadir sebagai model pembangunan alternatif yang esensinya sangat mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan dan humanisme. Sehingga menurut Zubaedi (2007:174-175), prinsip fundamental bagi pengembangan masyarakat seharusnya dipahami sebagai kebijakan dari bawah, bukan dari atas. Dengan cara seperti ini, masyarakat bisa terbantu dalam merumuskan kebutuhannya sendiri melalui kegiatan pembangunan yang diikuti. Adapun para ahli hanyalah berperan sebagai “pembantu” dalam memenuhi kebutuhan mereka.

## **2. Pembangunan/Pengembangan Masyarakat (*Community Development*)**

### **a. Konsep Pembangunan/Pengembangan Masyarakat (*Community Development*)**

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Shergi Bambang yang dikutip oleh Aam Muharam dalam Fahrudin ed. (2011:57) menyebutkan: Istilah pengembangan masyarakat (*community development*) menunjukkan digunakannya berbagai pendekatan dan teknik dalam satu program tertentu pada masyarakat-masyarakat lokal sebagai kesatuan tindakan dan mengusahakan perpaduan diantara bantuan yang berasal dari dan dengan keputusan serta upaya masyarakat lokal yang terorganisasi. Program ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mendorong prakarsa dan kepemimpinan lokal sebagai sarana perubahan primer.

Menurut Adisasmita yang ditulis oleh Zamhariri (2008:102), menyebutkan bahwa pembangunan masyarakat diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, dimana mereka mampu

mengidentifikasi kebutuhan dan masalah secara bersama, namun pakar lain memberikan batasan bahwa pembangunan masyarakat adalah perpaduan antara pembangunan sosial ekonomi dan pengorganisasian masyarakat.

Selain itu Zamhariri (2008:102) juga menyebutkan, ada pula yang mengartikan bahwa pembangunan masyarakat adalah kegiatan yang terencana untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi kemajuan sosial ekonomi masyarakat dengan meningkatkan partisipasi masyarakat. Pembangunan sektor sosial ekonomi masyarakat perlu diwujudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang didukung oleh organisasi dan partisipasi masyarakat yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan kinerja yang secara terus menerus tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

FCDL dalam Zubaedi (2007:19) menyatakan bahwa pengembangan masyarakat adalah upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai. Pengembangan masyarakat menerjemahkan nilai-nilai keterbukaan, persamaan, pertanggungjawaban, kesempatan, pilihan, partisipasi, saling menguntungkan, saling timbal balik, dan pembelajaran terus-menerus. Inti pengembangan masyarakat adalah mendidik dan membuat anggota masyarakat mampu mengerjakan sesuatu dengan memberikan kekuatan atau sarana yang diperlukan dan memberdayakan mereka.

Dapat disimpulkan dari berbagai macam pengertian mengenai *community development* tersebut, *community development* dapat dimaknai sebagai upaya pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat lokal secara

mandiri sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang ada dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat terus tumbuh secara mandiri dan mencapai kesejahteraan yang diinginkan.

#### **b. Asumsi Dasar Pengembangan Masyarakat (*Community Development*)**

Setiap disiplin ilmu atau profesi pada umumnya diarahkan oleh sejumlah asumsi, nilai dan prinsip-prinsip dasar yang berpengaruh besar terhadap arah dan aksentuasi disiplin dan profesi yang bersangkutan. Litrell dalam Fahrudin ed. (2011: 23-24) merumuskan setidaknya-tidaknya ada 5 (lima) asumsi yang sangat mendasar dalam pengembangan masyarakat:

- a. Masyarakat merupakan subyek yang mampu bertingkah laku/bertindak secara rasional
- b. Tingkah laku adalah hasil dari proses belajar
- c. Tingkah laku tersebut dipelajari melalui proses interaksi sosial
- d. Masyarakat mampu memberikan arah terhadap tingkah lakunya sendiri
- e. Masyarakat mampu menciptakan atau membentuk lingkungan/milieunya sendiri

Asumsi-asumsi diatas menegaskan bahwa masyarakat tidak dipandang sekedar sekumpulan manusia yang statis, melainkan senantiasa berada dalam “proses menjadi” (*becoming being, not being in static state*).

#### **c. Nilai-Nilai Pengembangan Masyarakat**

Dalam Fahrudin ed. (2011:24-25) Selain mempunyai asumsi-asumsi, pengembangan masyarakat juga mempunyai nilai-nilai yang menentukan fokusnya antara lain:

- a. Masyarakat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam menentukan keputusan-keputusan yang mampu mempengaruhi kesejahteraan mereka
- b. Kebebasan berpartisipasi merupakan suatu cara yang sangat berharga dalam mengendalikan berbagai persoalan masyarakat
- c. Masyarakat mempunyai hak untuk berusaha menciptakan lingkungan yang mereka inginkan
- d. Masyarakat mempunyai hak untuk menolak suatu lingkungan yang dipaksakan dari luar
- e. Peningkatan suatu interaksi manusia dalam suatu masyarakat akan menumbuhkan potensi bagi pengembangan aspek kemanusiaan
- f. Tercakup dalam suatu proses interaksi ialah suatu konsep atau pengertian tentang “masyarakat” yang selalu meluas
- g. Setiap disiplin atau profesi merupakan suatu kontribusi yang sangat berharga (potensial) bagi proses pengembangan masyarakat
- h. Motivasi diciptakan dalam diri manusia oleh pergaulan dengan lingkungan
- i. Pengembangan masyarakat berkepentingan dengan pengembangan kemampuan manusia dalam mengatasi masalah-masalah di lingkungannya

Nilai-nilai diatas memberi imbas yang lebih mendalam terhadap kehidupan sehari-hari dan pelaksanaan pengembangan masyarakat.

Konsep bahwa masyarakat mempunyai hak untuk menciptakan lingkungan yang mereka inginkan, mempunyai landasan yang kuat karena masyarakat sendirilah yang mengetahui atau dapat mempelajari apa yang terbaik

bagi mereka. Persoalan yang sederhana namun seringkali diabaikan. Usaha-usaha pembangunan yang bermula dari suatu landasan tentang “apa yang masyarakat butuhkan”bukan “apa yang baik untuk masyarakat tersebut”, biasanya menghasilkan kualitas yang jauh lebih baik. Masyarakat dalam hal ini mempunyai hak asasi untuk membentuk lingkungannya tanpa merusak lingkungan sesamanya, maka pendekatan terhadap masyarakat tersebut akan lebih tercapai, lebih dari memaksakan nilai-nilai yang berasal dari luar.

#### **d. Prinsip-prinsip Pengembangan Masyarakat**

Prinsip-prinsip umum pengembangan masyarakat menurut Bambang Shergi Laksmono dalam Aam Muharam dalam Fahrudin ed. (2011:58-59), adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan masyarakat merupakan proses perubahan sengaja dan terarah. Perubahan tersebut secara garis besar meliputi dua aspek yaitu perubahan fisik dan teknologi serta perubahan sistem nilai dan sikap
2. Pengembangan masyarakat bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat, tidak saja aspek makro yaitu masyarakat secara keseluruhan, melainkan juga unsur mikro yaitu dapat dinikmati oleh segenap warga masyarakat atau paling tidak bagian terbesar warga masyarakat
3. Mengutamakan pendayagunaan potensi dan sumber-sumber setempat. Sumber-sumber tersebut meliputi faktor fisik, manusia dan sosial. Warga masyarakat masih kurang peka atau tanggap terhadap sumber atau potensi yang ada disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, keterampilan, model, teknologi atau sistem nilai sosial budaya. Oleh karena itu pengembangan

masyarakat merupakan usaha untuk mendorong dan meningkatkan sikap tanggap masyarakat terhadap potensi dan sumber-sumber yang ada di sekitarnya.

4. Mengutamakan kreativitas dan inisiatif masyarakat. Hal ini berarti dalam kegiatan pengembangan masyarakat memperlakukan masyarakat tidak saja sebagai objek melainkan juga sebagai subjek pembangunan
5. Mengutamakan partisipasi masyarakat. Dalam menggerakkan partisipasi masyarakat adalah menanamkan pengertian secara luas dan merata tentang makna program pembangunan, arti penting program dan materi program pembangunan itu sendiri. Sehingga dengan demikian partisipasi yang muncul adalah karena “mengerti dan sadar bahwa partisipasinya dalam pembangunan merupakan kewajiban sekaligus haknya”.

Kegiatan pengembangan masyarakat dilakukan dengan berpedoman pada perencanaan, namun fleksibel untuk dimodifikasi sesuai dengan umpan balik dan kebutuhan yang berkembang pada saat pelaksanaan, dengan syarat dilakukan secara transparan dan berorientasi pada kelompok sasaran. Setiap pihak yang berkepentingan (yang mempengaruhi dan mempunyai keputusan berkenaan dengan program kegiatan yang sedang dijalankan) dapat berpartisipasi secara luas untuk memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil yang dicapai.

Pembangunan merupakan upaya yang terencana dan secara sadar dalam berbagai bidang yang dilakukan oleh suatu negara untuk dapat mencapai tujuan bersama menuju perubahan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Salah satu unsur dalam pembangunan yaitu adanya *Corporate Social Responsibility*

(CSR) yang biasanya disebut sebagai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) yang diberikan oleh perusahaan untuk masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan.

### C. CSR (*Corporate Social Responsibility*) / Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJLSP)

#### 1. Pengertian *Corporate Social Responsibility*

*World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) menyatakan bahwa CSR adalah suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberi kontribusi kepada pengembangan ekonomi komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta seluruh keluarganya. ([www.cifor.org](http://www.cifor.org)). Selanjutnya Magnan & Farrel (2004) yang dikutip oleh Susiloadi (2008:124-125) mendefinisikan CSR dengan memberikan penekanan pada perlunya memberikan perhatian secara seimbang terhadap kepentingan berbagai *stakeholders* yang beragam dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil pelaku bisnis melalui perilaku yang secara sosial bertanggung jawab.

Pada rancangan (*draft*) ISO 26000 yang akan mengatur mengenai CSR dalam Suharto yang dikutip oleh Jatmiko (2011:7) *Corporate Social Responsibility* adalah tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan

masyarakat; mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional; serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh (*draft 3*).

Wibisono (2007:8) juga berpendapat bahwa CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan untuk bertindak etis, meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (*Triple Bottom Line*) dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dari berbagai pernyataan mengenai CSR di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa CSR (*Corporate Social Responsibility*) merupakan tanggung jawab suatu perusahaan yang harus dilaksanakan untuk dapat memberikan kontribusinya kepada masyarakat dan lingkungan. CSR wajib dilaksanakan untuk menyeimbangkan kegiatan perusahaan dalam melakukan aktivitas bisnisnya yang mengambil sumber daya alam dan sumber dayam manusia. Oleh karena itu, CSR merupakan suatu tanggung jawab moral dan sosial yang juga merupakan suatu timbal balik dari perusahaan untuk masyarakat dan lingkungan.

## **2. Model atau Pola *Corporate Social Responsibility***

Menurut Saidi dan Abidin dalam Suharto yang dikutip oleh Kholisok (2010:35-36) setidaknya ada empat model atau pola CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang umumnya diterapkan di Indonesia, yaitu:



a. Keterlibatan Langsung

Perusahaan menjalankan CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. Untuk menjalankan tugas ini, sebuah perusahaan biasanya menugaskan salah satu pejabat seniornya, seperti *Corporate Secretary* atau *Public Affair Manager* atau menjadi bagian dari tugas pejabat *Public Relation*.

b. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan

Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau grupnya. Biasanya perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin atau dana abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan.

c. Bermitra dengan pihak lain

Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan lembaga sosial atau organisasi non pemerintah (Ornop), instansi pemerintah, universitas, atau media massa. Baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya.

d. Mendukung atau bergabung dengan konsorsium

Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Dibandingkan dengan modal lainnya, pola ini lebih berorientasi pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat “hibah pembangunan”. Pihak konsorsium atau lembaga semacam itu yang dipercayai oleh perusahaan-perusahaan yang

mendukungnya secara pro aktif mencari mitra kerjasama dari kalangan lembaga operasional dan kemudian mengembangkan program yang disepakati bersama.

*Corporate Social Responsibility (CSR)/ Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)* yang merupakan suatu tanggung jawab suatu perusahaan yang harus dilaksanakan untuk dapat memberikan kontribusinya kepada masyarakat dan lingkungan. Untuk dapat mencapai tujuannya dalam hal pembangunan, maka CSR sebagai kontribusi perusahaan untuk masyarakat dan lingkungan sekitarnya, dibutuhkan partisipasi dan peran serta dari pemerintah dan masyarakat agar dapat tercapai tujuan pembangunan.

#### **D. Teori Partisipasi dan Peranan**

##### **1. Partisipasi**

###### **a. Definisi Partisipasi**

Berikut ini merupakan beberapa definisi partisipasi dari beberapa ilmuwan yang dikutip dalam Sastroepoetro (1988):

- a. Keith Davis dalam bukunya yang berjudul *Human Relation at Work*, mengemukakan definisinya sebagai berikut,

*“Participation can be defined as mental and emotional involvement of a person in a group situation which encourage him to contribute to group goals and share responsibility in them. There are three ideas in this definition which are important to managers who will practice the art of the participation, most of them do agree on the importance of these three ideas.”*

Pendapat tersebut diatas dapat diterjemahkan sebagai berikut:

“Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang

mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. Di dalamnya terdapat tiga buah gagasan yang penting artinya bagi para manager/pimpinan yang hendak menerapkan seni partisipasi dan kebanyakan dari mereka sependapat dengan tiga buah gagasan tersebut.”

Adapun tiga buah unsur penting yang dimaksudkan oleh Keith Davis dan memerlukan perhatian khusus adalah:

1. Bahwa partisipasi / keikutsertaan / keterlibatan / peran serta, sesungguhnya merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan, lebih daripada semata-mata atau hanya keterlibatan secara jasmaniah.
  2. Unsur kedua adalah kesediaan memberi sesuatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok. Ini berarti bahwa terdapat rasa senang, kesukarelaan untuk membantu kelompok. Seseorang menjadi anggota kelompok dengan segala nilainya.
  3. Unsur ketiga adalah unsur tanggung jawab. Unsur tersebut merupakan segi yang menonjol dari rasa menjadi anggota artinya ada rasa “*sense of belongingness*”.
- b. Prof. Santoso S. Hamidjojo mengemukakan pendapat, bahwa untuk mencapai perubahan yang mengarah kepada perbaikan diperlukan suatu strategi sebagai pola penentuan serangkaian tujuan-tujuan dari perubahan yang diinginkan dengan partisipasi sosial. Strategi itu mencakup konsepsi atau partisipasi tentang masukan materi perubahan (inovasi/dengan dana dan tenaga yang dianggap paling efektif dan efisien dan dituangkan dalam sistem untuk menimbulkan perubahan ke arah perbaikan). Demikian

dikemukakanya tentang obyek partisipasi yang dapat terbentuk menyeluruh seperti program pembangunan yang terpadu dan juga bentuk yang terbatas berupa proyek kegiatan pembangunan yang sederhana.

c. Dr. Alastaire White dalam tulisannya berjudul “*Introduction to Community Participation*” yang dimuat dalam salah satu majalah luar negeri (nama majalah dan nomor telah hilang tersobek). Ia mengemukakan 10 buah alasan tentang pentingnya partisipasi sebagai berikut:

- 1) Dengan partisipasi lebih banyak hasil kerja yang dapat dicapai
- 2) Dengan partisipasi pelayanan atau servis dapat diberikan dengan biaya yang murah
- 3) Partisipasi memiliki nilai dasar yang sangat berarti untuk peserta, kerana menyangkut kepada harga dirinya
- 4) Partisipasi merupakan katalisator untuk pembangunan selanjutnya
- 5) Partisipasi mendorong timbulnya rasa tanggung jawab
- 6) Partisipasi menjamin, bahwa suatu kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat telah dilibatkan
- 7) Partisipasi menjamin, bahwa pekerjaan dilaksanakan dengan arah yang benar
- 8) Partisipasi menghimpun dan memanfaatkan berbagai pengetahuan yang terdapat di dalam masyarakat, sehingga terjadi perpaduan berbagai keahlian
- 9) Partisipasi membebaskan orang dari ketergantungan kepada keahlian orang lain

10) Partisipasi lebih menyadarkan manusia terhadap penyebab dari kemiskinan, sehingga menimbulkan kesadaran terhadap usaha untuk mengatasinya

Sastropetro (1986:41) menyatakan, dalam hal partisipasi ternyata, bahwa unsur-unsur penting dan turut menentukan adalah:

- a. Komunikasi yang menumbuhkan pengertian yang efektif/berhasil
- b. Perubahan sikap, pendapat dan tingkah laku yang diakibatkan oleh pengertian yang menumbuhkan kesadaran
- c. Kesadaran yang didasarkan kepada perhitungan dan pertimbangan
- d. Antusiasme yang menumbuhkan spontanitas, yaitu kesediaan melakukan sesuatu yang tumbuh dari dalam lubuk hati sendiri tanpa dipaksa orang lain
- e. Adanya rasa tanggung jawab terhadap kepentingan bersama

#### **b. Partisipasi Masyarakat**

Menurut Moeliono dalam Fahrudin (2007:36) secara harfiah, partisipasi berarti “turut berperan serta dalam suatu kegiatan”, “keikutsertaan atau peran serta dalam suatu kegiatan, “peran serta aktif dan proaktif dalam suatu kegiatan”. Partisipasi dapat didefinisikan secara luas sebagai bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dalam dirinya (*intrinsik*) maupun dari luar dirinya (*ekstrinsik*) dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan.

Menurut Bumberger dan Shams dalam Fahrudin (2007:36), terdapat dua pendekatan mengenai partisipasi masyarakat. (1) partisipasi merupakan proses sadar tentang pengembangan kelembagaan dan pemberdayaan dari masyarakat yang kurang beruntung berdasarkan sumber daya dan kapasitas yang dimilikinya. Dalam proses ini tidak ada campur tangan dan prakarsa pemerintah, (2) partisipasi harus mempertimbangkan adanya intervensi dari pemerintah dan LSM, disamping peran serta masyarakat. Hal ini sangat penting untuk implementasi proyek yang lebih efisien, mengingat kualitas sumber daya dan kapasitas masyarakat tidak memadai.

Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan sifatnya dapat dibedakan berdasarkan sifat:

- 1) Konsultatif. Dalam partisipasi masyarakat dengan pola hubungan konsultatif antara pihak pejabat pengambil keputusan dengan kelompok masyarakat yang berkepentingan, anggota-anggota masyarakatnya mempunyai hak untuk di dengar pendapatnya dan untuk diberi tahu, dimana keputusan terakhir tetap berada di tangan pejabat pembuat keputusan tersebut.
- 2) Kemitraan. Dalam konteks partisipasi masyarakat yang bersifat kemitraan, pejabat pembuat keputusan dan anggota-anggota masyarakat merupakan mitra yang relatif sejajar kedudukannya. Mereka bersama-sama membahas masalah, mencari alternatif pemecahan masalah dan membahas keputusan.

Ndraha dalam Fahrudin (2007:38) berpendapat bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dapat dipilah sebagai berikut:

- 1) Partisipasi dalam/melalui kontak dengan pihak lain sebagai awal perubahan sosial
- 2) Partisipasi dalam memperhatikan atau menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya
- 3) Partisipasi dalam perencanaan termasuk pengambilan keputusan
- 4) Partisipasi dalam pelaksanaan operasional
- 5) Partisipasi dalam menerima, memelihara, dan mengembangkan hasil pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai tingkat pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan tingkatan hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan, tidak lepas dari hubungan dengan pihak lain dan penguasaan informasi, sehingga penting artinya bagi proses sosialisasi dalam program yang berasal dari luar masyarakat.

## 2. Peranan

Peranan menurut Poerwadarminta dalam Cahyandi (2009:9) menyebutkan peranan berasal dari kata peran yang berarti “yang terutama” dan kemudian mendapatkan akhiran –an yang menyatakan “sesuatu hal atau peristiwa” sehingga peranan adalah suatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan utama dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa.

Hadiadmojo juga menyebutkan dalam Cahyandi (2009:9) menyebutkan bahwa peranan dikenal sebagai terjemah dari perkataan Inggris, yaitu *role* yang diartikan sebagai dari:

1. Figure atau tokoh
2. Keaktifan atau partisipasi
3. Kedudukan atau posisi
4. Kesatuan rangkaian sikap atau tingkah laku, cara-cara bertindak dari seseorang suatu kedudukan atau jabatan atau fungsi tertentu.

Sedangkan menurut Soehardjono dalam Cahyandi (2009:9) juga menyebutkan bahwa peranan adalah pola tindakan (*pattern of action*) yang diharapkan dari seseorang didalam kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang lain. Dari beberapa aspek tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa peranan merupakan rangkaian dari aktivitas yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan jabatan atau kedudukan yang dipegangnya, sehingga dapat menjalankan kewajiban dan tugas-tugasnya dengan baik.

Untuk dapat membantu mewujudkan tujuan dari pembangunan maka dibutuhkan partisipasi dan peran serta dari semua pihak yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pemerintah sebagai sebuah birokrasi sangat dibutuhkan dalam mencapai tujuannya dalam pembangunan, sedangkan swasta juga sebagai sebuah organisasi juga dituntut untuk mencapai tujuan dalam pembangunan.



## E. Teori Birokrasi

### 1. Pengertian Birokrasi

Hill dalam Dwiyanto (2011:21) menyebutkan bahwa dalam Ilmu Administrasi Publik, birokrasi memiliki sejumlah makna, diantaranya adalah pemerintahan yang dijalankan oleh suatu biro yang biasanya disebut dengan *officialism*, Albrow dalam Dwiyanto (2011:21-22) juga menyebutkan bahwa badan eksekutif pemerintah (*the executive organs of government*), dan keseluruhan pejabat publik (*public officials*), baik itu pejabat tingkat tinggi ataupun rendah.

Namun, Dwiyanto berpendapat (2011:22) karakteristik umum yang melekat pada birokrasi dan ketiga makna tersebut adalah keberadaannya sebagai suatu lembaga pemerintah. Makna birokrasi sebagai lembaga pemerintah muncul karena lembaga pemerintah pada umumnya selalu berbentuk birokrasi. Skala organisasi pemerintah yang besar dan luas cakupannya mendorong mereka untuk memiliki birokrasi yang memiliki karakteristik sebagai birokrasi Weberian.

Downs dalam Widodo (2007:11-12) berhasil menyimpulkan konsep birokrasi. Setidaknya, konsep birokrasi dapat dibedakan dalam tiga pengertian berikut. (1) birokrasi biasanya menunjuk suatu lembaga atau tingkatan lembaga khusus. Dalam pengertian ini, birokrasi dinyatakan sebagai suatu konsep yang sama dengan biro (walaupun tidak semua pengarang setuju dengan konsep tersebut), (2) birokrasi juga dapat berarti suatu metode tertentu untuk mengalokasikan sumber daya dalam suatu organisasi yang berskala

besar. Pengertian ini sama dengan pembuatan keputusan birokratis (*bureaucratic decision making*), dan (3), birokrasi diartikan sebagai “*bureauness*” or “*quality that distinguishes bureaus from other types of organization*”. Dalam pengertian ini, birokrasi merujuk pada kualitas yang dihasilkan oleh suatu organisasi. Ketiga pengertian birokrasi tersebut sering digunakan dalam berbagai kesempatan. Akan tetapi, baru menjadi jelas jika dilihat konteksnya, yakni pengertian tadi digunakan.

Birokrasi menurut Prajudi Atmosudirdjo dalam Hidajah (2004:19) mengemukakan bahwa birokrasi mempunyai tiga arti, yaitu:

- 1) Birokrasi sebagai suatu tipe organisasi. Sebagai suatu organisasi tertentu, birokrasi cocok sekali untuk melaksanakan dan menyelenggarakan suatu macam pekerjaan yang terikat pada peraturan-peraturan yang bersifat rutin, artinya volume pekerjaan besar, akan tetapi sejenis dan bersifat berulang-ulang, dan pekerjaan yang memerlukan keadilan, merata, dan stabil.
- 2) Birokrasi sebagai sistem, yang artinya birokrasi adalah suatu sistem kerja yang berdasar atas tata hubungan kerjasama antara jabatan (pejabat-pejabat) secara langsung kepada persoalannya dan secara formal serta berjiwa tanpa pilih kasih atau pandang bulu
- 3) Birokrasi sebagai jiwa kerja, dalam hal ini merupakan jiwa kerja yang kaku, sebab cara kerjanya seolah-olah seperti mesin, ditambah lagi dengan disiplin kerja yang ketat/keras dan sedikitpun tidak mau menyimpang dari

apa yang diperintahkan atasan atau yang telah ditetapkan oleh peraturan-peraturan.

Sehingga menurut Hidajah (2004:20), birokrasi merupakan organisasi yang memiliki ikatan-ikatan dalam bentuk peraturan dengan semangat keadilan, merata, dan stabil serta diikat oleh sebuah sistem kerja yang secara spesifik mengatur pola hubungan dan pendelegasian wewenang (*delegation authority*) secara jelas antar pejabat dalam melaksanakan tugasnya dengan disiplin kerja yang sangat tinggi.

## 2. Ciri-ciri Birokrasi

Sementara itu, oleh Weber dalam Widodo (2007:12-13), birokrasi diartikan sebagai "*ideal type of organization*" yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a.) Adanya pembagian pekerjaan, hubungan kewenangan dan tanggung jawab yang didefinisikan dengan jelas.
- b.) Kantor diorganisasikan secara hierarki atau adanya rangkaian komando.
- c.) Pejabat manajerial dipilih dengan kualifikasi teknis yang ditentukan dengan pendidikan dan ujian.
- d.) Peraturan dan pengaturan mengarah pada pelaksanaan pekerjaan.
- e.) Hubungan antara manajer dengan karyawan berbentuk impersonal.
- f.) Pegawai yang berorientasi pada karier dan mendapatkan gaji yang tepat.

Menurut Tome (2012:136-137) Birokrasi yang dicirikan oleh Weber tersebut, merupakan rumusan terhadap organisasi birokrasi pada umumnya.

Dimana organisasi birokrasi tersebut hadir dalam organisasi swasta maupun organisasi birokrasi pemerintahan.

Sehingga birokrasi yang merupakan sebuah lembaga pemerintah yang didalamnya terdapat pembagian tugas dan wewenang yang telah ditetapkan untuk dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan, maka dibutuhkan suatu koordinasi untuk dapat menyatukan masing-masing kinerja yang telah diberikan.

## **F. Teori Koordinasi**

### **1. Pengertian Koordinasi**

Menurut Harold Koontz, Cyril O'Donnell, dan Heinz Weihrich yang dikutip oleh Moekijat (1994:3) Koordinasi merupakan pencapaian keselarasan dari usaha individu dan kelompok kearah pencapaian maksud dan tujuan kelompok. David R. Hompton yang dikutip oleh Moekijat (1994:5) juga berpendapat bahwa agar pelaksanaan pekerjaan menjadi sukses maka organisasi memerlukan penyatupaduan sumbangan dari unit-unit khusus. Untuk tujuan kita, ini yang disebut koordinasi.

Begitu juga menurut pendapat dari Sondang P. Siagian yang dikutip Moekijat (1994:6) mendefinisikan bahwa koordinasi adalah pengaturan tata hubungan dari usaha bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam usaha pencapaian tujuan bersama pula. Koordinasi adalah suatu proses yang mengatur agar pembagian kerja dari berbagai orang atau kelompok dapat tersusun menjadi suatu kebutuhan yang terintegrasi dengan cara yang seefisien

mungkin. Selain itu, terdapat juga pendapat dari Moekijat (1994:2), koordinasi adalah penyelarasan secara teratur atau penyusunan kembali kegiatan-kegiatan yang saling bergantung dari individu-individu untuk mencapai tujuan bersama. Koordinasi berhubungan dengan tugas menyatupadukan kegiatan-kegiatan guna menjamin suksesnya pencapaian tujuan. Selain itu koordinasi berhubungan dengan keefektifan organisasi dan unit-unitnya.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, dapat dicapai suatu kesimpulan bahwa koordinasi merupakan penyatuan dari berbagai macam tugas maupun kegiatan yang saling berkesinambungan dan berhubungan satu sama lain untuk dapat dikerjakan secara bersama-sama sesuai dengan peranan dan tugas masing-masing yang telah ditentukan sehingga dapat tercapai suatu tujuan yang telah direncanakan bersama.

## **2. Tujuan dan Manfaat Koordinasi**

### **a. Tujuan koordinasi**

Koordinasi merupakan faktor yang penting dalam menjalankan suatu organisasi, bahkan bisa dibilang faktor utama yang memengaruhi kesuksesan suatu organisasi.

Mengutip Moekijat (1994:34), dapat diklasifikasikan tujuan dari koordinasi, yaitu:

1. Koordinasi bertujuan untuk menyatupadukan seluruh kegiatan untuk menjamin tercapainya suatu tujuan.

2. Dengan adanya koordinasi maka memungkinkan hasil pekerjaan secara keseluruhan menjadi lebih maksimal.
3. Dengan dilakukannya koordinasi maka organisasi menjadi lebih efektif.

Tujuan koordinasi pada hakekatnya adalah untuk mengatur secara tertib berbagai aktivitas dalam suatu organisasi, agar tercapai keterpaduan dan kesatuan tindakan sehingga terhindar dari adanya perbedaan persepsi terhadap suatu permasalahan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

#### **b. Manfaat koordinasi**

Selain itu, ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan melaksanakan koordinasi menurut Sutarto (2002:146-147), yaitu:

1. Dengan koordinasi dapat dihindarkan perasaan lepas satu individu dengan individu lainnya, antara satuan-satuan organisasi, atau antara pejabat yang ada di dalam organisasi.
2. Dengan koordinasi dapat dihindarkan perasaan bahwa unit organisasinya atau jabatannya yang paling penting.
3. Dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan timbulnya pertentangan antar unit organisasi atau antar pejabat.
4. Dengan koordinasi dapat dihindarkan timbulnya rebutan fasilitas organisasi
5. Dengan koordinasi dapat dihindarkan kekosongan waktu

6. Dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya pengulangan pengerjaan tugas yang sama (kekembaran pengerjaan tugas)
7. Dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya kekosongan pengerjaan tugas-tugas organisasi.
8. Dengan koordinasi dapat ditumbuhkan kesadaran diantara para pejabat untuk saling membantu terutama diantara para pejabat yang ada dalam satu unit organisasi yang sama.
9. Dengan koordinasi dapat ditumbuhkan kesadaran diantara para pejabat untuk saling memberitahu masalah yang dihadapi bersama, sehingga dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya sikap mementingkan kepentingan diri sendiri
10. Dengan koordinasi dapat dijamin kesatuan sikap antar para pejabat.
11. Dengan koordinasi dapat dijamin adanya kesatuan atas suatu kebijakan antar pejabat.
12. Dengan koordinasi dapat dijamin adanya kesatuan langkah dan tindakan antar pejabat.

### 3. Syarat – syarat Koordinasi

Menurut Tripathy dan Reddy (1983) dalam Moekijat (1994) ada 9 syarat untuk mencapai koordinasi yang efektif, yakni:

a. Hubungan langsung

Melalui hubungan pribadi langsung, ide-ide, cita-cita, tujuan-tujuan, pandangan-pandangan dapat dibicarakan dan salah paham, apabila ada, dapat dijelaskan jauh lebih baik ketimbang melalui metode apapun lainnya

b. Kesempatan awal

Koordinasi dapat dicapai lebih mudah dalam tingkat-tingkat awal perencanaan dan pembuatan kebijaksanaan.

c. Kontinuitas

Koordinasi merupakan suatu proses yang kontinu dan harus berlangsung pada semua waktu mulai dari tahap perencanaan. Oleh karena koordinasi merupakan dasar struktur organisasi, maka koordinasi harus berlangsung selama perusahaan melaksanakan fungsinya.

d. Dinamisme

Koordinasi harus secara terus-menerus diubah mengingat perubahan-perubahan lingkungan baik intern maupun ekstern. Dengan kata lain, koordinasi itu jangan kaku.

e. Tujuan yang jelas

Tujuan yang jelas itu penting untuk memperoleh koordinasi yang efektif dalam suatu organisasi. Suatu tujuan yang dimaksudkan untuk menghasilkan keselarasan tindakan.

f. Organisasi yang sederhana

Struktur organisasi yang sederhana memudahkan koordinasi yang efektif. Penyusunan kembali bagian-bagian dapat dipertimbangkan untuk memiliki



koordinasi yang lebih baik diantara kepala-kepala bagian. Pelaksanaan pekerjaan dan fungsi yang erat berhubungan dapat ditempatkan dibawah beban seorang pejabat pimpinan apabila hal ini akan mempermudah pengambilan tindakan yang diperlukan untuk koordinasi.

g. Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas

Faktor lain yang memudahkan koordinasi adalah definisi wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing individu dan bagian.

Wewenang yang jelas tidak hanya mengurangi pertentangan diantara pegawai-pegawai yang berlainan, tetapi juga membantu dalam pelaksanaan pekerjaan dengan kesatuan tujuan.

h. Komunikasi yang efektif

Komunikasi yang efektif merupakan salah satu persyaratan untuk koordinasi yang baik. Melalui saling tukar informasi secara terus menerus, perbedaa-perbedaan individu dan bagian dapat diatasi dan perubahan-perubahan kebijaksanaan, penyesuaian program-program, program-program untuk waktu yang akan datang, dan sebagainya dapat dibicarakan.

i. Kepemimpinan dan supervisi yang efektif

Suksesnya koordinasi banyak dipengaruhi oleh hakikat kepemimpinan dan supervisi. Kepemimpinan yang efektif menjamin koordinasi kegiatan orang-orang, baik pada tingkat perencanaan, maupun pelaksanaan. Pemimpin yang efektif membuat kepercayaan terhadap orang-orang bawahan dan memelihara juga semangat kerja mereka. Sesungguhnya,

kepemimpinan yang efektif merupakan metode koordinasi yang paling baik dan tidak ada metode lain yang dapat menggantikannya.

#### 4. Ketergantungan dalam Koordinasi

Menurut James D. Thompson dalam Bahan Ajar Diklat Kepemimpinan Aparatur Pemerintah Tingkat IV Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (2014:9-10) Koordinasi merupakan suatu "pengaturan/penataan" beragam elemen ke dalam suatu pengoperasian yang terpadu dan harmonis. Motivasi utama dari koordinasi biasanya adalah menghindari kesenjangan dan tumpang-tindih berkaitan dengan tugas atau kerja para pihak. Para pihak biasanya berkoordinasi dengan harapan memperoleh hasil secara efisien. Koordinasi dilakukan umumnya dengan melakukan harmonisasi tugas, peran, dan jadwal dalam lingkungan dan sistem yang sederhana.

Sementara itu, kerjasama mengacu kepada praktik antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama (mungkin juga termasuk cara/metodenya), kebalikan dari bekerja sendiri-sendiri dan berkompetisi. Motivasi utama dari kerjasama biasanya adalah memperoleh kemanfaatan bersama (hasil yang saling menguntungkan) melalui pembagian tugas. Seperti halnya dengan koordinasi, selain memperoleh hasil seefisien mungkin, para pihak biasanya bekerjasama dengan harapan menghemat biaya dan waktu. Kerjasama umumnya dilakukan untuk memecahkan persoalan dalam lingkungan dan sistem yang kompleks.

Menurut James D.Thompson dalam Bahan Ajar DiklatKepemimpinan Aparatur Pemerintah Tingkat IV Lembaga Administrasi Negara Republik

Indonesia (2014:10) ada tiga macam saling ketergantungan di antara satuan-satuan organisasi, yaitu:

1. Saling ketergantungan yang menyatu (*pooled interdependent*), bila satuan-satuan organisasi tidak saling tergantung satu dengan yang lain dalam melaksanakan kegiatan harian tetapi tergantung kepada pelaksanaan kerja setiap satuan yang memuaskan untuk suatu hasil akhir.
2. Saling ketergantungan yang berurutan (*sequential interdependent*), di mana suatu satuan organisasi harus melakukan pekerjaan terlebih dahulu sebelum satuan yang lain bekerja.
3. Saling ketergantungan timbal balik (*reciporal interdependent*) merupakan hubungan memberi dan menerima antar satuan organisasi.

Organisasi dalam bentuk apapun esensinya terdiri dari sumber daya, proses manajemen dan tujuan organisasi. Seluruh sumber daya yang dimiliki organisasi tersebut dimanfaatkan dalam proses manajemen secara terintegrasi dalam pencapaian tujuan organisasi. Proses integrasi sumber daya maupun proses manajemen untuk mencapai tujuan organisasi tersebut disebut dengan proses koordinasi. Dengan demikian, koordinasi memiliki peran yang vital dalam memadukan seluruh sumber daya organisasi untuk pencapaian tujuan. Berikut ini merupakan gambar dari tiga ketergantungan organisasi yang terdiri dari *pooled interdependence*, *sequential interdependence*, dan *reciprocal interdependence*.

## 5. Jenis – jenis Koordinasi

Koordinasi diperlukan oleh organisasi untuk menyatupadukan tindakan dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan adanya koordinasi yang efektif, maka segala macam tindakan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dapat menjadi sinkron dan terintegrasi dengan baik. Dalam menjalankan koordinasi ada beberapa jenis koordinasi yang diterapkan dalam organisasi.

Menurut Hasibuan (2005:86-87) ada dua jenis koordinasi, yaitu koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal:

- a. Koordinasi vertikal (*vertical coordination*). Merupakan kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada dibawah wewenang dan tanggung jawabnya.
- b. Koordinasi horisontal (*horizontal coordination*). Yaitu mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi (aparatur) setingkat.

Berikut ini merupakan beberapa jenis koordinasi dari pendapat beberapa ahli dalam Moekijat (1994):

- a. Tosi dan Carroll (1982)

Ada dua jenis koordinasi, yakni koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal. Baik koordinasi vertikal maupun koordinasi horizontal diperlukan dalam organisasi. Koordinasi vertikal menunjukkan

pengembangan hubungan-hubungan yang efektif dan yang disatupadukan diantara kegiatan-kegiatan pada tingkat-tingkat organisasi yang berlainan. Sedangkan koordinasi horizontal adalah pengembangan hubungan-hubungan yang lancar diantara individu-individu atau kelompok-kelompok pada tingkat yang sama.

b. Dann Sugandha (1991)

Ada enam jenis koordinasi, yakni koordinasi intern, koordinasi ekstern, koordinasi horizontal, koordinasi vertikal, koordinasi diagonal, dan koordinasi fungsional.

- a) Koordinasi intern yaitu koordinasi antar pejabat atau antar unit di dalam suatu organisasi.
- b) Kemudian koordinasi ekstern yaitu koordinasi antar pejabat dari berbagai organisasi atau antar organisasi.
- c) Koordinasi horizontal yaitu koordinasi antar pejabat atau antar unit yang mempunyai tingkat hierarki yang sama dalam suatu organisasi, dan antar pejabat dari organisasi-organisasi yang sederajat atau antar organisasi yang setingkat.
- d) Koordinasi vertikal yaitu koordinasi antara pejabat-pejabat dan unit-unit tingkat bawah oleh pejabat atasannya atau unit tingkat atasannya langsung, juga cabang-cabang suatu organisasi oleh organisasi induknya.
- e) Koordinasi diagonal yaitu koordinasi antar pejabat atau unit yang berbeda fungsi dan berbeda tingkat hierarkinya.

- f) Koordinasi fungsional yaitu koordinasi antar pejabat, antar unit atau antar organisasi yang didasarkan atas kesamaan fungsi, atau karena koordinatornya mempunyai fungsi tertentu.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang koordinasi kegiatan instansi vertikal di daerah

Ada tiga jenis koordinasi, yakni koordinasi fungsional, koordinasi instansional, dan koordinasi teritorial. (1) Koordinasi fungsional, antara dua atau lebih instansi yang mempunyai program yang berkaitan erat. (2) Koordinasi instansional, terhadap beberapa instansi yang menangani satu urusan tertentu yang bersangkutan. (3) Koordinasi teritorial, terhadap dua atau lebih wilayah dengan program tertentu. Dengan dilaksanakannya koordinasi melalui berbagai jenis koordinasi tersebut, maka dimungkinkan organisasi atau birokrasi pemerintah dapat mencapai kesamaan tindakan dan persepsi sehingga pencapaian tujuan organisasi dapat terlaksana dengan baik.

## 6. Bentuk-bentuk Koordinasi

Menurut Sutarto (2002: 152-158) koordinasi dalam suatu organisasi dapat dilakukan dalam berbagai cara atau bentuk, antara lain:

- a. Mengadakan pertemuan informal antara para pejabat

Cara ini dapat dilakukan misalnya pada saat istirahat setelah bekerja

- b. Mengadakan pertemuan formal antara para pejabat yang biasanya dinamakan rapat.

Rapat yang dimaksud bisa berupa konferensi, musyawarah, dan lain-lain.

Dalam rapat koordinasi sebaiknya diutamakan pembicaraan yang menyangkut masalah yang menimbulkan hambatan, kejanggalaan, pekerjaan yang tertunda, dan lain-lain sehingga dapat dipecahkan bersama.

- c. Membuat edaran berantai kepada para pejabat yang diperlukan

Surat edaran dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan keputusan bersama dalam menghadapi suatu masalah, yaitu dengan mengedarkan memo secara berantai kepada pihak yang bersangkutan untuk meminta pendapat mereka atas suatu kebijakan.

- d. Membuat penyebaran kartu kepada para pejabat yang diperlukan

Memo yang diedarkan berupa kartu-kartu dan diberikan secara serentak dan mendorong agar pejabat yang bersangkutan benar-benar mengemukakan pendapatnya.

- e. Mengangkat koordinator

Koordinator merupakan pihak yang menjadi penghubung antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan.

- f. Membuat buku pedoman organisasi, buku pedoman tata kerja, dan buku pedoman kumpulan peraturan

Dengan adanya pedoman tata kerja maka dapat dijamin adanya kesatuan langkah dalam organisasi.

- g. Melalui alat perhubungan

Koordinasi juga bisa dilakukan melalui media alat perhubungan seperti telepon, telegram, dan lain-lain.

- h. Membuat tanda-tanda, simbol, dan kode

Pembuatan tanda-tanda, simbol, dan kode dilakukan untuk mencapai kesepakatan dalam tindakan dan persepsi.

## 7. Metode dan Teknik Koordinasi

Pada umumnya, makin besar tingkat keadaan saling bergantung, makin banyak perhatian organisasi harus dicurahkan kepada koordinasi. Oleh karena itu diperlukan suatu metode dan teknik atau cara untuk memilih koordinasi yang tepat bagi suatu organisasi.

Menurut Handyaningrat (1994:124) metode dan teknik yang dapat dipakai dalam melakukan kegiatan koordinasi, dapat dibagi atas:

- a. Koordinasi melalui kewenangan

Beberapa pendapat mengatakan bahwa penggunaan wewenang adalah merupakan salah satu cara untuk menjamin terlaksananya koordinasi dengan baik. Hal ini yang demikian itu mungkin benar, apabila organisasi tersebut bersifat seragam (homogen) atau yang disebut *integrated type*. Dalam organisasi yang demikian itu, koordinasi melalui kewenangan dapat dijalankan secara efektif. Akan tetapi dalam kenyataannya organisasi yang betul-betul seragam (homogen) seratus persen jarang ditemukan. Adapun yang banyak ditemukan adalah organisasi bersifat heterogen, atau disebut *holding company type* atau *federal type*, yaitu suatu organisasi yang mempunyai keanekaragaman



jenis dan fungsi, yang dapat diidentifikasi pada struktur organisasinya. Dalam organisasi yang demikian itu perlu diusahakan adanya integrasi dari seluruh jenis dan fungsi-fungsi yang ada, karena setiap jenis dan fungsi hanyalah merupakan sub sistem dari seluruh sistem pelaksanaan tugas pokok organisasi secara keseluruhan.

b. Koordinasi melalui konsensus

1) Koordinasi melalui motivasi

Motivasi juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan usaha-usaha koordinasi, terutama dalam organisasi besar dan kompleks yang mempunyai jenis dan fungsi yang beraneka ragam. Motivasi yang dimaksud antara lain dapat berupa kepentingan bersama, bahkan dalam situasi tertentu mempunyai perasaan solidaritas berdasarkan atas kesetiakawanan atau *esprit de corps*, yang dapat dipergunakan dalam menjamin kelancaran koordinasi. Melalui nilai-nilai ini dapat diharapkan tercapainya konsesnya yang lebih terintegrasi dalam mencapai tujuan bersama.

2) Koordinasi melalui sistem timbal-balik

Sistem timbal balik/saling membantu (*system of reciprocity*) dapat dipergunakan dalam meningkatkan usaha koordinasi. Melalui sistem ini diusahakan adanya keseimbangan (*equilibrium*) antara tuntutan organisasi (tercapainya koordinasi) dan tuntutan individual, baik yang bersifat material maupun yang bersifat non material. Dalam hubungan

ini perlu ditekankan bahwa factor nilai-nilai pengabdian, dapat pula merupakan dasar utama dalam melaksanakan usaha koordinasi.

### 3) Konsensus melalui ide

Konsensus melalui ide atau dikatakan koordinasi melalui ide (*corrdination by ideas*), dimaksudkan bahwa setiap orang yang bekerja dalam organisasi berusaha mengidentifikasi dirinya dalam keseluruhan tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi. Walaupun sukar bagi individu untuk mengidentifikasi dirinya dalam keanekaragaman tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi, akan tetapi juga membuktikan bahwa metode/teknik ini juga nampaknya berhasil dalam usaha pembangunan.

### c. Koordinasi melalui pedoman kerja

Pedoman kerja atau petunjuk kerja (manual) dijadikan landasan berpijak dan bertindak bagi setiap kegiatan, sehingga diharapkan dapat terselenggaranya koordinasi dengan cara yang sebaik-baiknya. Jelaslah bahwa pedoman kerja atau petunjuk kerja, merupakan saran dan pengaruh berbagai kegiatan yang saling berkaitan, sehingga koordinasi dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kelemahan dalam pelaksanaan koordinasi fungsional, mungkin dapat teratasi dengan adanya suatu pedoman kerja atau petunjuk kerja yang dapat dijadikan landasan berpijak dan bertindak bagi setiap instansi pemerintah yang terikat dalam hubungan kerja ini. Berdasarkan uraian tersebut maka manualisasi merupakan satu kegiatan yang sudah mendesak untuk ditingkatkan pelaksanaannya, karena

adanya berbagai manual kerja, bukan saja akan meningkatkan koordinasi dalam rangka efisiensi kerja dan produktivitas kerja, tetapi akan mempermudah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lainnya.

d. Koordinasi melalui forum

Usaha-usaha koordinasi melalui forum, ialah dengan menggunakan suatu wadah tertentu (wahana) yang dapat dipergunakan sebagai cara mengadakan tukar-menukar informasi, mengadakan konsultasi, mengadakan kerjasama dalam pemecahan suatu masalah, dan pengambilan keputusan bersama dalam pelaksanaan tugas bersama, serta hal-hal lain yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh instansi pemerintah yang bersangkutan. Adapun wahana yang dikenal sebagai forum koordinasi ialah: tim kerja, panitia, satuan tugas (*task force*), dan bentuk-bentuk perwadhahan lainnya. Wahana koordinasi sebagaimana disebutkan diatas dapat bersifat intern dalam lingkungan suatu organisasi, terutama bagi masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan secara fungsional oleh unit-unit kerja yang berwenang dan bersifat segera untuk diselesaikan. Disamping itu terdapat wahana koordinasi yang bersifat ekstern, yaitu masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh unit/organisasi yang bersangkutan. Wahana koordinasi yang bersifat ekstern, misalnya: Panitia Inter Depatemenal, Satuan Kerja (*task force*), yang unsur-unsurnya terdiri dari berbagai unit/perwakilan departemen.

e. Koordinasi melalui konferensi

Koordinasi melalui konferensi diartikan dengan rapat-rapat atau sidang-sidang yang dilakukan baik pada tingkat pimpinan (eksekutif) maupun pada tingkat pelaksana. Rapat-rapat atau sidang-sidang pada tingkat pimpinan penting sekali artinya, tidak semata-mata dalam pengambilan keputusan terhadap masalah yang timbul dalam pelaksanaan, akan tetapi dipergunakan sebagai sarana dalam pengintegrasian seluruh fungsi yang ada dalam organisasi. Yang menjadi pertanyaan siapakah seharusnya memprakarsai konferensi yang demikian itu. Tentunya bagi pejabat pimpinan pelaksana yang bertanggung jawab dalam penyelesaian tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan baik di pusat maupun di daerah.

### 8. Koordinasi dalam Perspektif Administrasi Publik

Koordinasi sangat dibutuhkan dalam setiap kegiatan dan berbagai organisasi, termasuk juga koordinasi yang dibutuhkan dalam setiap kegiatan dan organisasi, begitupun juga dengan koordinasi yang dilihat dari perspektif ilmu administrasi publik tradisional (*Old Public Administration*, OPA).

Miftah Thoha (2008:75-76) berpendapat bahwa konsep "*the Old Public Administration*" ini dalam perjalanan sejarah memperoleh juga perkembangannya dengan konsep-konsep baru. Salah satu diantaranya timbulnya konsep rasional model. Yang dikemukakan oleh Herbert Simon melalui tulisannya tentang *Administrative Behavior* (1957). Demikian juga

konsep tentang *public choice*. Adapun *mainstream* dari ide inti dari *the Old Public Administration* dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Titik perhatian pemerintah adalah pada jasa pelayanan yang diberikan langsung oleh dan melalui instansi-instansi pemerintah yang berwenang.
- 2) *Public policy* dan *administration* berkaitan dengan merancang dan melaksanakan kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan politik.
- 3) Administrasi publik hanya memainkan peran yang lebih kecil dari proses pembuatan kebijakan-kebijakan pemerintah ketimbang upaya untuk melaksanakan (*implementation*) kebijakan publik.
- 4) Upaya memberikan pelayanan harus dilakukan oleh para administrator yang bertanggung jawab kepada pejabat politik dan yang diberikan diskresi terbatas untuk melaksanakan tugasnya.
- 5) Para administrator bertanggung jawab kepada pemimpin politik yang dipilih secara demokratis.
- 6) Program-program kegiatan diadministrasikan secara baik melalui garis hierarki organisasi dan dikontrol oleh para pejabat dari hierarki atas organisasi.
- 7) Nilai-nilai utama (*the primary values*) dari administrasi publik adalah efisiensi dan rasionalitas.
- 8) Administrasi publik dijalankan sangat efisien dan sangat tertutup, karena itu warga negara keterlibatannya amat terbatas.
- 9) Peran dari administrasi publik dirumuskan secara luas seperti *planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, budgeting*.

Ide konsep *the Old Public Administration* ini bisa berlangsung pada semua sektor kehidupan pemerintahan. Dapat disimpulkan dalam paradigma *Old Public Administration* ini, setiap kegiatan dan peran dari administrasi publik menggunakan fungsi koordinasinya disamping fungsi yang lain. Hal tersebut dapat dilihat dari salah satu ide inti diatas dimana peran dari administrasi publik dirumuskan secara luas seperti *planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, budgeting*.

Namun, agaknya dalam *Old Public Administration* ini fungsi koordinasi juga kurang mengena apabila dilihat dari kurang terlibatnya partisipasi masyarakat dalam administrasi publik. Hal tersebut dikarenakan ciri dari koordinasi adalah suatu usaha kerjasama untuk mencapai tujuan bersama, sehingga bisa dibilang *Old Public Administration* kurang mengena dengan koordinasi.

### **9. Fungsi Koordinasi dalam Pembangunan**

Menurut Syafrudin (1993:263) koordinasi merupakan suatu proses rangkaian kegiatan menghubungi, bertujuan untuk menyerasikan tiap langkah dan kegiatan dalam organisasi agar tercapai hasil yang maksimal untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya koordinasi dapat mencegah terjadinya kesimpangsiuran dan kegiatan yang saling tumpang tindih yang dapat mengakibatkan pemborosan-pemborosan dan pengaruh tidak baik terhadap kedisiplinan kerja.

Lebih lanjutnya, Syafrudin (1993:268) menjabarkan mengenai pentingnya koordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, antara lain:

- a.) Dapat dicegah dan dihilangkan titik pertentangan.
- b.) Para petugas/pejabat terpaksa berfikir dan berbuat sesuai dengan sasaran dan tujuan yang sama yang hendak dicapai.
- c.) Dapat dicegah terjadinya kesimpangsiuran dan duplikasi kegiatan
- d.) Dapat mengembangkan prakarsa dan daya improvisasi parapejabat/petugas.

Dengan demikian koordinasi dalam suatu pelaksanaan kegiatan pembangunan mempunyai peranan yang penting, yaitu dalam rangka menyeraskan dan menyatukan aktivitas-aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai *stakeholders*, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan adanya koordinasi yang baik maka kemungkinan besar pelaksanaan pembangunan juga akan membuahkan hasil yang baik pula.

#### **10. Koordinasi dalam Perspektif *Good Governance***

*Good Governance* menurut *World Bank* dalam Mardiasmo yang dikutip oleh Batubara (2006:1) mendefinisikan sebagai suatu penyelenggara manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. *Good governance* memiliki beberapa prinsip

untuk dapat dijadikan sebagai suatu tolak ukur. Salah satu prinsipnya yaitu berorientasi konsensus, konsensusbertindak sebagai penengah berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.

*Good Governancemenurut World Bank* yang lebih menekankan terhadap pembangunan masyarakat sesuai dengansalah satu prinsipnya yang berorientasi pada konsensus. Dapat diartikan bahwa dalam melaksanakan pembangunan masyarakat dibutuhkan sebuah konsensus untuk dapat mencapai kepentingan masing-masing pihak dalam pembangunan masyarakat. Konsensus tersebut salah satunya yaitu koordinasi. Koordinasi dibutuhkan untuk dapat mencapai kepentingan masing-masing pihak sehingga tujuan dan kepentingan bersama dapat tercapai. Karena koordinasi merupakan penyatupaduan kegiatan satu sama lain yang saling berhubungan untuk dapat mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Sehingga koordinasi bersifat penting bagi pelaksanaan *good governance*.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Moleong (2012:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Selain itu, pengertian penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2008:9): “Metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi”. Sugiyono (2008:9) juga menyatakan bahwa metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam menggambarkan “Peran Koordinasi Bappeda dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat (Studi pada Bappeda dan Tim

Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJLSP) di 3Kecamatan Kabupaten Sidoarjo)”.  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian adalah suatu awalan yang dijadikan sebagai wilayah pelaksanaan penelitian, sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang situasi yang diteliti. Fokus penelitian ini diperlukan untuk membatasi studi pada penelitian sehingga obyek yang diteliti tidak melebar dan terlalu luas dari konteks yang diteliti. Fokus penelitian ini juga ditujukan agar penelitian lebih terarah dan lebih terinci serta tidak menyimpang dari rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu dengan fokus, peneliti akan tahu persis data yang perlu dikumpulkan dan yang tidak perlu dikumpulkan.

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka fokus penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Peran Bappeda dalam upaya Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP):
  - a. Peran Bappeda dalam Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan TJSLP
  - b. Tujuan dan sasaran Bappeda dalam pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan TJSLP
  - c. Aktor yang terlibat dalam pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan TJSLP

d. Mekanisme prosedur dalam pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan TJSLP

2. Koordinasi antar Bappeda dengan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP):

a. Koordinasi dengan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSLP) Kecamatan Waru:

- 1.) Susunan anggota
- 2.) Koordinasi dan integrasi antar anggota
- 3.) Koordinasi dengan Bappeda
- 4.) Hasil Kinerja

b. Koordinasi dengan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSLP) Kecamatan Sidoarjo:

- 1.) Susunan anggota
- 2.) Koordinasi dan integrasi antar anggota
- 3.) Koordinasi dengan Bappeda
- 4.) Hasil Kinerja

c. Koordinasi dengan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSLP) Kecamatan Jabon:

- 1.) Susunan anggota
- 2.) Koordinasi dan integrasi antar anggota
- 3.) Koordinasi dengan Bappeda
- 4.) Hasil Kinerja

3. Faktor Pendukung dan faktor Penghambat Koordinasi Antara Bappeda dengan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP):
  - a. Faktor Pendukung
  - b. Faktor Penghambat

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian. Berdasarkan lokasi penelitian ini peneliti memperoleh data dan informasi sesuai dengan tema, masalah, dan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Maka, lokasi penelitian yang dipilih adalah Kabupaten Sidoarjo. Pemilihan lokasi ini karena Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah industri di Indonesia, hal tersebut dikarenakan banyaknya perusahaan yang berada di kabupaten ini. Dengan banyaknya jumlah perusahaan yang ada, maka Kabupaten Sidoarjo mempunyai potensi untuk memberdayakan masyarakat sekitar perusahaan yang didirikan melalui dana bantuan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan tersebut, bukan hanya mengandalkan dana dari pemerintah saja.

Sedangkan yang dimaksud dengan situs penelitian adalah tempat dimana peneliti dapat menangkap keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti. Adapun situs dari penelitian ini adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Sidoarjo yang membentuk Tim Koordinasi tersebut. Selain itu

terdapat tiga sampel Tim Koordinasi yang berada di beberapa kecamatan yang dibutuhkan yaitu:

- a. Kecamatan Waru, Jarak dari pusat Kota Sidoarjo sejauh 19 km dan dikenal sebagai pusat industri penyangga Kota Surabaya dan merupakan sebagai salah satu pengembangan dari kawasan Industri Rungkut (SIER).
- b. Kecamatan Sidoarjo, yang merupakan ibu kota kabupaten dan daerah administratif Kabupaten Sidoarjo.
- c. Kecamatan Jabon, Jarak dari pusat kota Sidoarjo sejauh 21 km dan memiliki sedikit perusahaan industri besar di kecamatan ini dan mempunyai banyak produk unggulan dari UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) masyarakat.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2012:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data atau sumber informasi adalah segala sesuatu yang bisa memberikan informasi mengenai data penelitian yang dibutuhkan. Sumber data menunjukkan darimana peneliti mendapatkan data atau informasi yang diperlukan dalam penelitian, dapat berupa orang atau benda.

Berdasarkan jenis penelitian ini, data yang diperoleh dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung pada saat kita melakukan penelitian. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari

orang-orang yang dipilih atau responden untuk memperoleh informasi atau data-data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Responden tersebut adalah:

- a. Ibu Ir. Rosida Winayu sebagai Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Kabupaten Sidoarjo dan sebagai Ketua Tim Fasilitasi Program Kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Kabupaten Sidoarjo
- b. Bapak Ali Muzakki, SE sebagai Kepala Sub Bidang Perekonomian Bappeda Kabupaten Sidoarjo
- c. Bapak Iswadi, selaku Sekretaris Kecamatan Waru dan sebagai Sekretaris II Tim Koordinasi Kecamatan Waru
- d. Bapak SuyudSupriadi, SP.MM selaku Kepala Seksi Pembangunan Fisik Kecamatan Sidoarjo dan Anggota Pelaksana Tim Koordinasi Tim Koordinasi Kecamatan Sidoarjo
- e. Ibu Dra. Hj. Lenny Nurmalasari selaku Kepala Seksi Perekonomian dan Anggota Pelaksana Tim Koordinasi TJLSP Kecamatan Jabon
- f. Bapak Mustamir selaku Seksi Humas dan juga Anggota Bidang Sosial Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kecamatan Jabon

## 2. Data Sekunder

Walaupun dikatakan bahwa sumber di luar kata dan tindakan merupakan sumber kedua, jelas hal itu tidak bisa diabaikan. Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber

buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. (Moleong, 2012:159). Data sekunder yang didapatkan dari penelitian ini adalah berupa artikel yang dikumpulkan dari internet, penelitian terdahulu yang berupa skripsi dan jurnal, peraturan-peraturan dan perundang-undangan, serta arsip-arsip yang berkaitan dengan Koordinasi antara Bappeda dengan Tim Koordinasi.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. (Sugiyono, 2008:224). Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

#### **1. Wawancara**

Sugiyono (2008:231) menyatakan bahwa wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam. Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara kepada narasumber yang bersangkutan secara langsung untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

## 2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data sekunder dengan mengumpulkan data-data seperti: dokumen resmi, arsip, dan peraturan, maupun perundang-undangan. Dengan adanya teknik dokumentasi ini, peneliti mempelajari, mencatat, atau membuat salinan dari dokumen-dokumen, arsip-arsip, ataupun literatur yang terkait dan berhubungan dengan obyek atau permasalahan dalam penelitian yang dilakukan. Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi juga dilakukan dalam penelitian ini, seperti melakukan pengumpulan data sekunder berupa artikel dari internet, penelitian terdahulu berupa jurnal dan skripsi, mengumpulkan peraturan-peraturan dan perundang-undangan, serta mengumpulkan arsip-arsip yang berhubungan dengan koordinasi antara Bappeda dengan Tim Koordinasi.

## F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini instrumen pokok merupakan peneliti itu sendiri, sedangkan instrumen penunjangnya adalah:

1. Pedoman wawancara (*interview guide*), yaitu serangkaian pertanyaan yang diajukan pada pihak-pihak sumber data dalam penelitian.
2. Catatan lapangan (*field notes*), dipergunakan untuk mencatat apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam pengumpulan data di lapangan yang menggunakan alat tulis-menulis sebagai alat bantu.



3. Alat perekam (*tape recorder*), sebagai alat bantu untuk merekam hasil wawancara dan dalam prakteknya peneliti menggunakan telepon seluler.

### G. Teknik Analisis Data

Proses analisis merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas masalah penelitian. Seiddeldalam Moleong (2012:248) mengungkapkan bahwa proses analisis data kualitatif berjalan sebagai berikut:

1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesis, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya.
3. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.

Menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono (2008:246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*).

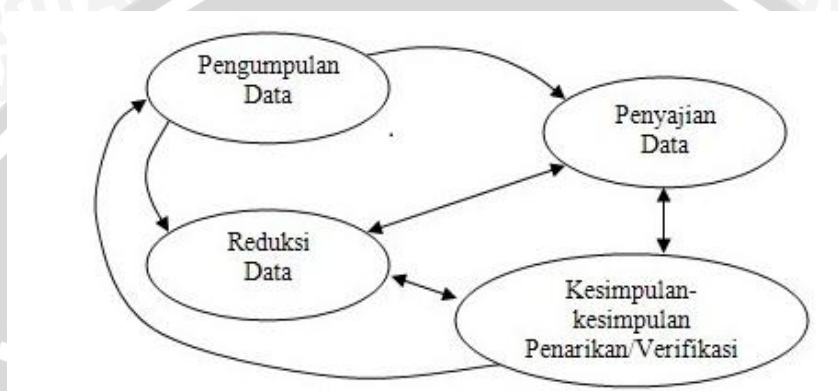
1. Reduksi data (*data reduction*). Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dalam penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.

2. Penyajian data (*data display*). Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini, Miles dan Huberman yang dikutip Oleh Sugiyono (2008:249) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.
3. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*), Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan. Bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan

data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Berikut ini merupakan gambar model analisis data interaktif dari Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2008:247):



**Gambar 2. Komponen dalam analisis data (*Interactive model*)**

Sumber: *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Sugiyono, 2008:247)

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

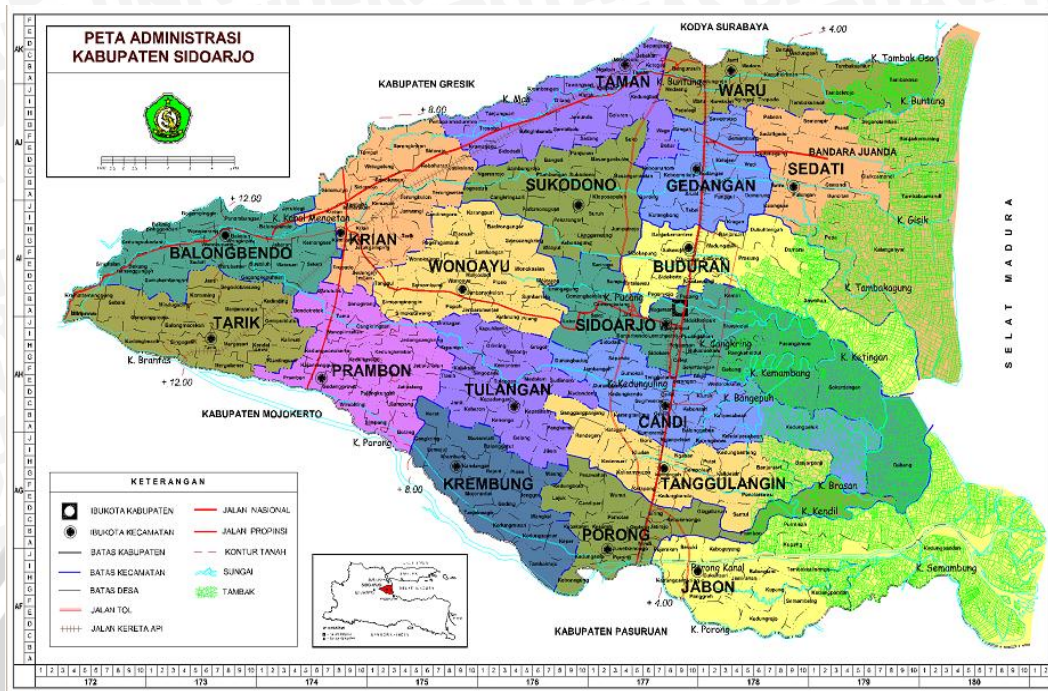
#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu penyangga Ibukota Propinsi Jawa Timur merupakan daerah yang mengalami perkembangan pesat. Keberhasilan ini dicapai karena berbagai potensi yang ada di wilayahnya seperti industri dan perdagangan, pariwisata, serta usaha kecil dan menengah dapat dikemas dengan baik dan terarah. Dengan adanya berbagai potensi daerah serta dukungan sumber daya manusia yang memadai, maka dalam perkembangannya Kabupaten Sidoarjo mampu menjadi salah satu daerah strategis bagi pengembangan perekonomian regional.

Kabupaten Sidoarjo lahir pada 31 Januari 1959, terletak antara 112,5° dan 112,9° Bujur Timur dan antara 7,3° dan 7,5° Lintang Selatan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Batas sebelah utara adalah Kotamadya Surabaya dan Kabupaten Gresik,
- b. Batas sebelah selatan adalah Kabupaten Pasuruan,
- c. Batas sebelah timur adalah Selat Madura, dan
- d. Batas sebelah barat adalah Kabupaten Mojokerto.



**Gambar 3. Peta Kabupaten Sidoarjo**

Sumber: [sidoarjo.kab.go.id](http://sidoarjo.kab.go.id)

## 2. Kondisi Geografis Kabupaten Sidoarjo

### a. Topografi

Dataran Delta terletak di ketinggian antar 0 s/d 25 meter, ketinggian 0-3meter dari permukaan laut dengan luas 19.006 Ha, meliputi 29,99% yang merupakan daerah pertambakkan yang berada di Wilayah Bagian Timur. Kemudian 40,81% Wilayah Bagian Tengah yang berair tawar dengan ketinggian 3-10 meter dari permukaan laut merupakan daerah pemukiman, perdagangan dan pemerintahan. Dan 29,20% Wilayah Bagian Barat dengan ketinggian 10-25 meter dari permukaan laut merupakan daerah pertanian.

#### b. Hidrogeologi

Kabupaten Sidoarjo memiliki daerah air tanah, payau, dan air asin yang mencapai luas 16.312.69 Ha. Kedalaman air tanah rata-rata 0-5 meter dari permukaan tanah.

#### c. Hidrologi

Kabupaten Sidoarjo terletak diantara dua aliran sungai yaitu Kali Surabaya dan Kali Porong yang merupakan cabang dari Kali Brantas yang berhulu di kabupaten Malang.

#### d. Klimatologi

Kabupaten Sidoarjo beriklim tropis dengan dua musim, yaitu musim kemarau pada bulan Juni sampai Bulan Oktober dan musim hujan pada bulan Nopember sampai bulan Mei.

#### e. Struktur Tanah

Struktur tanah Kabupaten Sidoarjo terdiri dari Alluvial kelabu seluas 6.236,37 Ha, Assosiasi Alluvial kelabu dan Alluvial Coklat seluas 4.970,23 Ha, Alluvial Hidromart seluas 29.346,95 Ha, dan Gromosal kelabu Tua Seluas 870,70 Ha.

### 3. Sejarah Singkat Kabupaten Sidoarjo

Pada tahun 1851 Sidoarjo masih bernama Sidokare yang merupakan bagian dari daerah Kabupaten Surabaya. Saat itu Sidokare dipimpin oleh seorang Patih yang bernama R. Ng. Djojohardjo dan dibantu oleh seorang wedono bernama Bagus Ranuwirjo. Baru pada tanggal 31 Januari 1859 berdasarkan keputusan Hindia Belanda No. 9 /1859 Staatsblat No. 6

Kabupaten Surabaya dipecah menjadi 2, yaitu Kabupaten Surabaya dan Kabupaten Sidokare, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

Bupati pertama Sidokare adalah RT. Notopuro (RTP. Tjokronegoro I) yang merupakan putra Bupati Surabaya dan bertempat tinggal di Pandean (Sidoarjo Plasa Sekarang). Pada masa pemerintahan beliau inilah didirikan masjid di Pekauman (Masjid Abror). Berdasarkan keputusan pemerintah Hindia Belanda No. 10/1859 tanggal 28 Mei 1859 Staatsblat No. 32 nama Kabupaten Sidokare diganti dengan Kabupaten Sidoarjo. Tahun 1862 Bupati Tjokronegoro I memindahkan rumah Kabupaten dari kampung Pandean ke kampung Pucang (Wates). Disini beliau mendirikan Masjid Jami' (Masjid Agung) dan disebelah barat masjid dijadikan Pesarean Pendem (Asri). Ketika beliau wafat tahun 1863, jasad beliau disemayamkan dipesarean tersebut.

Sebagai penggantinya diangkatlah Kanjeng Djimad Djokomono kakak almarhum, sebagai Bupati Sidoarjo ke dua dengan gelar RTAA Tjokronegoro II. Pada masa ini pembangunan Masjid Jami' dan perbaikan pesarean Pendem dilanjutkan, ditambah dengan pembangunan kampung Mager Sari. Tahun 1883 Bupati RTAA Tjokronegoro II mendapat pensiun, kemudian wafat dimakamkan dipesarean Botoputih Surabaya. Penggantinya adalah RP Sumodirejo, pindahan dari Tulungagung yang hanya memerintah selama 3 bulan karena wafat dan dimakamkan di Pesarean Pendem.

Selanjutnya pada tahun itu juga diangkatlah RAAT Tjokronegoro I sebagai Bupati Sidoarjo. Pada tahun 1895 beliau menyempurnakan

pembangunan Masjid Jami' dengan pemasangan marmer untuk memperindah masjid dan menetapkan pesarean bagi para Bupati dan keluarga, penghulu dan segenap ahlul masjid berada dipekarangan masjid Jami'. Pada waktu itu Kabupaten Sidoarjo terdiri dari 6 Kawedanan (distrik):

1. Djenggolo I Kawedanan Gedangan;
2. Djenggolo II Kawedanan Sidoarjo;
3. Djenggolo III Kawedanan Krian;
4. Djenggolo IV Kawedanan Taman;
5. Rawa Pilo I Kawedanan Porong;
6. Rawa Pulo II Kawedanan Bulang.

Nama – nama ini mulai hilang kira-kira pada tahun 1902. Sistem pemerintahan pada masa itu memakai sistem sentralisasi dan hirarkis, yaitu Wedono dibawah perintah Bupati dan Camat dibawah Perintah Wedono.

Bupati RAA Tjondronegoro I wafat tahun 1906 dan dimakamkan di Pesarean belakang masjid Jami'. Sebagai gantinya adalah RP Samiun, bergelar RAA Tjondronegoro II yang diangkat pada tahun itu juga. Setelah memerintah selama kurang lebih 18 tahun, beliau pensiun (1924). Setelah itu selama 2 tahun (1924-1926) Kabupaten Sidoarjo vakum (tidak ada Bupati). Pada tahun 1926, RTA Sumodipuro diangkat menjadi Bupati. Setelah menderita sakit berkepanjangan pada tahun 1932 beliau pensiun. Selama satu tahun jabatan bupati kosong lagi dan baru tahun 1933 RAA Suyadi yang semula Patih Madiun diangkat menjadi Bupati.



Kemudian sejak 8 Maret 1942 hingga 15 Agustus 1945 Daerah Delta Brantas berada dibawah Kekuasaan Militer Jepang, sebagaimana halnya daerah-daerah di Indonesia lainnya. Selama masa pendudukan Jepang ini Bupati Sidoarjo tetap dijabat oleh Bupati RAA Suyadi. Pada 15 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu, didaerah-daerah mulai dibentuk badan atau perkumpulan yang bersifat Nasional. Pada saat itu yang berkuasa didaerah Delta Berantas adalah Kaigun (tentara laut Jepang). Badan - badan atau perkumpulan yang bersifat Nasional mulai dibentuk dengan nama BKR dan PTKR. Pada permulaan Maret 1946 Belanda kembali ke daerah kita (Sidoarjo). Pada waktu menduduki Gedangan, pemerintah memandang perlu untuk memindahkan pusat pemerintahan Kabupaten Sidoarjo ke Porong.

Pemerintahan Recomba (1946-1949). Tanggal 24 Desember 1946 Belanda menyerang Kota Sidoarjo. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dipindahkan lagi yaitu kedaerah Jombang. Sesudah Negara Jawa Timur dibentuk daerah Delta Brantas ini masuk daerah Negara Boneka tersebut. Mulai saat itu Daerah Sidoarjo berada dibawah pemerintahan Recomba yang berjalan hingga tahun 1949. Pada waktu itu Bupati Sidoarjo adalah K. Ng. Soebakti Poespanotodan R. Suharto. Kemudian pada tanggal 27 Desember 1949 Belanda menyerahkan kembali Pemerintahan kepada Pemerintah Republik Indonesia. Pada waktu itu juga daerah Delta Brantas menjadi daerah Republik Indonesia. Sesudah penyerahan kembali kedaulatan kepada Pemerintah RI berdasarkan Undang-Undang Nomor 22/1948. R Suryadi Kertosoeprajo diangkat menjadi Bupati/Kepala Daerah di Kabupaten Sidoarjo.

#### 4. Pembagian Wilayah Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo

Wilayah pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo terbagi atas 18 kecamatan dan 353 desa. Sesuai perkembangan pemerintahan tahun 1981, pemerintahan desa mengalami perubahan yaitu menjadi 325 dan 28 kelurahan dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel 1. Pembagian Wilayah Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo**

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
1	Sidoarjo	24	11
2	Candi	13	-
3	Buduran	15	-
4	Porong	13	6
5	Krebung	19	-
6	Tulangan	22	-
7	Tanggulangin	19	-
8	Jabon	15	-
9	Krian	19	3
10	Balombendo	20	-
11	Tarik	20	-
12	Prambon	20	-
13	Wonoayu	23	-
14	Taman	16	8
15	Sukodono	198	-
16	Gedangan	15	-
17	Waru	17	-
18	Sedati	16	-
<b>Jumlah</b>	<b>18 Kecamatan</b>	<b>325</b>	<b>28</b>

Sumber: [pariwisata.sidoarjo.kab.go.id](http://pariwisata.sidoarjo.kab.go.id)

## 5. Visi dan Misi Kabupaten Sidoarjo

Visi dari Kabupaten Sidoarjo adalah "**Sidoarjo Sejahtera, Mandiri dan Berkeadilan**". Untuk mewujudkan visi pembangunan Sidoarjo 2010 - 2015 tersebut, ditempuh melalui misi-misi yang tujuan akhirnya adalah kesejahteraan seluruh masyarakat Sidoarjo, "Sidoarjo Sejahtera, Mandiri dan Berkeadilan" dijabarkan ke dalam delapan misi utama yang dijalankan secara berkesinambungan dan sinergi, yang memfokuskan pada pengembangan sektor-sektor ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pembangunan kemakmuran masyarakat Sidoarjo yang mandiri. Delapan misi utama tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global.
- 2) Menumbuh kembangkan potensi sektor industri, perdagangan, pariwisata, pertanian, perikanan, UMKM dan Koperasi secara optimal yang berwawasan lingkungan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- 3) Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang berkepribadian, beriman serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban.
- 4) Mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan prinsip pembangunan berbasis masyarakat dan kesetaraan gender.
- 5) Meningkatkan profesionalisme aparatur untuk mencapai pelayanan prima.

- 6) Mendorong tumbuh kembangnya iklim investasi untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
- 7) Meningkatkan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- 8) Menumbuhkan iklim demokrasi yang sehat, santun serta menjunjung tinggi norma dan etika masyarakat.

## **6. Gambaran Umum Instansi**

### **a. Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo**

Arah pembangunan yang terencana dengan baik dan dinamis sangat dipengaruhi adanya peran serta masyarakat maupun unsur-unsur dalam masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini jelas di atur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjelaskan bahwa tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah/perangkat daerah dipusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Pembentukan Bappeda Republik Indonesia ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam hal ini

Bappeda mempunyai dua tingkat kedudukan. Yang pertama, Bappeda Tingkat I (sekarang Pemerintahan Provinsi) dan Bappeda Tingkat II (sekarang Pemerintahan Kabupaten/Kota). Bappeda merupakan singkatan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang mana badan ini merupakan Badan Staf yang langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Bappeda berperan sebagai pembantu kepala daerah dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Guna menyempurnakan Peraturan Daerah khususnya dalam mengimplementasi pembangunan daerah yang merata berdasarkan prinsip otonomi yang seluas-luasnya, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, di mana pada pasal 23 ditegaskan sebagai berikut: “Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota adalah kepala badan perencanaan pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda”. Dengan demikian Bappeda Kabupaten Sidoarjo adalah badan penyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di Kabupaten Sidoarjo baik dalam jangka panjang, jangka menengah maupun rencana tahunan. ([www.bappeda.sidoarjo.kab.go.id/](http://www.bappeda.sidoarjo.kab.go.id/))

#### **b. Visi dan Misi Bappeda Kabupaten Sidoarjo**

Visi dari Bappeda Kabupaten Sidoarjo yaitu “Terwujudnya perencanaan yang sinergis dan berkelanjutan sebagai pedoman

pelaksanaan pembangunan yang dilandasi sikap profesionalisme”. Yakni Bappeda Sidoarjo yang mampu secara profesional memfasilitasi dan mengakomodir berbagai kebijakan; program dan kegiatan pembangunan dari para *stakeholders*, sehingga antar program dan kegiatan pembangunan saling memperkuat; selaras, sinkron dan memberikan landasan yang mantap bagi pembangunan selanjutnya, serta mempunyai peran sebagai arah/pedoman, pendorong, penggerak utama, inisiator dan inovator pelaksanaan pembangunan yang efisien dan efektif.

Kemudian dalam mewujudkan visi tersebut, maka misi Bappeda Kabupaten Sidoarjo yaitu “Merumuskan secara efektif kebijakan perencanaan pembangunan melalui: analisa dan perencanaan penelitian serta instrumennya; kegiatan monitoring dan evaluasi, kegiatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi (KISS); serta melakukan penilaian atas pelaksanaannya”.

### **c. Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kabupaten Sidoarjo**

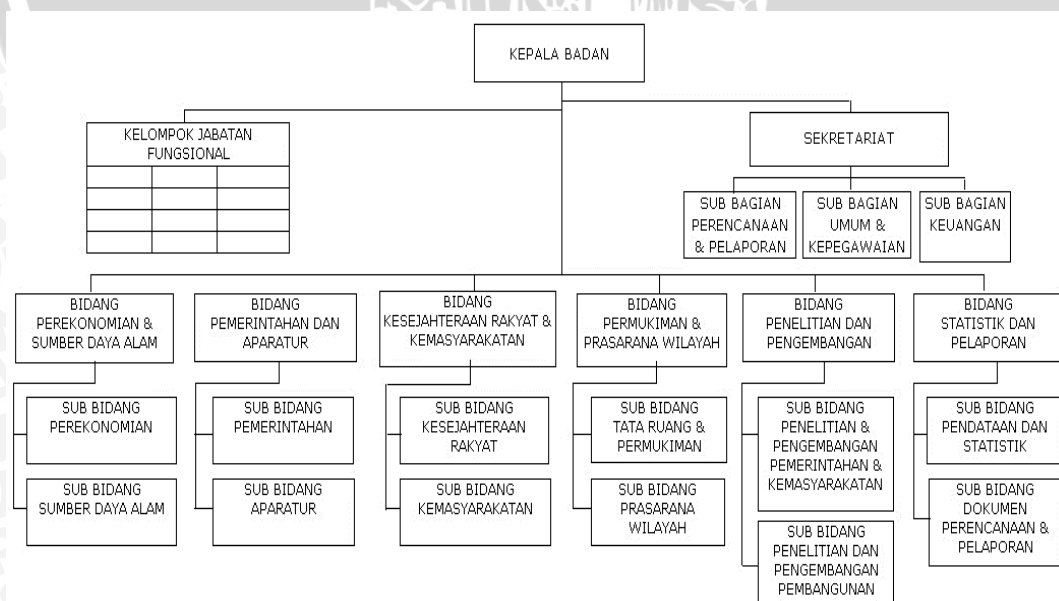
Bappeda merupakan salah satu wujud pelaksanaan UU. No 32 tahun 2004, berdasarkan otonomi daerah, maka daerah berhak mengatur dan mengurus daerahnya sendiri dengan cara menetapkan dan menyusun rencana pembangunannya. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) adalah unsur perencana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Landasan Hukum dibentuknya Bappeda Kabupaten Sidoarjo yaitu Peraturan Bupati

Sidoarjo No. 55 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda Kabupaten Sidoarjo.

Bappeda Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan beberapa fungsi, diantaranya yaitu:

- 1) Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah
- 2) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

**d. Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Sidoarjo**



**Gambar 4. Bagan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Sidoarjo**

Sumber: [SidoarjoKab.go.id](http://SidoarjoKab.go.id)

Landasan Hukum Peraturan Bupati Sidoarjo No. 55 Tahun 2008 - Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda Kabupaten Sidoarjo menyatakan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) adalah unsur perencana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. ([bappeda.sidoarjokab.go.id/](http://bappeda.sidoarjokab.go.id/))

a. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Badan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan mempunyai fungsi:

- 1) Perencanaan program bidang perekonomian dan sumber daya alam; pemerintahan dan aparatur; kesejahteraan rakyat dan aparatur; pemukiman dan prasarana wilayah; penelitian dan pengembangan; statistik dan pelaporan serta kesekretariatan.
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja
- 3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas satuan kerja
- 4) Pembinaan pelaksanaan tugas bawahan
- 5) Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

b. Sekretariat



Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- 1) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program kebijakan teknis
- 2) Pelayanan administrasi umum dan kepegawaian
- 3) Pengelolaan administrasi keuangan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya

c. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana program serta petunjuk teknis Perencanaan di bidang perekonomian dan sumber daya alam
- 2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis Perencanaan di bidang perekonomian dan sumber daya alam
- 3) Perencanaan di bidang perekonomian dan sumber daya alam
- 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan perencanaan bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya

d. Pemerintahan dan Aparatur

Bidang Pemerintahan dan aparatur mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam perencanaan bidang pemerintahan dan aparatur. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pemerintahan dan Aparatur mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana program serta petunjuk teknis Perencanaan di bidang pemerintahan dan aparatur
- 2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis Perencanaan di bidang pemerintahan dan aparatur;
- 3) Perencanaan di bidang pemerintahan dan aparatur
- 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan perencanaan bidang Pemerintahan dan Aparatur
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan

Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam perencanaan bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana program serta petunjuk teknis Perencanaan di bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan;
- 2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis Perencanaan di bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan;
- 3) Perencanaan di bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan;
- 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan perencanaan bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan;

5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya

f. Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah

Bidang Permukiman dan Prasarana wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam perencanaan bidang permukiman dan prasarana wilayah. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana program serta petunjuk teknis Perencanaan di bidang permukiman dan prasarana wilayah
- 2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis Perencanaan di bidang permukiman dan prasarana wilayah
- 3) Perencanaan di bidang permukiman dan prasarana wilayah
- 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan perencanaan bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya

g. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang penelitian dan pengembangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana program serta petunjuk teknis penelitian dan pengembangan

- 2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis penelitian dan pengembangan
- 3) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
- 4) Pelaporan pelaksanaan tugas bidang penelitian dan pengembangan
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang sesuai dengan bidang tugasnya

#### h. Bidang Statistik dan Pelaporan

Bidang Statistik dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang statistik dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Statistik dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana program serta petunjuk teknis statistik dan pelaporan
- 2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis statistik dan laporan
- 3) Pengumpulan, pengkajian dan penyajian data serta menyusun sistem informasi untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah
- 4) Penyusunan data statistik daerah
- 5) Penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya
- 7) Penyusun kebijakan, prioritas dan plafon anggaran  
([www.bappeda.sidoarjo.go.id/](http://www.bappeda.sidoarjo.go.id/))

## 7. Kecamatan Jabon



Gambar 5. Peta Kecamatan Jabon

Sumber: Sidoarjab.go.id

Kecamatan Jabon berada di ujung timur-selatan Kabupaten Sidoarjo. Jaraknya dari pusat kota Sidoarjo sekitar 21 Km. Sebelah Barat dan Utara berbatasan dengan Kecamatan Porong dan Kecamatan Sidoarjo, sebelah Selatan dan Barat berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan, sedangkan sebelah Timur berbatasan dengan Selat Madura.

Tabel 2. Data Kependudukan Kecamatan Jabon  
Tahun 2013

NO	DATA	TRIBUNANI						TOTAL
		WNI			WNA			
		L	P	JML	L	P	JML	
1	Jumlah Penduduk	29.580	29.324	58.904	2	0	2	58.906
2	Kelahiran	149	84	233			0	233
3	Kematian	25	24	49			0	49
4	Pendatang	43	35	78			0	78
5	Pindah	57	44	101			0	101

NO	DATA	TRIBUNAN I						TOTAL
		WNI			WNA			
		L	P	JML	L	P	JML	
6	Jumlah Kep. Keluarga	11.463	7.328	18.791			0	18.791
7	Jumlah Pend. Ber KK	11.811	4.593	16.404			0	16.404
8	Jumlah Pend. Wajib KTP	23.004	20.400	43.404			0	43.404
9	Jumlah Pend. Ber KTP	9.740	4.797	14.537			0	14.537

Sumber: Sidoarjokab.go.id

Tabel 2 diatas menyatakan mengenai data jumlah penduduk di Kecamatan Jabon pada tahun 2013. Kecamatan Jabon memiliki total jumlah penduduk sebanyak 58.906 jiwa yang dihitung berdasarkan jumlah Warga Negara Indonesia dan Jumlah Warga Negara Asing. Penduduk Kecamatan Jabon juga dispesifikasikan menurut 9 kriteria, yaitu kelahiran, kematian, pendatang, pindah, jumlah kepala keluarga, jumlah penduduk ber kepala keluarga, jumlah penduduk wajib KTP, dan jumlah penduduk yang memiliki KTP.

Tabel 3 berikut menyatakan mengenai luas wilayah desa dengan hitungan hektar, ketinggian wilayah desa dengan satuan meter, dan jarak tempuh desa ke Ibukota Kecamatanpada tahun 2012.

**Tabel 3. Luas Wilayah, Ketinggian dan Jarak dari Desa/Kelurahan ke Ibukota Kecamatan Jabon Tahun 2012**

No	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Hektare)	Ketinggian Wilayah (m)	Jarak Tempuh ke Ibukota Kec.
1	Panggreh	171.780	3	3.00
2	Trompoasri	273.290	3	3.50
3	Kedungrejo	311.030	3	7.00
4	Kedungpandan	1,723.020	3	7.50
5	Semambung	200.410	3	6.50
6	Kupang	1,696.990	3	5.50
7	Tambakkalisogo	1,176.440	3	6.50
8	Balongtani	213.430	3	4.00
9	Jemirahan	173.080	3	3.00
10	Dukuhsari	221.230	3	0.50
11	Kedungcangkring	217.330	3	1.00
12	Pejarakan	62.470	3	5.50
13	Besuki	217.330	3	5.50
14	Keboguyang	205.620	3	7.00
15	Permisan	1,236.310	3	9.50
Jumlah		8,099.760		

Sumber: Kecamatan Jabon dalam Angka 2013

Tabel diatas menyatakan bahwa Kecamatan Jabon memiliki total 15 desa. Desa dengan luas wilayah terluas yaitu Desa Kedungpandan seluas 1,723.020 hektar, dan desa dengan luas wilayah terkecil yaitu Desa Pejarakan seluas 62.470 hektar. Semua desa di Kecamatan Jabon memiliki ketinggian yang sama, yaitu 3 meter. Kemudian, desa dengan jarak tempuh terjauh ke

ibukota kecamatan yaitu Desa Kedungpandan, dan Desa dengan jarak tempuh terpendek yaitu Desa Dukuhsari.

## 8. Kecamatan Sidoarjo



**Gambar 6. Peta Kecamatan Sidoarjo**

*Sumber: Sidoarjokab.go.id*

Kecamatan Sidoarjo merupakan Ibukota Kabupaten. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Wonoayu, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Candi, sedangkan sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sukodono dan Buduran, sedangkan sebelah Timur berbatasan dengan Selat Madura.

**Tabel 4. Data Kependudukan Kecamatan Sidoarjo  
Tahun 2013**

NO	DATA	TRIBUNAN I						TOTAL
		WNI			WNA			
		L	P	JML	L	P	JML	
1	Jumlah Penduduk	105.932	105.967	211.629	7	6	13	211.642
2	Kelahiran	193	124	317			0	317
3	Kematian	25	14	39			0	39
4	Pendatang	181	186	367			0	367
5	Pindah	117	74	191			0	191



NO	DATA	TRIBUNAN I						TOTAL
		WNI			WNA			
		L	P	JML	L	P	JML	
6	Jumlah Kep. Keluarga	37.951	24.263	62.214			0	62.214
7	Jumlah Pend. Ber KK	40.420	15.719	56.139			0	56.139
8	Jumlah Pend. Wajib KTP	82.376	73.050	155.426			0	155.426
9	Jumlah Pend. Ber KTP	45.045	22.186	67.231			0	67.231

Sumber: Sidoarjo.kab.go.id

Tabel 4 diatas menyatakan mengenai data jumlah penduduk di Kecamatan Sidoarjo pada tahun 2013. Kecamatan Sidoarjo memiliki total jumlah penduduk sebanyak 211.642 jiwa yang dihitung berdasarkan jumlah Warga Negara Indonesia dan Jumlah Warga Negara Asing. Sama halnya dengan Kecamatan Jabon, penduduk Kecamatan Sidoarjo juga dispesifikasikan menurut 9 kriteria, yaitu kelahiran, kematian, pendatang, pindah, jumlah kepala keluarga, jumlah penduduk ber kepala keluarga, jumlah penduduk wajib KTP, dan jumlah penduduk yang memiliki KTP. Tabel 5 berikut menyatakan mengenai luas wilayah desa dengan hitungan hektar, ketinggian wilayah desa dengan satuan meter, dan jarak tempuh desa ke Ibukota Kecamatan pada tahun 2011.

**Tabel 5. Luas Wilayah, Ketinggian dan Jarak dari Desa/Kelurahan ke Ibukota  
Kecamatan Sidoarjo  
Tahun 2011**

No	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Hektare)	Ketinggian Wilayah (m)	Jarak Tempuh ke Ibukota Kec.
1	Lebo	217.6	4	8
2	Suko	204.64	4	7
3	Banjarbendo	141.94	4	5
4	Lemah Putro	88.54	4	0,5
5	Sidokare	114.4	4	2
6	Celep	52.8	4	3
7	Sekardangan	823.93	4	5
8	Gebang	1222.89	4	7
9	Rangkah Kidul	258.01	4	7
10	Bulusidokare	970	4	7
11	Pucanganom	403.72	4	5
12	Pekauman	8.77	4	4
13	Sidokumpul	66	4	1
14	Sidoklumuk	46.7	4	0.5
15	Bluru Kidul	294.99	4	4
16	Kemiri	322.89	4	4
17	Pucang	86.27	4	3
18	Magersari	113.99	4	1
19	Jati	141.55	4	3
20	Cemengkalang	94.13	4	4
21	Cemengbakalan	109.91	4	5
22	Urungagung jedog	194.32	4	8
23	Sarirogo	153.07	4	7

No	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Hektare)	Ketinggian Wilayah (m)	Jarak Tempuh ke Ibukota Kec.
24	Sumput	124.95	4	6
Jumlah		6.256.01		

Sumber: Kecamatan Sidoarjo dalam Angka 2012

Tabel diatas menyatakan bahwa Kecamatan Sidoarjo memiliki total 24 desa. Desa dengan luas wilayah terluas yaitu Desa Gebang seluas 1222.89 hektar, dan desa dengan luas wilayah terkecil yaitu Desa Pekauman seluas 8.77 hektar. Semua desa di Kecamatan Sidoarjo memiliki ketinggian yang sama, yaitu 4 meter. Kemudian, desa dengan jarak tempuh terjauh ke ibukota kecamatan yaitu Desa Lebo dan Desa Urungagung jedog sejauh 8 km, kemudian desa dengan jarak tempuh terpendek yaitu Desa Sidoklumuk sejauh 0.5 km. Berikut ini merupakan tabel 6 yang menyatakan mengenai banyaknya jumlah industri besar dan sedang serta jumlah tenaga kerja menurut KLUI (Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia) di Kecamatan Sidoarjo pada tahun 2011.

**Tabel 6. Banyaknya Industri Besar/Sedang dan Jumlah Tenaga Kerja Menurut KLUI Tahun 2011**

No	KLUI	Jumlah Perusahaan/Usaha	Jumlah Tenaga Kerja
1	Industri Makanan dan Minuman	23	1.745
2	Industri tekstil, pakaian jadi, dan kulit	1	87
3	Industri kayu dan sejenisnya	5	1.486
4	Industri kertas, percetakan, dan penerbitan	2	116

No	KLUI	Jumlah Perusahaan/Usaha	Jumlah Tenaga Kerja
5	Industri kimia, minyak, kecuali minyak bumi dan batubara	-	-
6	Industri barang galian kecuali minyak bumi dan batubara	-	-
7	Industri Logam dasar	-	-
8	Industri barang dari logam	2	43
9	Industri pengolahan lainnya	7	935
<b>JUMLAH</b>		<b>40</b>	<b>4.412</b>

Sumber: Kecamatan Sidoarjo dalam Angka 2012

Tabel 6 diatas berdasarkan KLUI (Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia) membagi industri menjadi sembilan. Industri besar/ sedang yang ada di Kabupaten Sidoarjo total berjumlah 40 buah dengan tenaga kerja yang berjumlah 4.412 orang. Industri tersebut terdiri dari Industri Makanan dan Minuman berjumlah 23 buah dengan jumlah tenaga kerja 1.745 orang. Kemudian Industri tekstil, pakaian jadi, dan kulit sebanyak 1 buah dengan jumlah tenaga kerja 87 orang. Industri kayu dan sejenisnya sejumlah 5 buah dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 1.486 orang.

Industri kertas, percetakan, dan penerbitan berjumlah 2 buah dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 116 orang. Industri barang dari logam berjumlah 2 buah dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 43 orang, dan industri pengolahan lainnya berjumlah 7 buah dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 935 orang. Industri besar/ sedang yang tidak ada di Kecamatan Sidoarjo yaitu

Industri kimia, minyak, kecuali minyak bumi dan batubara juga Industri barang galian kecuali minyak bumi dan batubara.

Tabel 7 dibawah berikut menjelaskan mengenai banyaknya jumlah industri kecil beserta jumlah tenaga kerjanya juga menurut KLUI (Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia)

**Tabel 7. Banyaknya Industri Kecil dan Jumlah Tenaga Kerja Menurut KLUI Tahun 2011**

No	KLUI	Jumlah Perusahaan/Usaha	Jumlah Tenaga Kerja
1	Industri Makanan dan Minuman	2	44
2	Industri tekstil, pakaian jadi, dan kulit	3	31
3	Industri kayu dan sejenisnya	18	24
4	Industri kertas, percetakan, dan penerbitan	4	88
5	Industri kimia, minyak, kecuali minyak bumi dan batubara	-	-
6	Industri barang galian kecuali minyak bumi dan batubara	-	-
7	Industri Logam dasar	-	-
8	Industri barang dari logam	3	12
9	Industri pengolahan lainnya	6	137
<b>JUMLAH</b>		<b>436</b>	<b>336</b>

*Sumber: Kecamatan Sidoarjo dalam Angka 2012*

Tabel 7 diatas berdasarkan KLUI (Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia) juga membagi industri menjadi sembilan. Industri kecil yang ada di Kabupaten Sidoarjo total berjumlah 436 buah dengan tenaga kerja yang berjumlah 336 orang. Industri tersebut terdiri dari Industri Makanan dan

Minuman berjumlah 2 buah dengan jumlah tenaga kerja 44 orang. Kemudian Industri tekstil, pakaian jadi, dan kulit sebanyak 31 buah dengan jumlah tenaga kerja 31 orang. Industri kayu dan sejenisnya sebanyak 18 buah dengan jumlah tenaga kerja 24 orang. Industri kertas, percetakan, dan penerbitan berjumlah 4 buah dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 88 orang. Industri barang dari logam berjumlah 3 buah dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 12 orang, dan industri pengolahan lainnya berjumlah 6 buah dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 137 orang. Industri kecil yang tidak ada di Kecamatan Sidoarjo yaitu Industri kimia, minyak, kecuali minyak bumi dan batubara dan Industri barang galian kecuali minyak bumi dan batubara.

Tabel 8 dibawah ini juga menjelaskan mengenai jumlah Industri Kerajinan Rakyat beserta jumlah tenaga kerjanya juga menurut KLUI (Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia)

**Tabel 8. Banyaknya Industri Kerajinan Rakyat dan Jumlah Tenaga Kerja Menurut KLUI Tahun 2011**

No	KLUI	Jumlah Perusahaan/Usaha	Jumlah Tenaga Kerja
1	Industri Makanan dan Minuman	228	287
2	Industri tekstil, pakaian jadi, dan kulit	13	68
3	Industri kayu dan sejenisnya	45	112
4	Industri kertas, percetakan, dan penerbitan	3	36
5	Industri kimia, minyak, kecuali minyak bumi dan batubara	-	-
6	Industri barang galian kecuali minyak bumi dan batubara	-	-

No	KLUI	Jumlah Perusahaan/Usaha	Jumlah Tenaga Kerja
7	Industri Logam dasar	-	-
8	Industri barang dari logam	8	34
9	Industri pengolahan lainnya	39	98
<b>JUMLAH</b>		<b>336</b>	<b>635</b>

Sumber: Kecamatan Sidoarjo dalam Angka 2012

Tabel 8 diatas berdasarkan KLUI (Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia) juga membagi industri menjadi sembilan. Industri rakyat yang ada di Kabupaten Sidoarjo total berjumlah 336 buah dengan tenaga kerja yang berjumlah 635 orang.

Industri tersebut terdiri dari Industri Makanan dan Minuman berjumlah 228 buah dengan jumlah tenaga kerja 287 orang. Kemudian Industri tekstil, pakaian jadi, dan kulit sebanyak 13 buah dengan jumlah tenaga kerja 68 orang. Industri kayu dan sejenisnya sebanyak 45 buah dengan jumlah tenaga kerja 112 orang. Industri kertas, percetakan, dan penerbitan berjumlah 3 buah dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 36 orang. Industri barang dari logam berjumlah 8 buah dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 4 orang, dan industri pengolahan lainnya berjumlah 39 buah dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 98 orang. Industri kecil yang tidak ada di Kecamatan Sidoarjo yaitu Industri kimia, minyak, kecuali minyak bumi dan batubara dan Industri barang galian kecuali minyak bumi dan batubara.





NO	DATA	TRIBUNAN I						TOTAL
		WNI			WNA			
		L	P	JML	L	P	JML	
7	Jumlah Pend. Ber KK	43.255	16.821	60.076			0	60.076
8	Jumlah Pend. Wajib KTP	90.872	80.584	171.456			0	171.456
9	Jumlah Pend. Ber KTP	45.331	22.327	67.658			0	67.658

Sumber: Sidoarjokab.go.id

Tabel 9 diatas menyatakan mengenai data jumlah penduduk di Kecamatan Waru pada tahun 2013. Kecamatan Waru memiliki total jumlah penduduk sebanyak 228.268 jiwa yang dihitung berdasarkan jumlah Warga Negara Indonesia dan Jumlah Warga Negara Asing. Sama halnya dengan Kecamatan Jabon, penduduk Kecamatan Sidoarjo juga dispesifikasikan menurut 9 kriteria, yaitu kelahiran, kematian, pendatang, pindah, jumlah kepala keluarga, jumlah penduduk ber kepala keluarga, jumlah penduduk wajib KTP, dan jumlah penduduk yang memiliki KTP. Tabel 10 berikut menyatakan mengenai luas wilayah desa dengan hitungan hektar, ketinggian wilayah desa dengan satuan meter, dan jarak tempuh desa ke Ibukota Kecamatan pada tahun 2012.

**Tabel 10. Luas Wilayah, Ketinggian dan Jarak dari Desa/Kelurahan ke Ibukota Kecamatan Waru Tahun 2012**

No	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Hektare)	Ketinggian Wilayah (m)	Jarak Tempuh ke Ibukota Kec.
1	Medaeng	143.10		4.00

No	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Hektare)	Ketinggian Wilayah (m)	Jarak Tempuh ke Ibukota Kec.
2	Pepelegi	222.17		4.00
3	Waru	112.46		3.50
4	Kureksari	122.96		3.00
5	Ngingas	200.45		2.50
6	Tropodo	169.68		4.00
7	Tambak Sawah	218.29		4.50
8	Tambak Rejo	393.16		4.50
9	Tambak Oso	483.28		7.00
10	Tambak Sumur	154.70		4.00
11	Wadungasri	112.38		3.50
12	Berbek	138.87		3.00
13	Kepuh Kiriman	115.49		2.50
14	Wedoro	120.71		1.00
15	Janti	82.67		0.00
16	Kedungrejo	92.04		1.30
17	Bungurasih	149.59		3.50
Jumlah		3.032,00		

Sumber: Kecamatan Waru dalam Angka 2013

Tabel diatas menyatakan bahwa Kecamatan Waru memiliki total 17 desa. Desa dengan wilayah terluas yaitu Desa Tambak Oso seluas 483.28hektar, dan desa dengan luas wilayah terkecil yaitu Desa Janti seluas 82.67 hektar. Kemudian, desa dengan jarak tempuh terjauh ke ibukota kecamatan yaitu Desa Tambak Janti. Berikut ini juga merupakan tabel 11 yang menyatakan mengenai banyaknya jumlah industri besar dan sedang serta jumlah tenaga

kerja menurut KLUI (Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia) di Kecamatan Waru pada tahun 2012.

**Tabel 11. Banyaknya Industri Besar/Sedang dan Jumlah Tenaga Kerja Menurut KLUI Tahun 2012**

No	KLUI	Jumlah Perusahaan/Usaha	Jumlah Tenaga Kerja
1	Industri Makanan dan Minuman	9	1.196
2	Industri tekstil, pakaian jadi, dan kulit	-	-
3	Industri kayu dan sejenisnya	3	210
4	Industri kertas, percetakan, dan penerbitan	8	535
5	Industri kimia, minyak, kecuali minyak bumi dan batubara	1	75
6	Industri barang galian kecuali minyak bumi dan batubara	3	160
7	Industri Logam dasar	13	810
8	Industri barang dari logam	7	355
9	Industri pengolahan lainnya	30	2.735
<b>JUMLAH</b>		<b>74</b>	<b>6.076</b>

Sumber: Kecamatan Waru dalam Angka 2013

Tabel 11 di atas berdasarkan KLUI (Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia) membagi industri menjadi sembilan. Industri besar/sedang yang ada di Kabupaten Waru total berjumlah 74 buah dengan tenaga kerja yang berjumlah 6.076 orang. Industri tersebut terdiri dari Industri Makanan dan Minuman berjumlah 9 buah dengan jumlah tenaga kerja 1.196 orang. Kemudian Industri kayu dan sejenisnya sebanyak 3 buah dengan jumlah tenaga kerja 210 orang. Industri kertas, percetakan, dan penerbitan berjumlah

8 buah dengan tenaga kerja 535 orang. Industri kimia, minyak, kecuali minyak bumi dan batubara berjumlah 1 buah dengan 75 tenaga kerja. Industri barang galian kecuali minyak bumi dan batubara berjumlah 3 buah dengan tenaga kerja berjumlah 160 orang. Industri Logam dasar berjumlah 13 buah dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 810 orang. Industri barang dari logam berjumlah 7 buah dengan jumlah tenaga kerja 355 orang. Lalu Industri pengolahan lainnya berjumlah 30 buah dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 2.735 orang. Kemudian pada Tabel 12 dibawah berikut menjelaskan mengenai banyaknya jumlah industri kecil beserta jumlah tenaga kerjanya juga menurut KLUI (Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia) pada tahun 2012 di Kecamatan Waru.

**Tabel 12. Banyaknya Industri Kecil dan Jumlah Tenaga Kerja Menurut KLUI Tahun 2012**

No	KLUI	Jumlah Perusahaan/Usaha	Jumlah Tenaga Kerja
1	Industri Makanan dan Minuman	8	28
2	Industri tekstil, pakaian jadi, dan kulit	-	-
3	Industri kayu dan sejenisnya	-	-
4	Industri kertas, percetakan, dan penerbitan	1	15
5	Industri kimia, minyak, kecuali minyak bumi dan batubara	-	-
6	Industri barang galian kecuali minyak bumi dan batubara	-	-
7	Industri Logam dasar	1	10
8	Industri barang dari logam	-	-

No	KLUI	Jumlah Perusahaan/Usaha	Jumlah Tenaga Kerja
9	Industri pengolahan lainnya	9	89
<b>JUMLAH</b>		<b>19</b>	<b>142</b>

Sumber: Kecamatan Waru dalam Angka 2013

Tabel diatas berdasarkan KLUI (Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia) membagi industri menjadi sembilan. Industri kecil yang ada di Kabupaten Waru total berjumlah 19 buah dengan tenaga kerja yang berjumlah 142 orang. Industri tersebut terdiri dari Industri Makanan dan Minuman berjumlah 8 buah dengan jumlah tenaga kerja 28 orang. Kemudian Industri kertas, percetakan, dan penerbitan yang memiliki 1 buah industri saja dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 15 orang. Kemudian Industri Logam dasar yang juga memiliki 1 buah industri dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 10 orang. Dan industri pengolahan lainnya sebanyak 9 buah dengan tenaga kerja berjumlah 89 orang.

Kemudian pada Tabel 13 dibawah berikut ini menjelaskan mengenai banyaknya jumlah industri kerajinan rakyat beserta jumlah tenaganya juga menurut KLUI (Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia) pada tahun 2012 di Kecamatan Waru.

**Tabel 13. Banyaknya Industri Kerajinan Rakyat dan Jumlah Tenaga Kerja Menurut KLUI Tahun 2012**

No	KLUI	Jumlah Perusahaan/Usaha	Jumlah Tenaga Kerja
1	Industri Makanan dan Minuman	-	-
2	Industri tekstil, pakaian jadi, dan kulit	16	76
3	Industri kayu dan sejenisnya	-	-
4	Industri kertas, percetakan, dan penerbitan	-	-
5	Industri kimia, minyak, kecuali minyak bumi dan batubara	-	-
6	Industri barang galian kecuali minyak bumi dan batubara	-	-
7	Industri Logam dasar	-	-
8	Industri barang dari logam	46	165
9	Industri pengolahan lainnya	186	1.024
<b>JUMLAH</b>		<b>248</b>	<b>1.265</b>

*Sumber: Kecamatan Waru dalam Angka 2013*

Industri rakyat pada tabel 13 diatas memiliki jumlah perusahaan 248 buah dengan jumlah total tenaga kerja sebanyak 1.265 orang. Industri rakyat hanya ada pada industri tekstil, pakaian jadi, dan kulit sebanyak 16 buah dengan tenaga kerja 76 orang, kemudian industri barang dari logam sejumlah 46 buah dengan 165 orang tenaga kerja. Dan industri pengolahan lainnya dengan jumlah perusahaan sebanyak 186 orang dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 1.024 orang tenaga kerja.

## **B. Penyajian Data Fokus Penelitian**

### **1. Peran Bappeda dalam Upaya Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)**

#### **a. Peran Bappeda dalam Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)**

Menurut Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam Pasal 3 disebutkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Kemudian dilanjutkan pada Pasal 4 yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah
- b) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bappeda berdasarkan fungsinya yang pertama dalam perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah, melakukan peranannya dalam perencanaan pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kecamatan dengan

membentuk regulasi yang mengaturnya. Kemudian Bappeda dalam fungsinya yang kedua yaitu melakukan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah dengan melakukan koordinasi seluruh tugas pokok, dan fungsi Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) yang ada di Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo dengan memberikan sosialisasi.

Kemudian fungsi Bappeda yang ketiga yaitu melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, Bappeda melakukan peranannya dalam mengkoordinasikan setiap Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) yang ada di Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi yang telah disosialisasikan sebelumnya, setelah itu Bappeda melakukan peranannya dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja Tim Koordinasi tersebut.

Ketiga fungsi Bappeda diatas bertujuan untuk melaksanakan tugas Bappeda dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Sehingga dalam fungsi Bappeda memiliki peran yang berpengaruh terhadap pembentukan Tim Koordinasi Kecamatan, yaitu perannya sebagai perencana, sebagai koordinator, dan sebagai pengevaluasi. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kepala Sub Bidang Perekonomian, Bapak Ali Muzakki, SE yaitu:

“.....Kabupaten menyerahkan koordinatornya ke Bappeda, tapi tetap memantau yang di kecamatan, kalau gak dipantau kan gak jalan. Ketua-ketua di kecamatan-kecamatan itu nanti kan jadi Tim nya Bappeda. Pihak Bappeda ini merencanakan dan mengevaluasi saja, jadi kalau di



kecamatan langsung diserahkan kepada mereka. Kalau gak di evaluasi nanti percuma saja, gak ada manfaatnya.” (Wawancara dilakukan pada 28 April 2014 pukul 10.00 di Kantor Bappeda Kabupaten Sidoarjo).

Bappeda Kabupaten Sidoarjo memiliki peran sebagaipereencana, sebagai koordinator, dan sebagai pengevaluasi Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJLSP) Kecamatan.Semua pelaksanaan pekerjaan dilakukan sepenuhnya oleh Tim Koordinasi Kecamatan.Dalam hal ini, peran Bappeda sebagai perencana yaitu merencanakan regulasi yang dibentuk untuk Tim Koordinasi, kemudian mempunyai peran dalam mengkoordinasikan seluruh Tim Koordinasi di Kecamatan, dan memiliki peran dalam mengevaluasi kinerja Tim Koordinasi.

**b. Tujuan dan Sasaran Bappeda dalam Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)**

Berdasarkan Latar Belakang Pedoman dan Petunjuk Teknis Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJLSP) di Kabupaten Sidoarjo menyebutkan bahwa:

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas memuat ketentuan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Selanjutnya, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanam modal dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikutnya, terbit Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang memuat asas,

prinsip, program, pelaksanaan, hingga forum pelaksana tanggung jawab sosial perusahaan.

Untuk percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan di Kabupaten Sidoarjo, diperlukan upaya harmonisasi dan sinergi program antara dunia usaha dengan Pemerintah Daerah melalui program kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Di Kabupaten Sidoarjo, Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, atau yang lebih dikenal dengan TJLSP/CSR, telah berjalan. Akan tetapi, pelaksanaan program CSR tersebut dirasa belum optimal dan beberapa program belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, karena program tersebut kurang dibutuhkan oleh mereka. Dalam hal penetapan program TJLSP/CSR, jarang sekali perusahaan melibatkan masyarakat maupun pemerintah daerah untuk duduk bersama dalam merencanakan program CSR yang tepat dan bermanfaat untuk masyarakat.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Sidoarjo yang bekerjasama dengan LPEP Universitas Airlangga (2012) dengan sampel Kecamatan Taman dan Kecamatan Waru menemukan bahwa hubungan maupun komunikasi antara perusahaan dan masyarakat kurang begitu baik. Program TJLSP/CSR perusahaan di kedua kecamatan tersebut juga menunjukkan kurang efektif, karena masih terdapat kesenjangan antara program TJLSP/CSR yang diberikan oleh perusahaan dengan program yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat. Selain itu, kurang terjalannya komunikasi yang baik antara perusahaan dengan pemerintah daerah akan dapat menyebabkan tumpang tindih pembiayaan program untuk masyarakat, sehingga pembiayaan menjadi tidak efisien.

Berdasarkan permasalahan tersebut dan tercantumnya peran Forum PelaksanaTanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP) dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011, Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) di tingkat kecamatan. Tujuan dibentuknya tim tersebut adalah untuk menginventarisir kebutuhan program masyarakat, mempublikasikan program-program yang dibutuhkan tersebut beserta dengan total biayanya, hingga melakukan monitoring dan evaluasi.

Latar Belakang diatas menyebutkan alasan mengenai dibentuknya Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) di tingkat kecamatan, yaitu untuk mengoptimalkan pelaksanaan program CSR (*Corporate Social Responsibility*) di Kabupaten Sidoarjo, karena jarang sekali perusahaan melibatkan masyarakat maupun pemerintah daerah untuk merencanakan program CSR yang tepat dan

bermanfaat bagi masyarakat, sehingga program CSR yang dikeluarkan perusahaan belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Selain itu tujuan utama dibentuknya Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) yang ditempatkan di setiap kecamatan di Kabupaten Sidoarjo adalah untuk melakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan di Kabupaten Sidoarjo. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Sub Bidang Perekonomian Bappeda Kabupaten Sidoarjo Bapak Ali Muzakki, SE yaitu:

“Setiap kecamatan di wilayah Kabupaten Sidoarjo ini kan memiliki banyak perusahaan, jadi untuk mempermudah dan mempercepat pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo, dibentuk yang namanya Tim Koordinasi CSR yang ditempatkan diseluruh kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Hal tersebut membantu Pemerintah untuk mempermudah dan mempercepat pelaksanaan pembangunan di kabupaten Sidoarjo melalui dana dan program CSR yang ada di tiap-tiapkecamatan. Pemerintah menyajikan data kepada perusahaan, pembangunan mana saja yang masuk anggaran pemerintah dan sisanya yang tidak masuk anggaran pemerintah diharapkan perusahaan bisa membantu melalui CSR tersebut, tapi pemerintah tidak boleh mendikte perusahaan, karena itu semua tergantung perusahaan. Itu semua harapan pemerintah.” (Wawancara dilakukan pada 28 April 2014 pukul 10.16 di Kantor Bappeda Kabupaten Sidoarjo).

Dapat dijelaskan bahwa cara yang dilakukan oleh Bappeda dalam melakukan percepatan pembangunan adalah dengan menyajikan data kepada perusahaan berupa pembangunan yang termasuk dalam anggaran pemerintah, yakni APBD (Anggaran Pendapatan Belanja daerah). Kemudian, anggaran pembangunan yang tidak termasuk dalam APBD dapat diserahkan kepada perusahaan melalui CSR (*Corporate Social Responsibility*), tapi tetap saja pengelolaan CSR termasuk dalam wewenang internal perusahaan. Melihat hal

tersebut, wewenang pemerintah hanya pada menyajikan data pembangunan kepada perusahaan, sehingga tindak lanjut yang berikutnya dilakukan merupakan kewenangan perusahaan. Namun harapan pemerintah adalah perusahaan melakukan program CSR yang tidak termasuk dalam APBD, sehingga pembangunan di Kabupaten Sidoarjo berjalan lebih mudah dan lebih cepat.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa tujuan utama dibentuknya Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLLP) di tingkat kecamatan, yaitu untuk percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan di Kabupaten Sidoarjo. Dengan adanya tujuan tersebut, maka sasaran yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

- 1. Melakukan inventarisir kebutuhan program masyarakat dan mempublikasikan program-program yang dibutuhkan tersebut beserta dengan total biayanya**

Setiap koordinator bidang yang terlibat dalam implementasi kegiatan CSR membuat rancangan program kegiatan dan penganggaran dana program CSR. Kemudian menyampaikannya kepada ketua Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan TJLSP. Ketua Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan TJLSP membuat laporan alokasi pembiayaan CSR dan pelaksanaannya kepada masyarakat dan kepada Pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo. Laporan tersebut akan dipublikasikan melalui website.

Format laporan sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

.....\*)

BIDANG:.....\*\*)

PERIODE:.....

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KPI	KEUANGAN	
			APBD (Rp)	CSR (Rp)

Sidoarjo, .....

Mengetahui,  
KETUA TIM

Koordinator Bidang

.....

**Keterangan:**  
 \*) diisi dengan kegiatan yang dilaksanakan  
 \*\*) diisi dengan pelaksanaan kegiatan

**Gambar 8. Format Laporan Pelaksanaan Kegiatan**

*Sumber: Pedoman dan Petunjuk Teknis Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan TJLSP di Kabupaten Sidoarjo*

**2. Melakukan monitoring dan evaluasi**

Tujuan dilakukannya monitoring dan evaluasi adalah sebagai

berikut:

- a. Mengetahui kemajuan dan capaian program
- b. Menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan kebijakan



- c. Mendokumentasikan berbagai kegiatan sebagai bahan untuk menyusun tindakan perbaikan program

Kegiatan monev dilakukan secara partisipatif oleh pengurus Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan TJLSP di Kecamatan se Kabupaten Sidoarjo. Adapun format laporan evaluasi yang harus dilaporkan adalah seperti gambar berikut.

**LAPORAN EVALUASI KEGIATAN**

.....\*)

BIDANG:.....\*\*)

PERIODE:.....

NO	PROGRAM/K EGIATAN	ANGGA- RAN	REALISASI KEUANGAN	PENCAPAIN KINERJA (%)	KETERA- NGAN
1	2	3	4	5	6

Sidoarjo, .....

Mengetahui,  
KETUA TIM

Koordinator Bidang

.....

Keterangan:

\*) diisi dengan kegiatan yang dilaksanakan

\*\*) diisi dengan pelaksanaan kegiatan

**Gambar 9. Format Laporan Evaluasi Kegiatan**

*Sumber: Pedoman dan Petunjuk Teknis Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan TJLSP di Kabupaten Sidoarjo*

**c. Aktor yang Terlibat dalam Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)**

Aktor yang terlibat dalam pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) adalah pemerintah sendiri, dalam hal ini Bappeda. Bappeda membentuk Tim Koordinasi Kecamatan melalui Tim Fasilitasi Program Kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*) Kabupaten Sidoarjo. Tim Fasilitasi Program Kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*) tersebut merupakan sebuah tim yang dibentuk Kabupaten Sidoarjo melalui Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/625/404.1 3. 2/2012. Dalam Keputusan Bupati tersebut dijelaskan bahwa Sekretariat Tetap (SEKTAP) Tim Fasilitasi Program Kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) Kabupaten Sidoarjo menetapkan bahwa Tugas Sekretariat Tetap (SEKTAP) Tim Fasilitasi Program Kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*) Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan pertemuan secara berkala dalam rangka koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi perencanaan pelaksanaan Program Kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) dalam mendukung upaya percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan di Kabupaten Sidoarjo

- b) Menyusun rencana program kegiatan tahunan Tim Fasilitasi program kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) Kabupaten Sidoarjo
- c) Menyampaikan masukan kepada Ketua Tim Fasilitasi program kegiatan CSR Kabupaten Sidoarjo tentang pelaksanaan kegiatan tahunan Tim Fasilitasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) Kabupaten Sidoarjo
- d) Merencanakan implementasi program dan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP)
- e) Membantu pelaksanaan advokasi, sosialisasi dan melakukan monitoring dan mengevaluasi serta merumuskan rekomendasi sebagai masukan perencanaan terhadap pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) kepada segenap Dinas/Instansi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
- f) Merencanakan kegiatan pameran, informasi, dan hasil produk serta Publikasi program kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) dengan pihak terkait
- g) Melaporkan secara berkala hasil kegiatan pelaksanaan Fasilitasi program kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) kepada Ketua Tim Fasilitasi program kegiatan (CSR) Kabupaten Sidoarjo.

Dengan adanya Tim Fasilitasi Program Kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*) Kabupaten Sidoarjo, maka inti tugas pokok yang



dilaksanakan adalah melakukan koordinasi dan integrasi dalam rangka mengelola program CSR perusahaan sebagai upaya perluasan dan percepatan pembangunan. Dengan adanya tugas tersebut, maka Tim Fasilitasi Program Kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*) Kabupaten Sidoarjo membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJLSP) pada tingkat Kecamatan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Ali Muzakki, SE selaku Kepala Sub Bidang Perekonomian Bappeda Kabupaten Sidoarjo yang mengatakan bahwa:

“Tim Fasilitasi sebagai Koordinator CSR tingkat Kabupaten, dan Tim Koordinasi Kecamatan sebagai Koordinator CSR di tingkat kecamatan. Tapi tetap, Tim Fasilitasi memantau kegiatan Tim Koordinasi Kecamatan, soalnya Ketua Tim Koordinasi di setiap kecamatan itu merupakan anggota dari Tim Fasilitasi. Soalnya kalau gak dipantau, Tim Kecamatan gak bakal jalan. Semua kegiatan yang dilaksanakan di kecamatan dijalankan kecamatan, jadi tugas Tim Fasilitasi cuma perencana dan mengevaluasi saja yang bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing.” (Wawancara dilakukan pada 12 Juni 2014 pukul 11.30 di Kantor Bappeda Kabupaten Sidoarjo).

Berdasarkan hal tersebut, Tim Fasilitasi Program Kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*) melakukan tugasnya sebagai pihak perencana dan pengevaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJLSP). Berikut ini merupakan susunan keanggotaan Sekretariat Tetap (SEKTAP) Tim Fasilitasi Program kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) Kabupaten Sidoarjo yang merupakan aktor pembentuk Tim Koordinasi

Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan  
Perusahaan (TJLSP) di Kecamatan Se Kabupaten Sidoarjo

- a) Pengarah : Kepala Bappeda Kabupaten Sidoarjo
- b) Ketua : Kepala Bidang Ekonomi dan SDA pada Bappeda  
Kabupaten Sidoarjo
- c) Sekretaris : Kepala Bidang Statistik dan Pelaporan pada  
Bappeda Kabupaten Sidoarjo
- d) Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bidang Perekonomian dan Bappeda  
Kabupaten Sidoarjo
- e) Anggota : Bidang Kesejahteraan masyarakat, meliputi SKPD:
  - 1) Kepala Bidang pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten  
Sidoarjo
  - 2) Kepala Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan  
Kabupaten Sidoarjo
  - 3) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas pendidikan  
Kabupaten Sidoarjo
  - 4) Kepala Bidang Pengentasan Kemiskinan pada BPMPKB Kabupaten  
Sidoarjo
  - 5) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
pada BPMPKB Kabupaten Sidoarjo
  - 6) Kepala Bidang Pengawasan Dinsosnaker Sidoarjo  
Bidang Pemukiman, Prasarana dan Wilayah, meliputi SKPD:

- 1) Kepala Bidang Penanggulangan Dampak Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo
- 2) Kepala Bidang Pembangunan dan Peningkatan pada Dinas PU Marga Kabupaten Sidoarjo
- 3) Kepala Bidang Pertamanan, Keindahan, dan Pemakaman pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo

Sub. Bidang SDA pada Bappeda, meliputi SKPD:

- 1) Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian, perkebunan, dan peternakan Kabupaten Sidoarjo
- 2) Kepala Bidang Kelembagaan dan Bina Usaha pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM Kabupaten Sidoarjo
- 3) Kepala Bidang Usaha Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo
- 4) Kasubbag Perekonomian pada Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Sidoarjo
- 5) 2 (dua) Orang Staf Bidang Ekonomi pada Bappeda Kabupaten Sidoarjo

Bappeda memberikan kewenangan kepada Tim Fasilitasi Program Kegiatan CSR sebagai aktor pembentuk Tim Koordinasi Kecamatan. Tim Fasilitasi CSR melakukan peranannya sebagai perencana, sebagai koordinator, dan sebagai pengevaluasi Tim Koordinasi Kecamatan. Sehingga Tim Fasilitasi CSR dalam melaksanakan peranan tersebut sesuai dengan menjalankan ketiga fungsi Bappeda dalam perencanaan pembangunan.

#### **d. Mekanisme Prosedur dalam Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)**

Mekanisme prosedur dalam pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kecamatan dimulai pada tahun 2012. Pada tahun 2012, Bappeda Kabupaten Sidoarjo melakukan kajian terhadap kinerja CSR di Kabupaten Sidoarjo. Kemudian berlanjut pada tahun 2013 dengan pembentukan regulasi Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kecamatan. Lalu pada awal tahun 2014 dilakukan penguatan dan optimalisasi Tim Koordinasi tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Ali Muzakki, SE selaku Kepala Sub Bidang Perekonomian Bappeda Kabupaten Sidoarjo yang menyatakan bahwa:

“Tahun 2012 dilakukan kajian mengenai pelaksanaan CSR di Kabupaten Sidoarjo dan selesai pada tahun itu juga, kemudian tahun 2013 dilakukan pembuatan forum CSR dan regulasinya juga dibuat, kemudian tahun 2014 awal kali ini diadakan penguatan dan optimalisasi forum (tim koordinasi) di setiap kecamatan di Kabupaten Sidoarjo.”(Wawancara dilakukan pada 28 April 2014 pukul 09.30 di Kantor Bappeda Kabupaten Sidoarjo).

##### **1) Melakukan Kajian**

Pembentukan tim koordinasi dimulai pada tahun 2012, yaitu Bappeda melakukan kajian, kajian tersebut mengenai pelaksanaan program CSR oleh perusahaan di Kabupaten Sidoarjo. Hal yang dikaji adalah mengenai kinerja CSR di Kabupaten Sidoarjo, apakah telah berjalan dengan baik dan sesuai.

Selain itu Bappeda juga meneliti kajian mengenai komunikasi antara perusahaan dengan masyarakat. Setelah diketahui, banyak perusahaan yang tidak melaksanakan CSR nya dengan baik, selain itu banyak perusahaan yang mengalihkan pendanaan dan program CSR nya keluar wilayah Kabupaten Sidoarjo. Setelah kajian diketahui bahwa komunikasi antara masyarakat dengan perusahaan kurang begitu baik, dikarenakan adanya tumpang tindih mengenai pembangunan yang dibutuhkan masyarakat setempat dengan program CSR yang diberikan oleh perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan Latar Belakang Pedoman dan Petunjuk Teknis Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJLSP) di Kabupaten Sidoarjo yang menyebutkan bahwa:

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Sidoarjo yang bekerjasama dengan LPEP Universitas Airlangga (2012) dengan sampel Kecamatan Taman dan Kecamatan Waru menemukan bahwa hubungan maupun komunikasi antara perusahaan dan masyarakat kurang begitu baik. Program TJLSP/CSR perusahaan di kedua kecamatan tersebut juga menunjukkan kurang efektif, karena masih terdapat kesenjangan antara program TJSLP/CSR yang diberikan oleh perusahaan dengan program yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat. Selain itu, kurang terjalinnya komunikasi yang baik antara perusahaan dengan pemerintah daerah akan dapat menyebabkan tumpang tindih pembiayaan program untuk masyarakat, sehingga pembiayaan menjadi tidak efisien.

Dalam melakukan kajian, diketahui bahwa dalam menjalankan aktifitasnya selalu menghasilkan dampak lingkungan, oleh karena itu CSR dipandang penting dalam menanggapi dampak lingkungan tersebut, selain itu juga untuk membantu pembangunan desa-desa dilingkungan kecamatan mellalui program dan dana dari CSR perusahaan. Hasil lainnya juga menyatakan bahwa masih banyaknya perusahaan yang memberikan dana dan

program CSR nya ke luar daerah Kabupaten Sidoarjo. Juga diketahui bahwa dana dan program CSR yang dilakukan perusahaan di Kabupaten Sidoarjo masih bersifat parsial (terpisah) belum simultan. Sehingga dibentuknya Tim Koordinasi menjadi sebuah hal yang sangat penting. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Ir. Rosida Winayu selaku Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Sidoarjo:

“....Perusahaan itu mesti ada dampak lingkungan, makannya CSR itu sangat penting. Selain itu, CSR juga bisa untuk meng-*up*-kan desa-desa di lingkungan kecamatan Kabupaten Sidoarjo. Di Kabupaten memang sudah ada forum yang menangani CSR, tapi forum di kecamatan itu lebih penting dibentuk. Hal lain juga banyak sekali perusahaan melakukan CSR secara parsial, sehingga diharapkan dengan dibentuknya forum CSR Kecamatan pelaksanaan CSR jadi simultan.”(Wawancara dilakukan pada 12 Oktober 2013 pada pukul 10.15 WIB di Kantor Bappeda Kabupaten Sidoarjo)

## 2) Pembentukan Regulasi

Setelah dilakukan kajian pada tahun 2012, maka pada tahun 2013 Bappeda Kabupaten Sidoarjo melakukan pembentukan beberapa regulasi mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJLSP), diantaranya yaitu dibentuknya:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Wilayah Kabupaten Sidoarjo, dengan maksud dan tujuannya sesuai dengan Pasal 2 untuk (1) memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta menyiapkan diri untuk memenuhi standar Internasional

terkait dengan pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; dan (2) memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program tanggungjawab sosial perusahaan di Sidoarjo.

- b. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dengan maksud dan tujuannya sesuai dengan Pasal 2 yaitu sebagai Petunjuk pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Sidoarjo.

Berikut ini merupakan suasana rapat sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Wilayah Kabupaten Sidoarjo dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.



**Gambar 10. RAPAT: Suasana sosialisasi Perda nomor 2 tahun 2013 dan Perbup nomor 40 tahun 2013 tentang CSR di kantor Bappeda**

*Sumber: www.sidoarjonews.com*

- c. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/1137/404.1.3.2/2013 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJLSP) di Kecamatan Se Kabupaten Sidoarjo. Keputusan ini mengatur mengenai tugas dan fungsi Tim Koordinasi serta Susunan Anggota Tim Koordinasi di tiap kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Berikut adalah pernyataan dari Ir. Rosida Winayu selaku Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Sidoarjo:

“Forum CSR sudah berjalan meskipun belum ada SK nya. Kita sudah membentuk SK nya, sekarang SK lagi kita serahkan ke Kabupaten sedang digodok terlebih dahulu tinggal ditandatangani Pak Bupati, apabila sudah disetujui kita sudah punya regulasi yang jelas. Disitu sudah ada susunan organisasinya mbak. Jadi Forum CSR ini sudah jalan meskipun belum ada SK nya.” (Wawancara dilakukan pada 12 Oktober 2013 pada pukul 10.30 WIB di Kantor Bappeda Kabupaten Sidoarjo)

Pernyataan diatas menyatakan bahwa Bappeda telah memberikan sosialisasi pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Sidoarjo



mengenai Tim Koordinasi tersebut, sehingga setiap Tim Koordinasi sudah bisa berjalan sesuai dengan yang disosialisasikan meskipun regulasi belum disetujui oleh Pihak Kabupaten. Dalam regulasi yang dibentuk oleh Bappeda tersebut, disertai mengenai Pedoman dan Petunjuk Teknis Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan TJSLP (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan) di Kabupaten Sidoarjo yang memiliki ruang lingkup sebagai berikut:

**a) Tugas Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJLSP)**

Tugas Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan TJLSP di Kecamatan berdasarkan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/1137/404.1.3.2/2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan TJLSP atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kecamatan se Kabupaten Sidoarjo adalah:

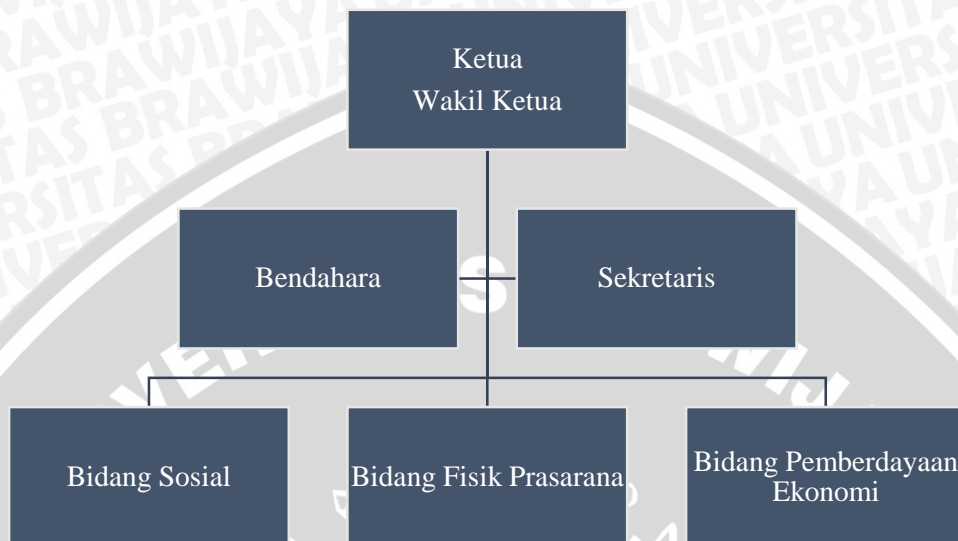
- 1) Melakukan pertemuan secara berkala dalam rangka koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi perencanaan pelaksanaan Program Kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJLSP) dalam mendukung upaya percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan di Kecamatan Se Kabupaten Sidoarjo.
- 2) Menyusun rencana program kegiatan tahunan Tim koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan TJLSP Perusahaan di Kecamatan se Kabupaten Sidoarjo.

- 3) Melaksanakan program kegiatan tahunan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan TJLSP Perusahaan di Kecamatan se Kabupaten Sidoarjo.
- 4) Menyampaikan masukan kepada Ketua Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan TJLSP Kabupaten Sidoarjo tentang pelaksanaan program kegiatan tahunan Tim koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan TJLSP di Kecamatan se Kabupaten Sidoarjo.
- 5) Melakukan monitoring dan evaluasi yang hasilnya akan digunakan sebagai bahan laporan kepada segenap perusahaan di Kecamatan Se Kabupaten Sidoarjo dalam rangka menyusun perencanaan lebih lanjut.
- 6) Merencanakan kegiatan pameran, informasi, dan hasil produk serta publikasi Kegiatan CSR oleh Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan TJLSP di Kecamatan Se Kabupaten Sidoarjo dengan pihak terkait.
- 7) Melaporkan secara berkala kegiatan pelaksanaan program kegiatan CSR oleh Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan TJLSP di Kecamatan Se Kabupaten Sidoarjo kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.

#### **b) Struktur Organisasi**

Susunan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan TJLSP di kecamatan terdiri dari lima komponen, yakni ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris, dan terdapat tiga bidang. Bidang-bidang tersebut terdiri dari bidang sosial, fisik prasarana, dan pemberdayaan ekonomi. Bidang-bidang tersebut

diketahui oleh seorang koordinator bidang. Berikut ini adalah struktur organisasinya.



**Gambar 11. Struktur Organisasi Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan TJLSP**

Sumber: Pedoman dan Petunjuk Teknis Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan TJLSP di Kabupaten Sidoarjo

**c) Tugas Pokok dan Fungsi**

Dalam rangka optimalisasi Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan TJLSP, maka diperlukan tugas pokok dan mekanisme kerja yang jelas. Agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi. Tugas pokok masing-masing komponen Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan TJLSP di Kecamatan disesuaikan dengan *macro process* skema pelaksanaan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan TJLSP. Tugas masing-masing komponen tersebut adalah:

**Tabel 14. Tugas Pokok dan Fungsi Posisi Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan TJLSP**

Posisi	Tugas
--------	-------

**Ketua dan  
Wakil Ketua**

- a. Memimpin pertemuan secara berkala dalam rangka koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi perencanaan pelaksanaan program kegiatan CSR
- b. Memimpin rapat penyusunan rencana program kegiatan tahunan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan TJLSP
- c. Memimpin rapat penentuan prioritas program tingkat kecamatan
  - a) Inventarisasi program/kegiatan hasil musrenbang kecamatan yang tidak terakomodasi dalam APBD
  - b) Menyusun prioritas program/kegiatan kecamatan, baik yang belum terakomodir penuh oleh APBD maupun hasil musrenbang kecamatan yang tidak terakomodir dalam APBD
  - c) Menyusun *Key Performance Indicator* (KPI) untuk setiap program/kegiatan yang menjadi prioritas
  - d) Menghitung potensi CSR pada tahun bersangkutan
  - e) Menyusun daftar isian program/kegiatan, *Key Performance Indicator* (KPI), dan kebutuhan anggaran,
- d. Memimpin rapat pengesahan program/kegiatan tahun terkait
  1. Sumber dari hasil inventarisasi yang dilakukan koordinator bidang
  2. Penandatanganan komitmen dan perusahaan yang bersedia
  3. Menyusun rekapitulasi program/kegiatan, keuangan, dan *Key Performance Indicator* (KPI)
  4. Menyusun *action plan* setiap program/kegiatan
- e. Melaporkan secara berkala hasil kegiatan pelaksanaan program kegiatan CSR oleh Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan TJLSP di Kecamatan kepada Ketua Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan TJLSP Kabupaten Sidoarjo

<b>Sekretaris</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengagendakan rapat</li> <li>2. Menyusun notulensi rapat dan mengumpulkan risalah rapat</li> <li>3. Korespondensi dalam dan luar</li> <li>4. <i>Filing</i> dokumen</li> <li>5. <i>Upload</i> daftar isian program/kegiatan</li> <li>6. <i>Upload</i> rekapitulasi program</li> <li>7. Mengkompilasi pelaporan dari korbid</li> <li>8. Diseminasi hasil kegiatan/program</li> </ol>
<b>Bendahara</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak mengelola keuangan</li> <li>2. Menghitung CSR di tahun tersebut</li> <li>3. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan</li> </ol>
<b>Koordinator Bidang (Korbid)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inventarisasi program/kegiatan hasil musrenbangcam yang tidak terakomodasi dalam APBD</li> <li>2. Menyusun prioritas program/kegiatan kecamatan, baik yang belum terakomodir penuh oleh APBD maupun hasil musrenbangcam yang tidak terakomodir dalam APBD</li> <li>3. Menyusun KPI untuk setiap program/kegiatan yang menjadi prioritas</li> <li>4. Menyusun rencana program kegiatan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan TJLSP dan menyampaikannya kepada Ketua Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan TJLSP</li> <li>5. Inventarisasi dan validasi usulan komitmen/partisipasi perusahaan pada program/kegiatan</li> <li>6. Menyusun <i>action plan</i> per kegiatan/program</li> <li>7. Merencanakan kegiatan pameran, informasi, dan hasil produk</li> <li>8. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.</li> </ol>

Sumber: Pedoman dan Petunjuk Teknis Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan TJLSP di Kabupaten Sidoarjo

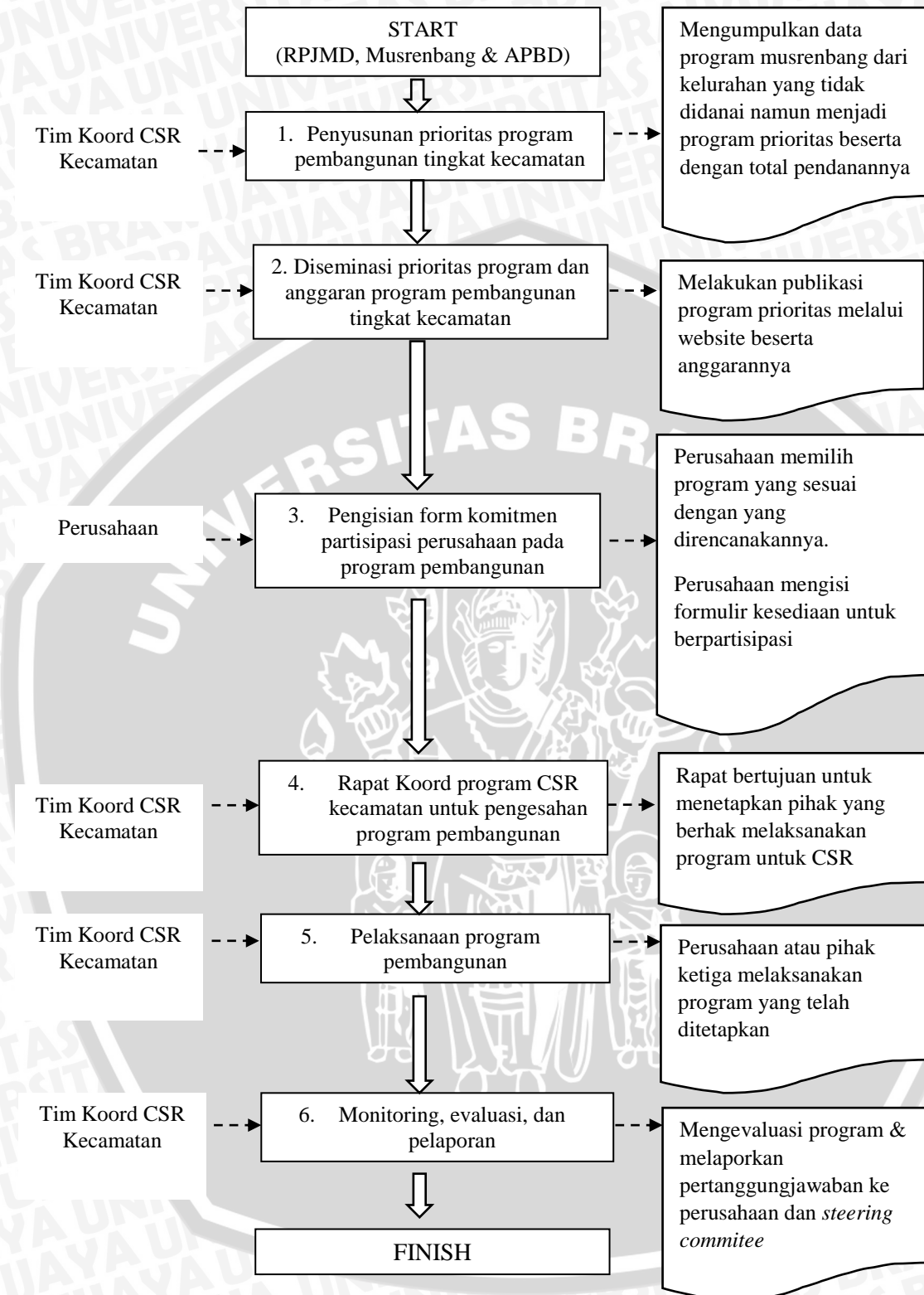
**d) Mekanisme (*Macro Process*) Program Pembangunan Inklusif dan Partisipatif Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJLSP)**

Mekanisme program pembangunan inklusif dan partisipatif Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJLSP) menjelaskan mengenai proses kerja Tim Koordinasi yang dimulai dari:

- (1) Musrembang yang dilakukan oleh Kecamatan
- (2) Penyusunan prioritas program pembangunan tingkat kecamatan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Kecamatan masing-masing.
- (3) Adanya diseminasi prioritas program dan anggaran program pembangunan tingkat kecamatan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Kecamatan masing-masing.
- (4) Lalu dilakukan pengisian form komitmen partisipasi perusahaan pada program pembangunan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Kecamatan masing-masing.
- (5) Lalu diadakan rapat koordinasi program CSR kecamatan untuk pengesahan program pembangunan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Kecamatan masing-masing.
- (6) Setelah diadakan rapat, kemudian dilaksanakan program pembangunan yang telah didiskusikan melalui rapat oleh Tim Koordinasi Kecamatan masing-masing.

(7) Yang terakhir dilakukannya monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan oleh Tim Koordinasi Kecamatan masing-masing.





**Gambar 12. Mekanisme Pembangunan program pembangunan inklusif dan partisipatif Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJLSP)**

Sumber: Pedoman dan Petunjuk Teknis Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan TJLSP di Kabupaten Sidoarjo



### 3) Penguatan dan Optimalisasi

Pada tahun 2014 setelah forum dan regulasi dibentuk, Bappeda melakukan penguatan dan optimalisasi terhadap seluruh tim koordinasi di tiap kecamatan se Kabupaten Sidoarjo. Penguatan dan optimalisasi yang dilakukan oleh Bappeda dinyatakan oleh Bapak Ali Muzakki, SE selaku Kepala Sub Bidang Perekonomian Bappeda Kabupaten Sidoarjo, yaitu:

“Bappeda kan sudah memberikan sosialisasi kepada kecamatan-kecamatan sebelumnya, nah setelah setahun diberikan sosialisasi seharusnya sudah bisa berjalan, kita kan mengevaluasi juga kinerja mereka setelah setahun, nah apabila belum bisa berjalan, maka kita beri penguatan kepada perusahaan-perusahaan untuk dikumpulkan menjadi satu untuk dapat saling berinteraksi dan berkoordinasi. Rencana kita juga mau memberikan dana sama lembaganya, soalnya selama ini kita punya dana buat kecamatan ya untuk rapat saja, bukan buat lembaganya.”(Wawancara dilakukan pada 28 April 2014 pukul 10.45 di Kantor Bappeda Kabupaten Sidoarjo).

Bappeda telah memberikan sosialisasi sebelumnya kepada setiap Tim Koordinasi di masing-masing kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, sehingga Bappeda dapat melakukan evaluasi kinerja setiap Tim Koordinasi tersebut setahun kemudian setelah diberikannya sosialisasi. Bappeda memberikan penguatan dan optimalisasi melalui memberikan penguatan kepada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Sidoarjo untuk dapat lebih berinteraksi dan berkoordinasi dengan Tim Koordinasi, selain itu Bappeda akan memberikan dana kepada Tim Koordinasi, dikarenakan selama tahun 2013 lalu Bappeda hanya memberikan dana hanya untuk rapat saja.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan

pembangunan daerah dan mempunyai berbagai macam fungsi dalam melaksanakan tugasnya. Dalam melaksanakan salah satu fungsi tersebut, Bappeda melaksanakan peran sebagai perencana, sebagai koordinator, dan sebagai pengevaluasi dari Tim Koordinasi Kecamatan. Selain itu tujuan utama dibentuknya Tim Koordinasi yaitu untuk percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan di Kabupaten Sidoarjo yang mempunyai sasaran tersendiri dalam mencapai tujuan tersebut. Tim Fasilitasi sebagai aktor pembentuk Tim Koordinasi kecamatan memiliki tugas pokok dan susunan keanggotaan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188 tahun 2012. Selain itu, terdapat mekanisme prosedur yang dilakukan dalam pembentukan Tim Koordinasi tersebut, pertama melakukan kajian, kedua melakukan pembentukan regulasi, dan ketiga melakukan penguatan dan optimalisasi terhadap Tim Koordinasi Kecamatan.

## **2. Koordinasi Antar Bappeda dengan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)**

### **a) Koordinasi dengan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kecamatan Waru**

#### **1) Susunan Anggota**

Susunan anggota dalam semua Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dibentuk

berdasarkan Keputusan Bupati No 188 Tahun 2013, salah satunya Tim Koordinasi Kecamatan Waru padatable 15 berikut ini.

**Tabel 15. Susunan Anggota Tim Koordinasi Kecamatan Waru**

No	Jabatan Dalam Tim	Instansi, Nama, Keterangan
1	2	3
1	Pembina	Camat Waru
2	Ketua	Ponco Agung W. (PT. Mega Surya Mas)
3	Wakil Ketua	Siti Maisyaroh (PT. Varia Usaha Beton)
4	Sekretaris:	
	a. Sekretaris I	Rudi P. (PT. Hanil JS)
	b. Sekretaris II	Sekretaris Kecamatan Waru
5	Bendahara	Lusi Kurniawati (PT. Sinar Abadi)
6	Koordinator:	
	a. Bidang Sosial	Candra (PT. Graha Damai Putra)
	b. Bidang Fisik Prasarana	H. Khujairi (PT. Gudang Garam)
	c. Bidang Pemberdayaan Ekonomi	Selamet (PT. Surabaya Perdana Rotapack)
7	Anggota:	
	a. Bidang Sosial	Miftakhul (Tokoh Masyarakat)
	b. Bidang Fisik Prasarana	H. M. Ghufon, SH (Tokoh Masyarakat)
	c. Bidang Pemberdayaan Ekonomi	Mimik Lestari (Tokoh Masyarakat)

*Sumber: Bappeda Kabupaten Sidoarjo, Lampiran Keputusan Bupati Nomor 118/1137/404.1.3.2/2013*

Susunan anggota tim koordinasi Kecamatan Waru diatas dibentuk oleh Bappeda melalui Keputusan Bupati Kabupaten Sidoarjo nomor 118 tahun 2013. Dalam susunan anggota tersebut terdiri dari pemerintah yang memiliki jabatan

sebagai sekretaris II, kemudian ada tokoh masyarakat sebagai anggota bidang, dan anggota penting lain yang didominasi oleh perwakilan perusahaan-perusahaan di Kabupaten Sidoarjo. Masing-masing pemangku kepentingan memiliki reaksi berbeda dengan dibentuknya Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP). Berikut pernyataan dari Bapak Iswadi selaku Sekretaris Kecamatan Waru dan sebagai Sekretaris II Tim Koordinasi:

“Kecamatan menanggapi dengan baik adanya tim koordinasi, karena beranggapan tim tersebut dapat menghimpun program CSR dari setiap perusahaan untuk membantu pembangunan di kecamatan yang tidak tercover APBD. Masyarakat sebenarnya tahu tentang program CSR, tapi pembangunan mana yang dibantu CSR atau pembangunan mana yang dibantu pemerintah masyarakat tidak tahu, bagi masyarakat yang penting itu bermanfaat dan tidak mengganggu bagi mereka dianggap baik, tapi perusahaan banyak yang gak datang waktu sosialisasi, ketuanya aja gak datang waktu sosialisasi.”(Wawancara dilakukan pada 14 Mei 2014 pukul 09.15 di Kantor Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo).

Tanggapan dan reaksi yang diberikan oleh setiap pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan adanya Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) berbeda satu sama lain, pemerintah kecamatan menanggapi dengan baik dan antusias dengan dibentuknya Tim Koordinasi tersebut dikarenakan dapat membantu pembangunan di kecamatan, masyarakat menanggapinya secara biasa, karena pengetahuan masyarakat mengenai TJSLP/CSR masih kurang, namun apabila terdapat pembangunan yang membantu bagi masyarakat itu sendiri maka masyarakat menanggapi dengan baik. Berbeda lagi dengan reaksi dari perusahaan, pihak swasta kurang antusias, terbukti dengan sedikitnya anggota dari perusahaan yang

datang saat sosialisasi oleh dilaksanakan Bappeda mengenai Tim Koordinasi tersebut.

## 2) Koordinasi dan Integrasi antar Anggota

Koordinasi dan integrasi antar anggota dalam Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kecamatan Waru tidak berjalan dengan baik, salah satunya dikarenakan kurang adanya koordinasi dan integrasi, hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Sekretaris Kecamatan Waru yang juga menjabat Sebagai Sekretaris II Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kecamatan Waru:

“Dengan adanya tupoksi yang telah dibentuk oleh Bappeda Kabupaten Sidoarjo, Tim Koordinasi di Kecamatan Waru tidak menjalankan kinerjanya sesuai dengan tupoksi, karena sampai saat ini jarang sekali ada rapat dan koordinasi diantara tim koordinasi kecamatan Waru. Selain itu, selaku sekretaris II dan selaku pemerintah dalam stakeholder, tidak pernah diberikan laporan oleh perusahaan-perusahaan yang bersangkutan sehingga tidak dapat mengetahui perkembangan pembangunan yang sedang terjadi. Bisa dibilang semua *stakeholder* tidak berjalan sesuai dengan fungsinya.”(Wawancara dilakukan pada 14 Mei 2014 pukul 09.35 di Kantor Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo).

Selain itu, karena tidak adanya koordinasi dan integrasi yang baik dalam kinerja Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kecamatan Waru, hal tersebut menyebabkan tugas pokok dan fungsi yang dibentuk oleh Bappeda serta tanggung jawab yang diberikan pada *stakeholders* tidak berjalan dengan baik, sehingga salah satu dampaknya yaitu menyebabkan tujuan Tim Koordinasi tidak dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

### 3) Koordinasi dengan Bappeda

Koordinasi yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kecamatan Waru berikut ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Iswadi selaku Sekretaris Kecamatan Waru yang juga menjabat Sebagai Sekretaris II Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kecamatan Waru:

“Kecamatan memang gak pegang dana CSR perusahaan, mereka yang mengelola dana CSR mereka sendiri dan mereka langsung melakukannya di lapangan. Lha dari kegiatannya yang dilakukan di lapangan itu mereka laporkan ke kita seharusnya, jadi kita tahu perusahaan ini sekian juta digunakan untuk pembangunan ini, lha itu sudah di *cover* oleh Bappeda. Rata-rata perusahaan-perusahaan ini langsung lapor ke Bappeda, jadi ga pake lapor ke Tim Koordinasi, meskipun sudah disosialisasikan oleh Bappeda.”(Wawancara dilakukan pada 14 Mei 2014 pukul 10.10 di Kantor Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo).

Pelaporan kegiatan TJSLP/CSR yang telah dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan di Kecamatan Waru langsung dilaporkan kepada Bappeda Kabupaten Sidoarjo, sehingga Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kecamatan Waru tidak memiliki laporan kegiatan dan tugas-tugas lain yang harusnya dilaksanakan. Jadi, Tim Koordinasi Kecamatan Waru tidak mengetahui kegiatan pembangunan apa saja melalui program TJSLP/CSR yang telah dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan di Kecamatan Waru. Oleh karena itu, bisa dikatakan hubungan antara Tim Koordinasi dengan Bappeda Kabupaten Sidoarjo tidak memiliki koordinasi yang cukup baik.

#### 4) Hasil Kinerja

Dikarenakan belum adanya koordinasi dan integrasi diantara anggota Tim Koordinasi, maka kinerja Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kecamatan Waru dirasa masih belum maksimal, hal tersebut dikarenakan setiap anggota dalam Tim Koordinasi (*stakeholders*) tidak melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya, yang kemudian berakibat pada tidak tercapainya tujuan Tim Koordinasi yang sebenarnya, yaitu pembangunan tidak dapat diketahui laporannya secara signifikan oleh Tim Koordinasi. Pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan dari Sekretaris Kecamatan Waru yang juga menjabat Sebagai Sekretaris II Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kecamatan Waru:

“Karena terhambat oleh koordinasi dan integrasi yang kurang dalam tim koordinasi ini, sehingga pemerintah kecamatan selaku sekretaris II tidak dapat mengetahui pembangunan apa saja yang direncanakan oleh tim koordinasi ini karena tidak adanya laporan yang diserahkan. Tapi sebelum ada Tim Koordinasi pun perusahaan sudah melakukan CSRnya, sayangnya pihak pemerintah gak tau dimana saja perusahaan melakukan Program CSRnya.” (Wawancara dilakukan pada 14 Mei 2014 pukul 10.30 di Kantor Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo).

Hal tersebut menyebabkan hasil kinerja Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kecamatan Waru belum terlihat dan belum ada perkembangan yang signifikan. Namun selain itu, sebelum terbentuk Tim Koordinasi ini, perusahaan-perusahaan di Kecamatan Waru sudah melaksanakan TJSLP/CSR dalam berbagai bentuk.

**b) Koordinasi dengan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kecamatan Sidoarjo**

**1) Susunan Anggota**

Susunan anggota dalam semua Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati No 188 Tahun 2013, salah satunya Tim Koordinasi Kecamatan Sidoarjo pada tabel 16 berikut ini.

**Tabel 16. Susunan Anggota Tim Koordinasi Kecamatan Sidoarjo**

No	Jabatan Dalam Tim	Instansi, Nama, Keterangan
1	2	3
1	Pembina	Camat Sidoarjo
2	Ketua	Drs. EC. Mohammad Imbran, SH (PT. Suprama)
3	Wakil Ketua	Umi Salamah (The Sun Hotel Sidoarjo)
4	Sekretaris:	
	a. Sekretaris I	Liharwati (PT. Yana Prima Hasta Persada)
	b. Sekretaris II	Sekretaris Kecamatan Sidoarjo
5	Bendahara	Wahyu Tri Lestari (Sekawan Cosmetic)
6	Koordinator:	
	a. Bidang Sosial	M. Fahmi (Softex Indonesia)
	b. Bidang Fisik Prasarana	Happi (PT. Mac Donald)
	c. Bidang Pemberdayaan Ekonomi	Tri Udjiarti (Pimpinan Cabang Bank Jatim Sidoarjo)



7	Anggota: a. Bidang Sosial b. Bidang Fisik Prasarana c. Bidang Pemberdayaan Ekonomi	Toha (Delta Sinar Mayang Hotel) Slamet (PT. Mac Donald)  Andy CH (Tokoh Masyarakat)
---	--	--

*Sumber: Bappeda Kabupaten Sidoarjo, Lampiran Keputusan Bupati Nomor 118/1137/404.1.3.2/2013*

Susunan anggota Tim Koordinasi Kecamatan Sidoarjo juga dibentuk oleh Bappeda melalui Keputusan Bupati Kabupaten Sidoarjo nomor 118 tahun 2013. Dalam susunan anggota tersebut terdiri dari pemerintah yang memiliki jabatan sebagai sekretaris II, kemudian ada tokoh masyarakat sebagai anggota bidang, dan anggota penting lain yang didominasi oleh perwakilan perusahaan-perusahaan di Kabupaten Sidoarjo. Masing-masing pemangku kepentingan memiliki reaksi berbeda dengan dibentuknya Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP). Berikut pernyataan dari Bapak Suyud Supriadi, SP.MM selaku Kepala Seksi Pembangunan Fisik Kecamatan Sidoarjo dan Anggota Pelaksana Tim Koordinasi Kecamatan Sidoarjo:

“Kecamatan jelas menerima dengan baik karena dengan terbentuknya Tim Koordinasi ini sudah pasti diperuntukkan bagi masyarakat, selain itu juga sudah diberi SK oleh Bappeda, tapi saat sosialisasi kecamatan tidak hadir soalnya ada tugas lainnya, jadi awal tahun 2014, tepatnya 22 Maret lalu pihak kecamatan mengadakan acara Gebyar BKM yang anggotanya terdiri dari 24 Desa. Inti dari acaranya untuk menampilkan hasil-hasil produk unggulan BKM dari 24 Desa di Kecamatan Sidoarjo, dalam acara tersebut pihak kecamatan juga berkesempatan mengundang pihak dari swasta, yaitu Ketua dan Wakil Ketua Tim Koordinasi Kecamatan Sidoarjo. Kalo perusahaan saat itu sangat mendukung dan tanggapannya bagus dengan terbentuknya tim koordinasi ini. Masyarakat belum banyak mengetahui tentang tim

koordinasi ini, tapi masyarakat sudah banyak yang tahu apa itu CSR.”(Wawancara dilakukan pada 16 Mei 2014 pukul 09.45 di Kantor Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo).

Pihak Kecamatan Sidoarjo dengan jelas memberikan tanggapan dan reaksi baik mengenai terbentuknya Tim Koordinasi tersebut, karena mereka beranggapan bahwa dengan adanya Tim Koordinasi tersebut maka dapat membantu mempercepat pembangunan masyarakat, selain itu Tim Koordinasi tersebut juga sudah diperkuat karena telah didukung oleh Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang kemudian dilanjutkan dengan dibentuknya Keputusan Bupati. Hanya saja saat sosialisasi di Kecamatan, pihak Kecamatan tidak ada yang mewakili untuk hadir, sehingga pihak kecamatan tidak mengetahui bagaimana jalannya sosialisasi pada saat itu. Oleh karena itu, kecamatan mengundang pihak perusahaan untuk dapat hadir dalam acara Gebyar BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat).

Dengan hadirnya pihak perusahaan, yaitu Ketua dan Wakil Tim Koordinasi pada acara Gebyar BKM yang diselenggarakan oleh pihak Kecamatan Sidoarjo, pihak perusahaan baru saja diberikan penjelasan oleh pihak kecamatan pada saat itu dan menanggapi dengan reaksi yang baik. Hanya saja pihak masyarakat memang belum mengetahui tentang terbentuknya Tim Koordinasi tersebut, namun masyarakat sudah banyak yang mengetahui mengenai program TJSLP/CSR yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan untuk dapat membantu masyarakat sekitar. Tanggapan tersebut sama dengan tanggapan yang diberikan oleh masyarakat di Kecamatan Waru.

## 2) Koordinasi dan Integrasi antar Anggota

Koordinasi dan integrasi antar anggota dalam Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kecamatan Sidoarjo bisa dikatakan hampir sama dengan Tim Koordinasi Kecamatan Waru, yaitu setiap anggota masih belum berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Tugas pokok dan fungsi yang telah dibentuk oleh Bappeda belum dapat dijalankan dengan maksimal. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Bapak SuyudSupriadi, SP.MM Kepala Seksi Pembangunan Fisik Kecamatan Sidoarjo sekaligus Anggota Pelaksana Tim Koordinasi Tim Koordinasi Kecamatan Sidoarjo:

“Bisa dibilang dari semua *stakeholder* yang termasuk anggota Tim Koordinasi Kecamatan Sidoarjo belum berjalan sesuai dengan fungsinya, karena belum adanya koordinasi dan integrasi yang baik antar sesama anggota di Tim Koordinasi. Soalnya perencanaannya belum matang. Nah, tupoksi yang telah dibentuk Bappeda, Tim Koordinasi di Kecamatan Sidoarjo belum bisa menjalankan kinerja sesuai dengan tupoksi, karena hingga saat ini belum diadakan rapat dan koordinasi diantara tim koordinasi kecamatan Sidoarjo tersebut, jadi fungsi dan tugasnya belum terlaksana dan belum berjalan dengan baik. Sehingga rencana kedepan yang mungkin akan dilakukan adalah mengadakan rapat dan pertemuan yang membicarakan tentang berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, biar punya program yang jelas. Tapi banyak perusahaan di Kecamatan Sidoarjo dirasa sudah memberikan program CSR nya sendiri tanpa dikoordinasikan dengan pihak kecamatan.”(Wawancara dilakukan pada 16 Mei 2014 pukul 10.25 di Kantor Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo).

Dikarenakan setiap anggota dalam Tim Koordinasi belum menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik maka sama sekali belum diadakan rapat dan integrasi antar sesama anggota dalam Tim Koordinasi. Hal tersebut membuat pihak kecamatan selaku pemegang jabatan sebagai Sekretaris II untuk

mengadakan rapat dan pertemuan yang membicarakan mengenai berbagai program dan kegiatan yang seharusnya dapat segera dilaksanakan.

Namun, sebelum dibentuknya Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) tersebut, perusahaan-perusahaan di Kabupaten Sidoarjo sudah melaksanakan program TJSLP/CSR untuk masyarakat Kecamatan Sidoarjo. Hanya saja dengan adanya Tim Koordinasi ini, kegiatan dan program TJSLP/CSR nantinya dapat berjalan secara simultan.

Selain itu, pada saat Bappeda melaksanakan sosialisasi di Kecamatan Sidoarjo, pihak kecamatan tidak dapat hadir, sehingga belum mengetahui secara jelas dan terperinci kinerja Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP), oleh karena itu pihak kecamatan mengundang Ketua dan Wakil Ketua Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) untuk dapat hadir pada acara yang diselenggarakan oleh Kecamatan, yaitu Gebyar BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) yang anggotanya terdiri dari 24 Desa di seluruh Kecamatan Sidoarjo, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak SuyudSupriadi, SP.MM selaku Kepala Seksi Pembangunan Fisik Kecamatan Sidoarjo sekaligus Anggota Pelaksana Tim Koordinasi Kecamatan Sidoarjo:

“.....pada saat sosialisasi kecamatan tidak hadir, jadi awal tahun 2014, tepatnya 22 Maret lalu pihak kecamatan mengadakan acara Gebyar BKM yang anggotanya terdiri dari 24 Desa. Inti dari acara tersebut untuk menampilkan hasil-hasil produk unggulan BKM dari 24 Desa di Kecamatan Sidoarjo, dalam acara tersebut pihak kecamatan memang

sengaja mengundang pihak swasta dalam rangka mendukung acara Gebyar BKM, pihak swasta yang diundang yaitu Ketua dan Wakil Ketua Tim Koordinasi Kecamatan Sidoarjo.”(Wawancara dilakukan pada 16 Mei 2014 pukul 09.45 di Kantor Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo).

Dengan adanya acara yang dibentuk oleh Kecamatan, untuk sekaligus dapat mengundang Ketua dan Wakil Ketua Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP), maka pihak perusahaan yang memegang peranan penting dalam Tim Koordinasi diminta untuk dapat berpartisipasi dalam menjalankan Tim Koordinasi, sehingga nantinya dapat mencapai tujuan bersama.

### 3) Koordinasi dengan Bappeda

Koordinasi yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kecamatan Sidoarjo berikut ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Bapak SuyudSupriadji, SP.MM sebagai Kepala Seksi Pembangunan Fisik Kecamatan Sidoarjo sekaligus Anggota Pelaksana Tim Koordinasi Tim Koordinasi Kecamatan Sidoarjo:

“...perencanaan dalam tim koordinasi ini memang belum matang, sehingga perlu ada dorongan terutama dari *leadernya*. Camat sebagai pihak fasilitasi dan pengendali, lha kecamatan bisa mengundang kalau ada pertemuan, meskipun tidak jalan. Sayangnya belum terlaksana, jadi belum bisa diketahui program pembangunan apa aja yang dari CSR karena belum ada laporannya, baik itu laporan perencanaan, laporan keuangan, laporan pelaksanaan, ataupun manfaat yang diterima masyarakat. Lha karena belum ada laporan sama sekali yang dijalankan sama Tim Koordinasi, jadi belum ada koordinasi sama sekali dengan Bappeda.” (Wawancara dilakukan pada 16 Mei 2014 pukul 09.55 di Kantor Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo).

Hal diatas menyatakan bahwa Tim Koordinasi Kecamatan Sidoarjo memang belum matang dan belum berjalan sesuai dengan fungsinya, pihak yang

disebut *leader* dalam Tim Koordinasi Kecamatan Sidoarjo belum melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawabnya, pihak kecamatan juga belum bisa berjalan sebagai pihak yang memberikan fasilitasi dan belum berjalan tugasnya sebagai pengendali Tim Koordinasi. Sehingga hal tersebut berimbas pada hasil kinerja Tim Koordinasi Kecamatan Sidoarjo yang belum dapat diketahui karena belum ada laporan yang diterima, oleh karena itu koordinasi yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Kecamatan Sidoarjo dengan Bappeda tidak berjalan dengan sesuai.

#### 4) Hasil Kinerja

Integrasi dan koordinasi diantara anggota Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kecamatan Sidoarjo memang kurang optimal dikarenakan tugas dan fungsinya belum dapat berjalan sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing, sehingga tidak dapat terlaksana dengan maksimal. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak SuyudSupriadi, SP.MMKepala Seksi Pembangunan FisikKecamatan Sidoarjo sekaligus Anggota Pelaksana Tim Koordinasi Tim Koordinasi Kecamatan Sidoarjo:

“Karena terhambat koordinasi dan integrasi yang kurang juga kurangnya komunikasi dalam tim koordinasi ini, sehingga pemerintah kecamatan belum bisa mengetahui pembangunan apa saja yang nantinya direncanakan oleh tim koordinasi ini. Hanya saja dapat dipastikan pihak kecamatan ke depannya akan mengadakan rapat dan pertemuan untuk mensinkronkan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Tapi banyak perusahaan di KecamatanSidoarjo dirasudah memberikan program CSR nyasendiritanpadikoordinasikandengan pihak kecamatan”(Wawancara dilakukan pada 16 Mei 2014 pukul 10.05 di Kantor Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo).

Mengetahui kinerja Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kecamatan Sidoarjo belum maksimal, maka hal tersebut menyebabkan pihak pemerintah melalui Sekretaris Kecamatan Sidoarjo yang juga menjabat sebagai Sekretaris II dalam Tim Koordinasi belum mengetahui adanya pembangunan yang dilaksanakan melalui program TJSLP/CSR dari tiap-tiap perusahaan di Kecamatan Sidoarjo.

Namun, seperti yang ada pada Kecamatan Waru sebelumnya, Kecamatan Sidoarjo juga menyatakan bahwa sebelum terbentuknya Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) pihak perusahaan di Kecamatan Waru sudah banyak yang melakukan program TJSLP /CSR tanpa dikoordinasikan terlebih dahulu dengan pihak Tim Koordinasi Kecamatan Sidoarjo.

**c) Koordinasi dengan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kecamatan Jabon**

**1) Susunan Anggota**

Susunan anggota dalam semua Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati No 188 Tahun 2013, salah satunya Tim Koordinasi Kecamatan Jabon pada tabel 17 berikut ini.

**Tabel 17. Susunan Anggota Tim Koordinasi Kecamatan Jabon**

No	Jabatan Dalam Tim	Instansi, Nama, Keterangan
1	2	3

1	Pembina	Camat Jabon
2	Ketua	Sutopo (Perusahaan Gas Negara)
3	Wakil Ketua	Kustihadi (PT. Pertamina Gas Area Jawa Bagian Timur)
	Sekretaris:	
4	a. Sekretaris I	M. Rojik (Usaha Sablon Desa Permisian)
	b. Sekretaris II	Sekretaris Kecamatan Jabon
	Bendahara:	
5	a. Bendahara I	H. Usman (Kontraktor Desa Dukuhsari)
	b. Bendahara II	H. Abdul Syukur (UD. Wijaya Abadi)
6	Koordinator:	
	a. Bidang Sosial	1. Mashudi (PNPM) 2. H. M. Mustakim (Bumbu Masak Aliyah/ BMA)
	b. Bidang Fisik Prasarana	H. Mustofa (CV. Sumber Mulyo Desa Kupang)
	c. Bidang Pemberdayaan Ekonomi	1. Kepala BRI Unit Jabon 2. Imam Ghozali (Perusahaan Rokok Tri Putra Santoso Desa Balongtani)
7	Anggota:	
	a. Bidang Sosial	1. H. M. Suwarno Ikhsan (Tokoh Masyarakat) 2. Mustamir (Pengusaha Sablon Desa Keboguyang) 3. H. Abd. Aji (Pengusaha Mebel Desa Kupang) 4. H. Asrofil (UD. Putra Mandiri Desa Kedungrejo)
	b. Bidang Fisik Prasarana	1. Suryadi, SPd (Tokoh Masyarakat) 2. Ova Dyarmanto (CV. Berkah Rahmat Jaya) 3. Mistari (Tokoh Masyarakat Desa Kupang) 4. H. Kusnadi (CV. BJ Desa Balongtani)
	c. Bidang Pemberdayaan Ekonomi	1. Sudirman AR, SE, MM (Tokoh Masyarakat) 2. H. Abdul Manab (Pengusaha Desa Kupang) 3. H. Kusaeri (CV. Kijang Mas Desa Kedungrejo) 4. H. Solikhin (Pengusaha Sablon Desa Permisian)



*Sumber: Bappeda Kabupaten Sidoarjo, Lampiran Keputusan Bupati Nomor 118/1137/404.1.3.2/2013*

Susunan anggota Tim Koordinasi Kecamatan Jabon sama dengan Tim Koordinasi di Kecamatan lain yang juga dibentuk oleh Bappeda melalui Keputusan Bupati Kabupaten Sidoarjo nomor 118 tahun 2013. Dalam susunan anggota tersebut terdiri dari pemerintah yang memiliki jabatan sebagai sekretaris II, kemudian ada tokoh masyarakat sebagai anggota bidang, dan anggota penting lain yang didominasi oleh perwakilan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) karena Kecamatan Jabon memang banyak memiliki usaha jenis tersebut, yang juga terdapat 2 perusahaan besar lain di Kabupaten Jabon. Masing-masing pemangku kepentingan menyampaikan tanggapannya yang berbeda dengan dibentuknya Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP). Berikut pernyataan dari Bapak Mustamir selaku Seksi Humas dan juga Anggota Bidang Sosial Tim Koordinasi Kecamatan Jabon:

“Reaksi dari Kecamatan sendiri jelas menerima dengan baik, karena tujuan dibentuknya tim koordinasi ini ya untuk meningkatkan pembangunan masyarakat, apalagi Kecamatan Jabon termasuk merupakan kecamatan yang tertinggal di Kabupaten Sidoarjo ini, tertinggal dalam berbagai hal, baik pendidikan, ekonomi, maupun kesehatan. Kemudian reaksi dari Perusahaan, terutama hanya dua perusahaan besar di Kecamatan Jabon senang dengan adanya tim koordinasi ini, soalnya semakin terarahkan program CSR yang dikeluarkan oleh perusahaan, selain itu terbukti dengan adanya respon positif yang diberikan perusahaan besar dengan menampung aspirasi dan kebutuhan setiap masyarakat di Jabon untuk dapat di laksanakan. Masyarakat juga memahami dan menerima dengan senang hati akan adanya tim koordinasi ini, sehingga apabila mereka membutuhkan bantuan bisa segera melaporkan secara langsung kepada tim koordinasi, salah satunya dengan menyerahkan proposal kepada tim koordinasi.” (Wawancara dilakukan pada 20 Mei 2014 pukul 11.30 di Kantor Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo).

Pihak Kecamatan Jabon jelas menerima dengan baik dibentuknya Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSPLP), karena dengan adanya Tim Koordinasi tersebut dapat membantu meningkatkan pembangunan masyarakat di Kecamatan Jabon. Dan Kecamatan Jabon juga merupakan Kecamatan paling tertinggal dalam segala hal di Kabupaten Sidoarjo, tertinggal dalam masalah pendidikan, ekonomi, maupun kesehatan. Sehingga pihak kecamatan menerima dengan sangat baik dibentuknya Tim Koordinasi ini.

Pihak perusahaan juga menerima dibentuknya Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSPLP) tersebut, karena pemberian program TJSPL/CSR di Kecamatan Jabon bisa berjalan lebih terarah. Perusahaan besar di Kecamatan Jabon juga dapat menampung kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk dapat segera dilaksanakan. Masyarakat yang mengetahui mengenai terbentuknya Tim Koordinasi tersebut, memberikan manfaat tersendiri bagi mereka. Karena masyarakat yang inisiatif dapat langsung menyerahkan proposal pengajuan untuk desanya kepada Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSPLP) Kecamatan Jabon.

## **2) Koordinasi dan Integrasi Antar Anggota**

Dengan adanya tugas pokok dan fungsi yang telah dibentuk oleh Bappeda Kabupaten Sidoarjo, Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSPLP) Kecamatan Jabon dirasa sudah menjalankan kinerjanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

masing-masing. Mereka telah mengadakan rapat dan pertemuan beberapa kali untuk melakukan koordinasi dan membicarakan mengenai program yang akan dilakukan dalam rangka melakukan percepatan pembangunan. Berikut pernyataan lanjutan dari Ibu Dra. Hj. Lenny Nurmalasari selaku Kepala Seksi Perekonomian dan Anggota Pelaksana Tim Koordinasi TJLSP Kecamatan Jabon:

“.....Bisa dibilang dari semua *stakeholder* yang termasuk dalam anggota Tim koordinasi Kecamatan Jabon sudah berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing, kecamatan telah beberapa kali mengadakan rapat dan pertemuan. Selain itu, banyak masyarakat yang mengajukan proposal ke Tim Koordinasi, tapi juga kadang-kadang perusahaan ada yang inisiatif misalnya ada peralatan kantor atau barang-barang yang sudah gak dipake lagi seperti meja atau kursi, barangkali ada semacam pondok yang masih membutuhkan. Terus kadang kecamatan juga minta bantuan ke perusahaan dan perusahaan menyuruh untuk mengajukan proposal. Kita semacam ngasih info ke perusahaan butuh kita apa, barangkali perusahaan bisa kasih bantuan gitu. Tapi kadang perusahaan juga memang ada program meski bukan dari inisiatif masyarakat, kayak penghijauan gitu. Banyak juga kan UKM di Jabon, tapi sayangnya bantuan yang dikasih sama masyarakat sekitar itu sumbangan sukarela bukan CSR, rutin gitu tiap dua minggu sekali berbagi sama kiri kanan, bentuknya seperti itu, gak dikoordinir sama Tim Koordinasi.”(Wawancara dilakukan pada 20 Mei 2014 pukul 15.00 di Kantor Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo).

Semua *stakeholders* yang termasuk dalam anggota Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kecamatan Jabon menjalankan tugas pokoknya sesuai dengan fungsinya. Kecamatan sebagai pihak pemerintah menyediakan fasilitas dalam mengadakan rapat dan pertemuan dalam rangka koordinasi mengenai program yang selanjutnya akan dijalankan. Pihak kecamatan sudah menjalankan rapat beberapa kali dalam rangka koordinasi dan integrasi.

Pihak perusahaan juga telah menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas pokoknya. Perusahaan selain memberikan informasi mengenai bantuan yang akan

diberikan kepada masyarakat, mereka juga melaporkan setiap kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Tim Koordinasi Kecamatan Jabon. Keadaan tersebut sangat mempermudah sekali kinerja Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kecamatan Jabon.

Selain itu, tokoh masyarakat yang diwakili oleh setiap Kepala Desa di Kecamatan Jabon juga menjalankan tugas pokoknya sesuai dengan fungsinya. Kepala Desa yang inisiatif aktif bertanya bantuan apa yang diberikan kepada masyarakat, dan apabila mereka membutuhkan bantuan untuk desa mereka, mereka berinisiatif untuk mengajukan proposal kegiatan kepada Tim Koordinasi. Namun, proposal yang diberikan juga dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Tim Koordinasi, apakah bantuan tersebut layak diberikan atau tidak layak diberikan. Sesuai dengan pernyataan dari Ibu Dra. Hj. Lenny Nurmalasari selaku Kepala Seksi Perekonomian dan Anggota Pelaksana Tim Koordinasi TJLSP Kecamatan Jabon:

“Kades-kades yang inisiatif aktif bertanya sama kecamatan program CSR apa saja yang diberikan sama perusahaan-perusahaan buat masyarakat. Kalaupun mereka butuh bantuan buat desa mereka, mereka buat proposal kegiatan terus dikasih ke Tim Koordinasi ini, tapi diseleksi dulu apa programnya layak untuk diberikan buat desa yang mengajukan proposal itu tadi. Lha kalo Kadesnya gak inisiatif ya nggak jalan mbak. Semua tergantung individunya masing-masing.” (Wawancara dilakukan pada 20 Mei 2014 pukul 15.15 di Kantor Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo).

Banyak sekali Kepala Desa yang berinisiatif mengajukan proposal kepada Tim Koordinasi Kecamatan Jabon untuk memberikan bantuan kepada Desa mereka masing-masing, namun proposal yang diberikan kepada Tim Koordinasi Kecamatan Jabon juga perlu untuk diseleksi terlebih dahulu, apakah program

yang diajukan di dalam proposal tersebut layak diberikan atau tidak layak untuk diberikan. Proposal-proposal dipertimbangkan terlebih dahulu karena dicari terlebih dahulu program yang sangat memerlukan bantuan. Seperti salah satu contoh desa yang disebutkan oleh Ibu Dra. Hj. Lenny Nurmalasari selaku Kepala Seksi Perekonomian dan Anggota Pelaksana Tim Koordinasi TJLSP Kecamatan Jabon berikut ini:

“...Kemarin memang sempat ada yang ngajuin proposal ke Tim Koordinasi tapi tidak sesuai, kebetulan musholla di Kedungcangkring, mereka minta bantuan karena pengen diperbaiki direhab gitu, tapi setelah di survey ternyata masih bagus dan masih layak pakai, direhab itu bukan rehab karena rusak atau apa itu endak, jadi masih dipertimbangkan mencari yang lebih membutuhkan bantuan, lha kemaren mushollanya masih bagus masih layak pakai, jadi Tim Koordinasi tidak kasih bantuan dulu deh, nyari yang lebih butuh dulu.”(Wawancara dilakukan pada 20 Mei 2014 pukul 15.30 di Kantor Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo).

Selain itu, koordinasi yang terjadi antar anggota dalam Tim Koordinasi tidak serta merta dilakukan melalui pertemuan formal sejenis rapat, namun mereka juga melakukan pertemuan diluar rapat, yaitu melalui komunikasi via telpon. Hal tersebut sangat mendukung dan memperlancar sekali kinerja Tim Koordinasi Kecamatan Jabon, berikut ini merupakan pernyataan dari Ibu Dra. Hj. Lenny Nurmalasari selaku Kepala Seksi Perekonomian dan Anggota Pelaksana Tim Koordinasi TJLSP Kecamatan Jabon:

“Jalannya Tim Koordinasi ini kalo dibilang masih lancar secara intens pertemuan sih enggak, maksudnya setelah terakhir kemaren bulan apa gitu rapat sekarang belum ada lagi, tapi komunikasi via telpon ya sekedar *say hello*, terus ngasih-ngasih info dan minta dana bantuan ke perusahaan-perusahaan itu masih jalan, sama ketuanya, ya sama wakilnya.” (Wawancara dilakukan pada 20 Mei 2014 pukul 15.35 di Kantor Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo).

### 3) Koordinasi dengan Bappeda

Koordinasi yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kecamatan Jabon yaitu dengan melaporkan hasil kegiatan kepada Bappeda secara online melalui email pribadi, hal ini disebutkan oleh Dra. Hj. Lenny Nurmalasari selaku Kepala Seksi Perekonomian dan Anggota Pelaksana Tim Koordinasi TJLSP Kecamatan Jabon:

“Laporan ke Bappeda itu harus, kalo gak lapor ke Bappeda nanti kita tidak tampak. Selain untuk menampakkan kegiatan ini kan Bappeda juga perlu tahu laporan kita. Laporan yang kita lakukan ke Bappeda ya setiap selesai kegiatan kita langsung foto, habis difoto langsung di email ke Bappeda lewat Pak Zaki, jadi gak tentu berapa bulan sekali. Habis kegiatan langsung lapor. Lha kalau nunggu rapat kan kita gak sempet, seringnya sibuk, yasudah kita langsung kirim email saja.”(Wawancara dilakukan pada 20 Mei 2014 pukul 15.40 di Kantor Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo).

Laporan kepada Bappeda dilakukan secara *online* oleh Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kecamatan Jabon melalui *email* (surat elektronik) pribadi. Pihak Tim Koordinasi dan pihak Bappeda melakukan hal tersebut dikarenakan mereka terkendala dengan waktu dan kesibukan masing-masing pihak. Karena apabila mereka melakukan laporan kepada Bappeda dengan mengandalkan rapat, maka yang terjadi adalah mereka tidak dapat memberikan laporan tepat waktu sehingga laporan tidak dapat tersampaikan.

### 4) Hasil Kinerja

Koordinasi dan integrasi yang dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Perusahaan (TJSLP) Kecamatan Jabon berjalan dengan baik dan sesuai. Selain itu, setiap anggota yang ada dalam Tim Koordinasi tersebut menjalankan tugas pokoknya sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab yang telah diberikan kepada mereka, sehingga hasil kinerja yang mereka lakukan sudah dapat terlihat meskipun tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Berikut ini merupakan pernyataan dari Ir. Rosida Winayu selaku Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Sidoarjo:

“Sebelum Perda Bupati turun, Tim Koordinasi sudah melangkah, sekitar sepertiga sudah lancar, yang lainnya sedang, dan masih ada yang belum. Salah satunya yaitu Kecamatan Jabon. Kecamatan Jabon sudah menunjukkan perubahan, karena ada kegiatan yang sinergi dalam Kecamatan Jabon. Kemarin Kecamatan Jabon melalui program CSR nya salah satunya sudah melakukan program penghijauan dan pembagian sembako.” (Wawancara dilakukan pada 12 Oktober 2013 pada pukul 10.40 WIB di Kantor Bappeda Kabupaten Sidoarjo).

Kecamatan Jabon merupakan salah satu Tim Koordinasi Kecamatan yang telah melaksanakan koordinasi dan integrasi dengan baik. Hal tersebut juga disebutkan oleh Ibu Dra. Hj. Lenny Nurmalasari selaku Kepala Seksi Perekonomian dan Anggota Pelaksana Tim Koordinasi TJLSP Kecamatan Jabon:

“.....Kemaren juga banyak pengajuan proposal melalui Tim Koordinasi dan sudah ada beberapa kegiatan yang dilakukan melalui atas nama Tim Koordinasi. Ya ada penghijauan, bantuan sapi-sapi, terus ada yang komputer untuk anak-anak sekolah, sembako, terus bantuan buat SD Permisan juga, ada juga latihan petani tambak dan desa binaan. Ada juga bantuan alat-alat kesehatan untuk Polindes Desa Permisan, terus ada penghijauan, yaitu penanaman pohon produktif yang kemaren pelaksanaannya ada juga dari LH (Lingkungan Hidup), Alhamdulillah sudah banyak.” (Wawancara dilakukan pada 20 Mei 2014 pukul 15.47 di Kantor Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo).

Banyak sekali pengajuan proposal oleh masyarakat kepada Tim Koordinasi Kecamatan Jabon, banyak juga kegiatan yang dilakukan atas nama Tim Koordinasi yang dibantu oleh PT. Pertamina Gas diantaranya yaitu penghijauan,

bantuan ternak berupa sapi, kemudian bantuan komputer untuk sekolah, juga ada bantuan sembako, kemudian ada juga pelatihan bagi petani tambak dan pelatihan untuk desa binaan. Selain itu ada juga program yang sudah terlaksana lainnya yaitu bantuan alat-alat kesehatan untuk Polindes (Pondok Bersalin Desa) Desa Permisian yang diberikan kepada masyarakat, juga program penghijauan yaitu penanaman 1.000 bibit pohon produktif di Kecamatan Jabon. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Ibu Dra. Hj. Lenny Nurmalasari selaku Kepala Seksi Perekonomian dan Anggota Pelaksana Tim Koordinasi TJLSP Kecamatan Jabon:

“.....Pertamina setelah melakukan kegiatan mesti ngelapor dan ngasih info sama Tim Koordinasi, kadang-kadang kita yang nyesek minta tolong dibantu dan seringnya juga dibantu. Yang rutin lapor bukan Cuma Pertamina, tapi PGN juga, kebetulan kan manajemen mereka juga manajemen terbuka, soalnya mereka perusahaan besar yang ada di Jabon.” (Wawancara dilakukan pada 20 Mei 2014 pukul 15.56 di Kantor Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo).

Kedua perusahaan besar di Kecamatan Jabon, yaitu PT. Pertamina Gas dan Perusahaan Gas Negara (PGN) setelah melakukan kegiatan melalui program TJSLP/CSRnya langsung memberikan laporan kepada Tim Koordinasi Kecamatan Jabon melalui pihak Kecamatan. Dengan kata lain, pihak masyarakat, kecamatan, dan perusahaan saling berkerja satu sama lain sesuai dengan tugasnya masing-masing. Berikut ini menunjukkan mengenai hasil dari koordinasi antar sesama anggota dalam Tim Koordinasi yaitu antara pihak pemerintah Kecamatan Jabon dengan pihak swasta PT. Pertamina Gas dengan berpartisipasi dalam memberikan bantuan pemberian bantuan 1.000 bibit pohon mangga. Program tersebut dilaksanakan pada 3 Juli 2013 dan dilakukan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup sedunia.





**Gambar 13. Penyerahan Secara Simbolis Bantuan 1000 Bibit Pohon Mangga PT. Pertamina Gas Kepada Kecamatan Jabon sebagai hasil koordinasi dalam Tim Koordinasi Kecamatan Jabon**

*Sumber: Kecamatan Jabon*



**Gambar 14. Pemberian Bantuan 1000 Bibit Pohon Mangga oleh PT. Pertamina Gas Kepada Kecamatan Jabon sebagai hasil koordinasi dalam Tim Koordinasi Kecamatan Jabon**

*Sumber: Kecamatan Jabon*

Koordinasi antara Bappeda dengan Tim Koordinasi sesuai dengan fungsi Bappeda melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah. Bappeda melakukan peranannya dalam mengkoordinasikan setiap Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) yang ada di Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Bappeda mengkoordinasikan Tim Koordinasi Kecamatan sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi yang telah disosialisasikan sebelumnya.

Selain itu, koordinasi antara Bappeda dengan Tim Koordinasi di Kecamatan menampilkan hasil koordinasi yang berbeda di masing-masing kecamatan yang diteliti, dua kecamatan memiliki hasil yang sama yaitu Kecamatan Waru dan Kecamatan Sidoarjo, sedangkan Kecamatan Jabon menampilkan hasil koordinasi yang berbeda dengan dua kecamatan tersebut. Kecamatan Waru dan Kecamatan Sidoarjo dikatakan sama karena kurang adanya integrasi antar sesama anggota dalam Tim Koordinasi sehingga juga berpengaruh pada koordinasinya dengan Bappeda dan hasil kinerja yang telah dicapai. Namun hal tersebut berbeda dengan Kecamatan Jabon. Sedangkan anggota dalam Tim Koordinasi Kecamatan Jabon telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab sehingga koordinasi dengan Bappeda dapat berjalan dengan sesuai dan hasil kinerja yang dituju dapat tercapai dengan sesuai.

### 3. **Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Koordinasi Antara Bappeda dengan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)**

#### a) **Faktor Pendukung**

1. Anggota dalam Tim Koordinasi telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan tanggung jawabnya.

Tim Koordinasi yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan tanggung jawabnya hanya Tim Koordinasi Kecamatan Jabon, sedangkan dari Tim Koordinasi Kecamatan Waru dan Tim Koordinasi Kecamatan Sidoarjo belum melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Berikut pernyataan dari Dra. Hj. Lenny Nurmalasari selaku Kepala Seksi Perekonomian dan Anggota Pelaksana Tim Koordinasi TJSLP Kecamatan Jabon:

“.....Pertamina sering lapor ke Tim koordinasi setelah melakukan kegiatan, pelatihan petani tambak dan desa binaan. Terus kalau dari PGN ada paket sembako untuk kaum dhuafa juga support sekian paket, hari raya juga support sekian paket sembako, biasanya mereka lapor ke Tim Koordinasi, tapi kadang kita juga maksa minta apa yang pengen dibantu, biasanya gitu.” (Wawancara dilakukan pada 20 Mei 2014 pukul 16.00 di Kantor Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo).

Pertamina sebagai pihak swasta dalam Tim Koordinasi seringkali setelah melakukan kegiatannya, mereka melaporkan kepada Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kecamatan Jabon. Meskipun hanya

terdapat dua perusahaan besar di Kecamatan Jabon mereka menjalankan tugasnya dengan baik. Selain itu, pihak kecamatan juga aktif memberikan informasi kepada pihak perusahaan apa yang seharusnya diberikan bantuan, sehingga pihak perusahaan dapat dengan segera menangani. Pihak perusahaan yang mendominasi anggota Tim Koordinasi telah menjalankan tugasnya dengan sesuai, selain itu masyarakat yang diwakili oleh Kepala Desa masing-masing di Kecamatan Jabon memanfaatkan dengan baik juga adanya Tim Koordinasi tersebut. Berikut pernyataan dari Dra. Hj. Lenny Nurmalasari selaku Kepala Seksi Perekonomian dan Anggota Pelaksana Tim Koordinasi TJSLP Kecamatan Jabon:

“.....Kadang kepala desa yang aktif tanya ke kecamatan ada program apa aja, ya lalu mereka buat proposal, lha kan setiap desa gak mesti ada yang aktif, ada yang gak aktif juga. Kalau butuh ada yang tanya program CSR apa yang diberikan perusahaan. Semua kan tergantung individunya juga masing-masing. Tapi diseleksi dulu apa programnya layak diberi bantuan.”(Wawancara dilakukan pada 20 Mei 2014 pukul 16.07 di Kantor Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo).

Kepala Desa banyak yang aktif bertanya kepada Tim Koordinasi mengenai berbagai program TJSLP/CSR yang dikeluarkan oleh perusahaan, maka apabila pihak desa membutuhkan, maka yang perlu mereka lakukan adalah membuat proposal dan menyerahkannya terlebih dahulu kepada Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kecamatan Jabon untuk kemudian dapat dipertimbangkan apakah program tersebut layak diberikan atau tidak layak untuk diberikan.

2. Adanya hubungan informal diluar hubungan formal.

Hubungan informal mendukung adanya hubungan formal yang ada karena hal tersebut sangat mendukung sekali kegiatan yang sedang berlangsung. Namun hubungan informal ini hanya terjadi pada Tim Koordinasi Kecamatan Jabon, sedangkan Tim Koordinasi Kecamatan Waru dan Tim Koordinasi Kecamatan Jabon tidak didukung dengan hubungan informal. Hal ini dinyatakan oleh Dra. Hj. Lenny Nurmalasari selaku Kepala Seksi Perekonomian dan Anggota Pelaksana Tim Koordinasi TJSLP Kecamatan Jabon:

“...Bisa dibilang semua sudah kenal begitu, terus kalau ada program ini ya sudah nyambung, Cuma kegiatannya aja belum rutin, misalnya kalau buat sengaja ketemu itu kadang gak bisa, seringnya masih repot. Sempet itu kita 3 bulan sekali kumpul. Nah komunikasi via telpon kadang kasih info satu sama lain, ya sama Ketuanya atau sama wakilnya, jadi gak selalu lewat rapat.(Wawancara dilakukan pada 20 Mei 2014 pukul 16.10 di Kantor Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo).

Pihak kecamatan seringkali menyediakan fasilitas dengan mengundang semua anggota Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kecamatan Jabon untuk mengadakan rapat dan pertemuan dalam rangka koordinasi dan integrasi, namun seringkali yang terjadi adalah banyak dari pihak yang diundang dalam rapat terhalang oleh kegiatan lain yang mendadak, sehingga hal tersebut menghalangi untuk dapat bertemu dan membicarakan mengenai program yang akan dilaksanakan, namun adanya

hubungan informal diluar hubungan formal (rapat) dapat membantu mempermudah pekerjaan.

## b) Faktor Penghambat

### 1. Tim Koordinasi Tidak Menjalankan Tugas Sesuai dengan Tanggung Jawab yang Dimiliki

Tim Koordinasi telah memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Keputusan Bupati No.188 Tahun 2013 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) di Kecamatan Se Kabupaten Sidoarjo. Hanya saja Tim Koordinasi tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang ada. Salah satu penyebabnya yaitu kurangnya komunikasi dan integrasi antar anggota dalam tim Koordinasi terjadi pada Tim Koordinasi Kecamatan Waru dan Tim Koordinasi Kecamatan Sidoarjo. Berikut merupakan pernyataan dari Bapak Iswadi sebagai Sekretaris Kecamatan Waru yang juga menjabat sebagai Sekretaris II dalam Tim Koordinasi:

“Kurang adanya koordinasi dan integrasi antar sesama anggota dalam tim koordinasi sehingga sampai saat ini pun tim koordinasi tidak berjalan dengan baik dan lancar, banyak perusahaan yang langsung melakukan program CSRnya dengan terjun langsung ke lapangan dan masyarakat tanpa dikoordinasikan terlebih dahulu dengan tim koordinasi, kemudian kurang memahami fungsi kerja masing-masing sehingga dalam bekerja tidak maksimal, selain itu tim koordinasi dalam hal ini pemerintah kecamatan waru, tidak diberikan laporan yang intensif sehingga tidak mengetahui perkembangan pembangunan yang terjadi, sehingga penyerahan dana dan program CSR ini dirasa masih parsial.” (Wawancara dilakukan pada 14 Mei 2014 pukul 11.20 di Kantor Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo).

Kurangnya koordinasi dan integrasi antara sesama anggota dalam Tim Koordinasi Kecamatan Waru berakibat pada tidak berjalannya tujuan yang

telah ditetapkan bersama sehingga Tim Koordinasi tidak berjalan dengan baik dan lancar. Hal diatas juga menandakan bahwa setiap anggota tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan benar. Contohnya saja, banyak pihak perusahaan di Kecamatan Waru yang langsung memberikan program TJSJP/CSR nya kepada masyarakat tanpa dikoordinasikan terlebih dahulu kepada Tim Koordinasi. Selain itu, hal tersebut juga terjadi pada Tim Koordinasi Kecamatan Sidoarjo, berikut merupakan pernyataan Bapak SuyudSupriadi, SP.MMs selaku Kepala Seksi Pembangunan Fisik Kecamatan Sidoarjo sebagai Anggota Pelaksana Tim Koordinasi Kecamatan Sidoarjo:

“Hambatan utama yang dirasakan Tim Koordinasi Kecamatan Sidoarjo ini adalah kurangnya komunikasi antar sesama anggota tim, sehingga sampai saat ini belum pernah diadakan rapat dan pertemuan yang membicarakan tentang program-program dan kegiatan-kegiatan apa saja yang nantinya akan dilaksanakan. Sehingga program pembangunan melalui CSR nantinya dapat segera dilaksanakan. (Wawancara dilakukan pada 16 Mei 2014 pukul 10.12 di Kantor Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo).

Dikarenakan kurangnya komunikasi antar anggota dalam Tim Koordinasi Kecamatan Sidoarjo, maka hal tersebut berdampak pada kurangnya koordinasi dan integrasi itu sendiri. Sehingga jika koordinasi dan integrasi kurang dalam kinerja Tim Koordinasi, maka hal tersebut juga menandakan bahwa setiap anggota tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan benar. Sehingga, hasil kinerja tim koordinasi belum dapat dilihat hasilnya.

## 2. Terkendala masalah dana

Faktor penghambat ini dirasakan oleh Tim Koordinasi Kecamatan Sidoarjo, berikut ini merupakan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Suyud Supriadji, SP.MMKepala Seksi Pembangunan FisikKecamatan Sidoarjo sekaligus Anggota Pelaksana Tim Koordinasi Tim Koordinasi Kecamatan Sidoarjo:

“.....Selainitu, hambatan lain yang dirasakansama kita adalah terkendaladalamdana.Pihakkecamatanapabilaakanmengadakanperte muanmaupunrapatsangatterkendalasekalidengan dana. Kalopun kita ini diberi tugas sama Bappeda semestinya kita ini diberi penghargaan semacam insentif gitu, kan ngundang orang rapat kalo gak ada dana juga percuma, buat konsumsinya dan yang lain-lain gak ada.”(Wawancara dilakukan pada 16 Mei 2014 pukul 10.25 di Kantor Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo).

Tim Koordinasi Kecamatan Sidoarjo berpikir apabila dalam mengadakan rapat dan pertemuan dalam rangka koordinasi, Tim Koordinasi Kecamatan Sidoarjo terkendala dalam masalah dana. Tentu saja hal tersebut berakibat fatal pada kinerja Tim Koordinasi, Tim Koordinasi tidak dapat mengadakan rapat dan pertemuan yang kemudian berdampak pada kurangnya koordinasi dan integrasi, sehingga semua elemen dalam Tim Koordinasi dikatakan tidak berjalan dan tidak berfungsi dengan baik.

### 3. Kesibukan masing-masing anggota Tim Koordinasi

Faktor penghambat ini dirasakan oleh Tim Koordinasi Kecamatan Jabon. Kesibukan masing-masing anggota Tim Koordinasi terkadang menghambat kinerja Tim Koordinasi itu sendiri. Hal ini diungkapkan oleh Dra. Hj. Lenny Nurmalasari selaku Kepala Seksi Perekonomian dan Anggota Pelaksana Tim Koordinasi TJSLP Kecamatan Jabon:



“.....Sibuknya masing-masing anggota jadi penghambat tim koordinasi, mau kumpul aja susah soalnya semua yang diundang itu orang sibuk, soalnya semua anggotanya kan *pure* dari pengusaha, dan unsur pemerintah kan cuma sekcama aja, jadi kadang kalo ngumpul itu sering susah. Kadang saat bikin undangan banyak acara mendadak jadi gak terlaksana, ya itu susahnya, ya sudah kalau begitu. Nah, sekcamnya kan juga baru, jadi belum ada koordinasi secara intens.”(Wawancara dilakukan pada 20 Mei 2014 pukul 16.15 di Kantor Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo).

Faktor lain yang menjadi penghambat adalah kesibukan masing-masing anggota Tim Koordinasi tersebut. Apabila akan diadakan rapat dan pertemuan dalam rangka koordinasi dan integrasi, seringkali anggota yang diundang jarang hadir dikarenakan kesibukan dari masing-masing pihak, terutama dari pihak perusahaan. Pihak kecamatan sebagai fasilitasi mengundang setiap anggota dalam Tim Koordinasi, namun yang terjadi banyak dari anggota tersebut tidak hadir untuk memenuhi undangan rapat. Selain itu, dikarenakan Sekretaris Kecamatan Jabon baru saja berganti, maka belum diadakan rapat dan pertemuan sama sekali.

Terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi koordinasi Bappeda dengan Tim Koordinasi Kecamatan. Faktor Pendukung koordinasi yaitu terdiri dari: (1) anggota Tim Koordinasi telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dan (2) adanya hubungan informal anggota diluar hubungan formal. Kemudian faktor penghambat koordinasi antara Bappeda dengan Tim Koordinasi lebih banyak dibandingkan dengan faktor pendukung, yaitu terdiri dari (1)Tim Koordinasi tidak menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang dimiliki(2) terkendala masalah dana,dan (3) kesibukan masing-masing anggota tim koordinasi.

### C. Pembahasan dan Analisis Data

#### 1. Peran Bappeda dalam Upaya Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)

##### a. Peran Bappeda dalam Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)

Bappeda berdasarkan fungsinya yang pertama dalam perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah, melakukan peranannya dalam perencanaan pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kecamatan dengan membentuk regulasi yang mengaturnya. Kemudian Bappeda dalam fungsinya yang kedua yaitu melakukan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah dengan melakukan koordinasi seluruh tugas pokok, dan fungsi Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) yang ada di Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo dengan memberikan sosialisasi.

Kemudian fungsi Bappeda yang ketiga yaitu melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, Bappeda melakukan peranannya dalam mengkoordinasikan setiap Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) yang ada di Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi yang telah disosialisasikan sebelumnya, setelah itu Bappeda melakukan peranannya dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja Tim Koordinasi tersebut. Ketiga fungsi Bappeda diatas

bertujuan untuk melaksanakan tugas Bappeda dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Sehingga dalam fungsi Bappeda memiliki peranan yang berpengaruh terhadap pembentukan Tim Koordinasi Kecamatan, yaitu perannya sebagai perencana, sebagai koordinator, dan sebagai pengevaluasi.

Dalam melaksanakan fungsi Bappeda yang memiliki peranan dalam pembentukan Tim Koordinasi diatas sesuai dengan tujuan dari koordinasi yaitu (1) bertujuan untuk menyatupadukan seluruh kegiatan untuk menjamin tercapainya suatu tujuan, (2) dengan adanya koordinasi maka memungkinkan hasil pekerjaan secara keseluruhan menjadi lebih maksimal, (3) dengan dilakukannya koordinasi maka organisasi menjadi lebih efektif. Bappeda menjalankan perannya sebagai perencana dalam pembentukan Tim Koordinasi Kecamatan dengan membentuk regulasi, kemudian mengkoordinasikan seluruh kegiatan Tim Koordinasi Kecamatan untuk tercapainya suatu tujuan Bappeda dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

**b. Tujuan dan Sasaran Bappeda dalam Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)**

Tujuan utama dibentuknya Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) di tingkat kecamatan, yaitu untuk percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan di Kabupaten Sidoarjo. Dengan adanya tujuan tersebut, maka juga

terdapat sasaran untuk mencapai tujuan tersebut yaitu (1) melakukan inventarisir kebutuhan program masyarakat dan mempublikasikan program-program yang dibutuhkan tersebut beserta dengan total biayanya, (2) melakukan monitoring dan evaluasi.

Dengan adanya tujuan dan sasaran yang dibentuk tersebut, maka sesuai dengan salah satu manfaat dalam melakukan koordinasi, yaitu dengan koordinasi dapat dijamin adanya kesatuan atas suatu kebijakan antar pejabat dan dengan kooridnasi dapat dijamin adanya kesatuan langkah dan tindakan antar pejabat. Sudah pasti apabila Bappeda memiliki tujuan dan sasaran tersendiri dalam membetuk Tim Koordinasi Kecamatan, maka setiap pemangku kepentingan menjalankan tugasnya sesuai dengan tujuan dan sasaran koordinasi yang telah dibentuk.

Kemudian menurut pendapat Suryono (2010:4), dalam pembangunan (*development*) terkandung unsur-unsur, (1) perubahan: yaitu perubahan dari sesuatu yang dianggap masih kurang menuju kesempurnaan; (2) Tujuan: yaitu tujuan yang diarahkan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (manusia) menuju pelestarian, kesejahteraan, dan kebahagiaan hidup yang lebih baik; dan (3) potensi: yaitu potensi masyarakat yang terdapat dalam masyarakat itu sendiri yang kemudian dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan percanaan pembangunan.

Latar belakang dibentuknya Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) untuk

mengoptimalkan pelaksanaan program CSR (*Corporate Social Responsibility*), karena jarang sekali perusahaan melibatkan masyarakat maupun pemerintah daerah untuk merencanakan program CSR yang tepat dan bermanfaat bagi masyarakat, sehingga dirasa program CSR yang dikeluarkan perusahaan belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Program CSR yang dijalankan oleh perusahaan tidak melibatkan masyarakat dan unsur pemerintah dalam merencanakannya, sehingga tidak tepat sasaran dan kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan latar belakang dibentuknya Tim Koordinasi tersebut, sesuai dengan unsur pertama pembangunan yang diutarakan oleh Suryono, yaitu untuk suatu perubahan dari sesuatu yang dianggap masih kurang menuju kesempurnaan. Dikarenakan belum sempurnanya pelaksanaan program CSR di Kabupaten Sidoarjo, maka tujuan dibentuknya Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) yaitu untuk merencanakan program CSR yang sesuai dengan sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Kemudian pada unsur pembangunan yang kedua yang diutarakan oleh Suryono bahwa dalam pembangunan memiliki tujuan yang diarahkan dari, oleh, dan untuk rakyat menuju pelestarian, kesejahteraan, dan kebahagiaan hidup yang lebih baik. Unsur kedua tersebut sesuai dengan tujuan utama dibentuknya Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) oleh Bappeda yang ditempatkan di setiap kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, yaitu untuk melakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan di Kabupaten Sidoarjo. Karena

nantinya dengan melakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan maka nantinya dapat menuju pelestarian, kesejahteraan, dan kebahagiaan hidup masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang lebih baik.

Kemudian unsur ketiga dalam pembangunan yang diutarakan oleh Suryono adalah adanya potensi, yaitu potensi masyarakat yang terdapat dalam masyarakat itu sendiri yang kemudian dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan. Hal tersebut sesuai dengan sasaran pembentukan Tim Koordinasi, yaitu (1) merencanakan program CSR yang tepat dan bermanfaat bagi masyarakat, (2) melakukan inventarisir kebutuhan program masyarakat dan mempublikasikan program-program yang dibutuhkan tersebut beserta dengan total biayanya, dan (3) melakukan monitoring dan evaluasi.

Merencanakan program CSR yang tepat dan bermanfaat bagi masyarakat serta melakukan inventarisir kebutuhan program masyarakat dan mempublikasikan program-program yang dibutuhkan beserta dengan total biayanya, serta melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai dengan unsur ketiga dalam pembangunan menurut pendapat Suryono, yaitu terdapat potensi dalam masyarakat itu sendiri untuk dapat mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan. Melalui pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) di tingkat kecamatan oleh Bappeda Kabupaten Sidoarjo, hal tersebut telah memenuhi unsur-unsur pembangunan sesuai dengan pendapat Suryono diatas. Sehingga dengan terbentuknya Tim Koordinasi tersebut, dapat memenuhi tujuan dan sasaran pembangunan yang telah direncanakan.

**c. Aktor yang Terlibat dalam Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)**

Sesuai dengan beberapa tujuan koordinasi yang dikutip oleh Moekijat (1994:34) yaitu dengan dilakukannya koordinasi maka organisasi menjadi lebih efektif, selain itu koordinasi memungkinkan hasil pekerjaan secara keseluruhan menjadi lebih maksimal. Dengan adanya tugas Sektap Tim Fasilitasi Program Kegiatan CSR Kabupaten Sidoarjo yaitu melakukan pertemuan secara berkala dalam rangka koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi perencanaan pelaksanaan Program Kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) dalam mendukung upaya percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan di Kabupaten Sidoarjo, maka Tim Fasilitasi melakukan koordinasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan diatas.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan diatas, sesuai dengan tujuan koordinasi lainnya yang disampaikan oleh Moekijat (1994:34) yaitu untuk menyatupadukan seluruh kegiatan demi tercapainya suatu tujuan. Dengan dilakukannya koordinasi oleh Tim Fasilitasi CSR, maka Tim Fasilitasi menyatupadukan seluruh kegiatan untuk menjamin tercapainya suatu tujuan dengan membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP). Dengan dibentuknya Tim Koordinasi tersebut, maka dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan

sebelumnya oleh Tim Fasilitasi yaitu mengelola program CSR perusahaan sebagai upaya perluasan dan percepatan pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan.

Semua hal diatas diperkuat dengan pendapat dari Sondang P. Siagian yang dikutip oleh Moekijat (1994:6), mendefinisikan bahwa koordinasi merupakan pengaturan tata hubungan dari usaha bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam usaha pencapaian tujuan bersama pula. Tim Fasilitasi yang memiliki susunan keanggotaan dengan masing-masing tugas yang telah ditetapkan dan menjadi tanggungjawabnya masing-masing telah melakukan koordinasi dengan cara melakukan tata hubungan suatu usaha dengan membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dalam usaha pencapaian tujuan bersama yaitu mengelola program CSR perusahaan sebagai upaya perluasan dan percepatan pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan.

Sehingga dengan adanya pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) oleh Tim Fasilitasi CSR, maka Tim Fasilitasi telah menjalankan tugasnya sesuai dengan tujuan koordinasi sesuai dengan pendapat Moekijat diatas.

#### **d. Mekanisme Prosedur dalam Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)**

Bappeda pada tahun 2012 melakukan kajian mengenai kinerja CSR di Kabupaten Sidoarjo, yang kemudian dilanjutkan pada tahun 2013 dengan pembentukan regulasinya, dan pada tahun 2014 dilakukan penguatan dan



optimalisasi. Mekanisme prosedur pembentukan Tim Koordinasi diatas sesuai dengan tujuan dan manfaat koordinasi yaitu Bappeda dalam melakukan kajian, melakukan pembentukan regulasi, dan melakukan penguatan dan optimalisasi saling berkoordinasi untuk mencapai hasil pekerjaan keseluruhan menjadi lebih maksimal dan menyatupadukan seluruh kegiatan tersebut untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan tersebut yaitu melakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan. Selain itu dalam melaksanakan hal tersebut, Bappeda mempunyai kesatuan langkah dan kesatuan sikap dalam menjalankan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain itu, Sumarto (2004: 1-2) menyebutkan bahwa *governance* diartikan sebagai mekanisme, praktek, dan tata cara pemerintah, dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Selain itu, sejatinya konsep *governance* harus dipahami sebagai suatu proses, bukan struktur atau institusi. *Governance* juga menunjukkan inklusivitas. Kalau *government* dilihat sebagai “mereka” maka *governance* adalah “kita”.

Berdasarkan pengertian *governance* diatas yang inti di dalamnya adalah mengatur berbagai macam urusan pemerintah dalam menangani berbagai masalah publik. Sama halnya dengan Bappeda Kabupaten Sidoarjo melalui Tim Fasilitasi Program Kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*) Kabupaten Sidoarjo membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) untuk menangani pelaksanaan program CSR di kabupaten Sidoarjo yang belum optimal dan belum tepat sasaran.

Bappeda pada tahun 2012 melakukan kajian mengenai kinerja CSR di Kabupaten Sidoarjo, yang kemudian dilanjutkan pada tahun 2013 dengan pembentukan regulasinya, dan pada tahun 2014 dilakukan penguatan dan optimalisasi. Bappeda Kabupaten Sidoarjo sebagai unsur pemerintah melakukan mekanisme dan tata cara pemerintah dalam memecahkan masalah-masalah publik. Karena dengan dibentuknya Tim Koordinasi di setiap Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, maka masalah-masalah publik mengenai pelaksanaan program CSR di Kabupaten Sidoarjo yang tidak optimal dan jarang melibatkan pemerintah dan masyarakat sehingga menyebabkan kurang efektifnya sasaran program dan menyebabkan tumpang tindih pembiayaan program untuk masyarakat dalam melaksanakan program CSR diharap dapat terpecahkan.

## 2) Melakukan Kajian

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Santoso S. Hamidjojo bahwa untuk mencapai perubahan yang mengarah kepada perbaikan diperlukan suatu strategi sebagai pola penentuan serangkaian tujuan-tujuan dari perubahan yang diinginkan dengan partisipasi sosial. Strategi itu mencakup konsepsi atau partisipasi tentang masukan materi perubahan (inovasi/dengan dana dan tenaga yang dianggap paling efektif dan efisien dan dituangkan dalam sistem untuk menimbulkan perubahan ke arah perbaikan). Demikian dikemukakanya tentang obyek partisipasi yang dapat terbentuk menyeluruh seperti program pembangunan yang terpadu dan juga bentuk yang terbatas berupa proyek kegiatan pembangunan yang sederhana.

Pendapat diatas sama halnya dengan Bappeda dalam upaya percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan di Kabupaten Sidoarjo sebagai upaya harmonisasi dan sinergi program antara dunia usaha dengan Pemerintah Daerah melalui program kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*), membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP). Bappeda melakukan partisipasinya dengan melakukan kajian bersama dengan LPEP Universitas Airlangga pada tahun 2012 sehingga kemudian telah diketahui hasilnya bahwa komunikasi antara masyarakat dengan perusahaan kurang begitu baik, dikarenakan adanya tumpang tindih mengenai pembangunan yang dibutuhkan masyarakat setempat dengan program CSR yang diberikan oleh perusahaan. Sehingga, partisipasi Bappeda dapat mencapai perubahan yang mengarah kepada perbaikan dengan melakukan kajian tersebut.

Kemudian menurut Sastropoetro menyatakan bahwa terdapat beberapa unsur penting dalam partisipasi yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Sidoarjo, yaitu:

- 1) Komunikasi yang menumbuhkan pengertian yang efektif/berhasil. Dalam keadaan internal, Bappeda menyadari mengenai banyaknya jumlah perusahaan di Kabupaten Sidoarjo.
- 2) Perubahan sikap, pendapat dan tingkah laku yang diakibatkan oleh pengertian yang menumbuhkan kesadaran. Bappeda dengan menyadari mengenai banyaknya jumlah perusahaan tersebut, sehingga melalui

program CSR yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan dapat membantu pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.

- 3) Kesadaran yang didasarkan pada kepentingan dan pertimbangan. Oleh karena itu, Bappeda berdasarkan kepentingan dan pertimbangannya melakukan kajian mengenai kinerja program CSR di Kabupaten Sidoarjo. Bappeda melakukan kajian diabntu oleh pihak LPEP Universitas Airlangga.
- 4) Antusiasme yang menumbuhkan spontanitas, yaitu kesediaan melakukan sesuatu yang tumbuh dari dalam lubuk hati sendiri tanpa dipaksa orang lain. Setelah diketahui hasil setelah melakukan kajian diketahui bahwa komunikasi antara masyarakat dengan perusahaan kurang begitu baik, sehingga adanya tumpang tindih pembiayaan pembangunan dan kurang tepatnya sasaran program CSR yang diberikan oleh perusahaan.
- 5) Adanya rasa tanggung jawab untuk kepentingan bersama. Untuk dapat melakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan di Kabupaten Sidoarjo sebagai upaya harmonisasi dan sinergi program antara dunia usaha dengan Pemerintah Daerah melalui program kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*), maka Bappeda melalui Tim Fasilitasi yang melakukan kajian sebelumnya membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP).

### 3) Pembentukan Regulasi

Hal kedua yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Sidoarjo setelah mengetahui hasil dari melakukan kajian mengenai kinerja program CSR (*Corporate Social Responsibility*) adalah membentuk Peraturan Daerah mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Wilayah Sidoarjo beserta Peraturan Bupati mengenai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut, yang kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Keputusan Bupati mengenai Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJLSP) di Kecamatan Se Kabupaten Sidoarjo.

Dalam melakukan pembentukan regulasi, sesuai dengan manfaat dalam melakukan koordinasi. Dengan dibentuknya regulasi tersebut bertujuan untuk mencapai kesatuan sikap, mencapai kesatuan atas suatu kebijakan, dan adanya kesatuan langkah dan tindakan antar parapemangku kepentingan bagi Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kecamatan. Sehingga dengan pembentukan regulasi yang mengatur para pemangku kepentingan tersebut sangat bermanfaat dalam melakukan koordinasi.

Kemudian Weber dalam Widodo (2007:12-13) menyebutkan bahwa birokrasi diartikan sebagai "*ideal type of organization*" yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Adanya pembagian pekerjaan, hubungan kewenangan dan tanggung jawab yang didefinisikan dengan jelas.
- b. Kantor diorganisasikan secara hierarki atau adanya rangkaian komando.

- c. Pejabat manajerial dipilih dengan kualifikasi teknis yang ditentukan dengan pendidikan dan ujian.
- d. Peraturan dan pengaturan mengarah pada pelaksanaan pekerjaan.
- e. Hubungan antara manajer dengan karyawan berbentuk impersonal.
- f. Pegawai yang berorientasi pada karier dan mendapatkan gaji yang tepat.

Berikut ini merupakan uraian ciri-ciri tipe ideal organisasi yang menyangkut dalam hal penguatan dan optimalisasi mekanisme pembentukan dan penguatan Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJLSP).

**a. Tugas Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJLSP)**

Downs dalam Widodo (2007:11-12) berhasil menyimpulkan konsep birokrasi. Setidaknya, konsep birokrasi dapat dibedakan dalam tiga pengertian berikut. (1) birokrasi biasanya menunjuk suatu lembaga atau tingkatan lembaga khusus. Dalam pengertian ini, birokrasi dinyatakan sebagai suatu konsep yang sama dengan biro (walaupun tidak semua pengarang setuju dengan konsep tersebut), (2) birokrasi juga dapat berarti suatu metode tertentu untuk mengalokasikan sumber daya dalam suatu organisasi yang berskala besar. Pengertian ini sama dengan pembuatan keputusan birokratis (*bureaucratic decision making*), dan (3), birokrasi diartikan sebagai "*bureauness*" or "*quality that distinguishes bureaus from other types of organization*". Dalam pengertian ini, birokrasi merujuk pada kualitas yang dihasilkan oleh suatu organisasi. Ketiga pengertian birokrasi

tersebut sering digunakan dalam berbagai kesempatan. Akan tetapi, baru menjadi jelas jika dilihat konteksnya, yakni pengertian tadi digunakan.

Seperti halnya pendapat Downs diatas, birokrasi dalam pengertiannya sesuai dengan kinerja Bappeda Kabupaten Sidoarjo:

- a) Birokrasi biasanya menunjuk suatu lembaga atau tingkatan lembaga khusus. Bappeda Kabupaten Sidoarjo sebagai sebuah birokrasi merupakan sebuah lembaga atau organisasi yang mempunyai tugas dan peraturan dalam merencanakan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.
- b) Birokrasi juga dapat berarti suatu metode tertentu untuk mengalokasikan sumber daya dalam suatu organisasi yang berskala besar. Bappeda sebagai sebuah birokrasi mempunyai berbagai tugas yang harus dikerjakan, sehingga Bappeda membagi menjadi berbagai bidang dalam menjalankan tugasnya. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam bertanggung jawab terhadap tugas salah satunya yaitu pada bidang perekonomian.
- c) Birokrasi diartikan sebagai *“bureauness”* or *“quality that distinguishes bureaus from other types of organization”*. Dalam pengertian ini, birokrasi merujuk pada kualitas yang dihasilkan oleh suatu organisasi. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang telah diberikan tugas salah satunya perekonomian, dalam rangka percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan di Kabupaten Sidoarjo membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan

Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJLSP) yang kemudian diperkuat dengan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/1137/ 404.1.3.2/2013. Dalam Keputusan Bupati tersebut, telah dibentuk dan ditetapkan tugas dari Tim koordinasi tersebut. Sehingga Tim Koordinasi memiliki tanggung jawab yang harus diselesaikan karena tugas tersebut telah tertera dalam Keputusan Bupati.

Selain itu dalam tugas Tim Koordinasi ini terdapat kesamaan dalam ciri-ciri birokrasi Weber yang dikemukakan oleh Widodo (2007:12-13) yaitu mengenai peraturan dan pengaturan mengarah pada pelaksanaan pekerjaan. Tim Koordinasi memiliki setiap tugas yang telah ditetapkan oleh Tim Fasilitasi Bappeda, sehingga Tim Koordinasi diharuskan bekerja sesuai dengan peraturan dan tugas yang telah ditetapkan.

#### **b. Struktur Organisasi**

Menurut Hidajah (2004:20), birokrasi merupakan organisasi yang memiliki ikatan-ikatan dalam bentuk peraturan dengan semangat keadilan, merata, dan stabil serta diikat oleh sebuah sistem kerja yang secara spesifik mengatur pola hubungan dan pendelegasian wewenang (*delegation authority*) secara jelas antar pejabat dalam melaksanakan tugasnya dengan disiplin kerja yang sangat tinggi.

Sama halnya dengan Bappeda Kabupaten Sidoarjo, Bappeda sebagai sebuah birokrasi mendelegasikan wewenangnya kepada Bidang



Perekonomian dan Sumber Daya Alam. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagai Tim Fasilitasi program CSR (*Corporate Social Responsibility*) juga sebagai koordinator Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJLSP) membentuk struktur organisasi dalam Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJLSP). Struktur organisasi terbagi dalam berbagai bidang, sehingga tanggung jawab dan tugas yang sesuai dengan setiap bidang dapat di delegasikan pada setiap bidang tersebut.

Dalam struktur organisasi, berdasarkan ciri-ciri birokrasi yang disebutkan oleh Weber dalam Widodo (2007:12-13) sehingga diartikan sebagai “*ideal type of organization*” terdapat beberapa kesamaan ciri-ciri tersebut dengan struktur organisasi Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJLSP):

- a. Kantor diorganisasikan secara hierarki atau adanya rangkaian komando. Dalam hal ini Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJLSP) dalam membagi berbagai tugasnya secara hierarki dan terdapat rangkaian komando, ketua sebagai kepala tim, kemudian dibawah ketua terdapat bendahara dan sekretaris yang bertanggung jawab langsung kepada ketua, dan dibawahnya lagi terdapat tiga bidang, yaitu Bidang Sosial, Bidang Fisik Prasarana, dan Bidang Pemberdayaan Ekonomi yang bertanggung jawab kepada Sekretaris dan Bendahara. Sehingga ketua

sebagai posisi teratas sebagai memiliki tanggung jawab terhadap semuanya.

- b. Pejabat manajerial dipilih dengan kualifikasi teknis yang ditentukan dengan pendidikan dan ujian. Dikarenakan anggota tim koordinasi didominasi oleh perusahaan, sehingga pejabat dalam tim tidak dipilih berdasarkan teknis yang ditentukan dengan pendidikan dan ujian. Semua kepala perusahaan langsung tergabung dalam Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJLSP).

### c. Tugas Pokok dan Fungsi

Begitu juga menurut Hidajah (2004:20), birokrasi merupakan organisasi yang memiliki ikatan-ikatan dalam bentuk peraturan dengan semangat keadilan, merata, dan stabil serta diikat oleh sebuah sistem kerja yang secara spesifik mengatur pola hubungan dan pendelegasian wewenang (*delegation authority*) secara jelas antar pejabat dalam melaksanakan tugasnya dengan disiplin kerja yang sangat tinggi.

Sama halnya dengan Bappeda Kabupaten Sidoarjo, Bappeda sebagai sebuah birokrasi mendelegasikan wewenangnya kepada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagai Tim Fasilitasi program CSR (*Corporate Social Responsibility*) juga sebagai koordinator Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

(TJLSP) membentuk struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsi masing-masing organisasi dijelaskan dalam Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJLSP). Struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsi terbagi dalam berbagai bidang, sehingga tanggung jawab dan tugas yang sesuai dengan setiap bidang dapat di delegasikan pada setiap bidang tersebut.

Kemudian dalam tugas Pokok dan Fungsi Tim Koordinasi ini juga terdapat kesamaan dalam ciri-ciri birokrasi Weber yang dikemukakan oleh Widodo (2007:12-13) yaitu mengenai adanya pembagian pekerjaan, hubungan kewenangan, dan tanggung jawab yang didefinisikan dengan jelas. Tim Fasilitasi telah membentuk tugas pokok dan fungsi Tim Koordinasi dengan jelas dan sesuai. Tim Koordinasi memiliki berbagai macam komponen, yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Bidang Sosial, Bidang Fisik Prasarana, dan Bidang Pemberdayaan Ekonomi. Tiap komponen tersebut memiliki tugas yang dan kewenangan yang berbeda tapi saling berhubungan satu sama lain. Dengan adanya tugas dan kewenangan yang berbeda maka juga memiliki tanggung jawab yang berbeda yang telah didefinisikan dengan jelas.

#### **d. Mekanisme (*Macro Process*) Program Pembangunan Inklusif dan Partisipatif Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJLSP)**

Sesuai dengan mekanisme dan penguatan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Perusahaan (TJLSP) yang lainnya, dalam hal mekanisme proses sesuai dengan pendapat Hidajah (2004:20) yang menyatakan bahwa birokrasi merupakan organisasi yang memiliki ikatan-ikatan dalam bentuk peraturan dengan semangat keadilan, merata, dan stabil serta diikat oleh sebuah sistem kerja yang secara spesifik mengatur pola hubungan dan pendelegasian wewenang (*delegation authority*) secara jelas antar pejabat dalam melaksanakan tugasnya dengan disiplin kerja yang sangat tinggi.

Begitu juga dengan Bappeda Kabupaten Sidoarjo, Bappeda sebagai sebuah birokrasi mendelegasikan wewenangnya kepada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagai Tim Fasilitasi program CSR (*Corporate Social Responsibility*) juga sebagai koordinator Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJLSP) memberikan alur dan proses kerja mengenai program pembangunan inklusif dan partisipatif dalam Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJLSP).

Mekanisme program pembangunan inklusif dan partisipatif Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJLSP) menjelaskan mengenai proses kerja Tim Koordinasi sehingga tugas dan tanggung jawab masing-masing komponen dapat terselesaikan dengan baik. Hal tersebut sesuai dengan salah satu ciri birokrasi yang disebutkan oleh Weber dalam Widodo (2007:12-13) yaitu

mengenai adanya peraturan dan pengaturan yang mengarah pada pelaksanaan pekerjaan. Dengan adanya makro proses pembangunan inklusif dan partisipatif tersebut, maka proses kerja dapat berjalan secara sistematis dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.

Penguatan dan optimalisasi Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJLSP) yang disesuaikan dengan ciri-ciri Birokrasi Weber dalam Widodo (2007:12-13), tidak semua sesuai dengan ciri-ciri tersebut. Terdapat enam ciri yang disampaikan oleh Weber, namun hanya terdapat 4 ciri yang sesuai dalam penguatan dan optimalisasi Tim Koordinasi. Ciri yang tidak sesuai dengan Tim Koordinasi adalah hubungan antar manajer dengan karyawan berbentuk impersonal dan juga pegawai yang berorientasi pada karier dan mendapatkan gaji yang tepat.

### **3) Penguatan dan Optimalisasi**

Berdasarkan definisi partisipasi yang dikemukakan oleh Prof. Santoso S. Hamidjojo menyatakan bahwa untuk mencapai perubahan yang mengarah kepada perbaikan diperlukan suatu strategi sebagai pola penentuan serangkaian tujuan-tujuan dari perubahan yang diinginkan dengan partisipasi sosial. Strategi itu mencakup konsepsi atau partisipasi tentang masukan materi perubahan (inovasi/dengan dana dan tenaga yang dianggap paling efektif dan efisien dan dituangkan dalam sistem untuk menimbulkan perubahan ke arah perbaikan). Demikian dikemukakanya tentang obyek partisipasi yang dapat terbentuk menyeluruh seperti program

pembangunan yang terpadu dan juga bentuk yang terbatas berupa proyek kegiatan pembangunan yang sederhana.

Bappeda Kabupaten Sidoarjo untuk dapat mencapai perubahan yang mengarah kepada perbaikan yaitu untuk mengoptimalkan pelaksanaan program CSR (*Corporate Social Responsibility*) di Kabupaten Sidoarjo serta percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan di Kabupaten Sidoarjo, maka Bappeda melakukan partisipasi dengan memberikan tenaganya melalui evaluasi yang dilakukan setelah setahun memberikan sosialisasi dan dilihat hasil kinerjanya, sehingga Bappeda dapat memberikan penguatan dan optimalisasi kepada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Sidoarjo untuk dapat lebih berinteraksi dan berkoordinasi dengan Tim Koordinasi, selain itu Bappeda akan memberikan dana kepada Tim Koordinasi, dikarenakan selama tahun 2013 lalu Bappeda hanya memberikan dana hanya untuk rapat saja. Sehingga partisipasi yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Sidoarjo ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Bappeda telah menjalankan fungsinya dalam perencanaan pembangunan dengan melakukan perannya sebagai perencana, sebagai koordinasi, sebagai pengevaluasi dalam pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kecamatan. Selain itu, tujuan dan sasaran dibentuknya Tim Koordinasi sesuai dengan manfaat koordinasi, dan sesuai dengan unsur-unsur pembangunan. Selain

itu Tim Fasilitasi CSR dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan tujuan koordinasi.

Mekanisme prosedur dalam pembentukan Tim Koordinasi dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah publik karena pelaksanaan program CSR di kabupaten Sidoarjo belum optimal dan belum tepat sasaran. Selain itu, Bappeda melakukan kajian pada tahun 2012 telah melakukan partisipasinya sesuai dengan unsur yang ada, kemudian melakukan pembentukan regulasi pada tahun 2013 sesuai tipe ideal birokrasi, dan melakukan optimalisasi dan penguatan pada tahun 2014 sehingga partisipasi Bappeda berjalan efektif dan efisien. Semua hal di atas sesuai dengan tujuan dan manfaat koordinasi yang dilaksanakan.

## **2. Koordinasi Antar Bappeda dengan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)**

Menurut David R. Hompton yang dikutip oleh Moekijat (1994:5) menyatakan bahwa agar pelaksanaan pekerjaan menjadi sukses maka organisasi memerlukan penyatupaduan sumbangan dari unit-unit khusus. Untuk tujuan kita, ini yang disebut koordinasi. Koordinasi antara Bappeda dengan setiap Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJLSP) sangatlah diperlukan untuk mencapai tujuan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan di Kabupaten Sidoarjo yang telah ditetapkan, sehingga pelaksanaan pekerjaan dalam Bappeda itu sendiri menjadi sukses.

Selain itu, Koordinasi antara Bappeda dengan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) sesuai dengan koordinasi ketergantungan yang menyatu (*pooled interdependent*). Maksud dari ketergantungan dalam koordinasi ini adalah bila satuan-satuan organisasi tidak saling tergantung satu dengan yang lain dalam melaksanakan kegiatan harian tetapi tergantung kepada pelaksanaan kerja setiap satuan yang memuaskan untuk suatu hasil akhir. Bappeda melakukan peran koordinasinya dengan mengkoordinasikan seluruh tugas dan kegiatan CSR Kecamatan kepada Tim Koordinasi Kecamatan, sehingga Bappeda sebagai penanggung jawab utama terhadap semua Tim Koordinasi Kecamatan untuk mencapai satu tujuan akhir dalam perluasan dan percepatan pembangunan.

**a) Koordinasi dengan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kecamatan Waru**

**1) Susunan Anggota**

Susunan anggota Tim Koordinasi Kecamatan Waru diatas dibentuk oleh Bappeda melalui Keputusan Bupati Kabupaten Sidoarjo nomor 118 tahun 2013. Dalam susunan anggota tersebut terdiri dari pemerintah yang memiliki jabatan sebagai sekretaris II, kemudian ada tokoh masyarakat sebagai anggota bidang, dan anggota penting lain yang didominasi oleh perwakilan perusahaan-perusahaan di Kabupaten Sidoarjo.



Dengan dibentuknya susunan anggota Tim Koordinasi Kecamatan Waru yang telah disebutkan, hal tersebut sesuai dengan unsur dalam *Good Governance*. Menurut Taschereau dan Champos, 1997; UNDP, 1997 dalam Thoha yang dikutip oleh Endarti (2003:119), dalam penyelenggaraan *governance* melibatkan tiga unsur utama (domain), yaitu *state* (negara atau pemerintahan), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha), dan *society* (masyarakat), yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing.

Dengan terbentuknya susunan anggota Tim Koordinasi kecamatan Waru yang terdiri dari unsur pemerintah sebagai Sekretaris II, unsur swasta yang didalamnya banyak terlibat dalam susunan anggota, kemudian yang terakhir tokoh masyarakat sebagai unsur masyarakat dalam *Governance*, maka dirasa pelaksanaan *governance* Tim Koordinasi Kecamatan Waru memiliki ketiga unsur utama *governance* yang sesuai.

## 2) Koordinasi dan Integrasi antar Anggota

Menurut Harold Koontz, Cyril O'Donnell, dan Heinz Wehrich yang dikutip oleh Moekijat (1994:3) Koordinasi merupakan pencapaian keselarasan dari usaha individu dan kelompok kearah pencapaian maksud dan tujuan kelompok. Selain itu, Moekijat (1994:2) juga menyebutkan bahwa koordinasi adalah penyelarasan secara teratur atau penyusunan kembali kegiatan-kegiatan yang saling bergantung dari individu-individu untuk mencapai tujuan bersama. Koordinasi berhubungan dengan tugas menyatupadukan kegiatan-kegiatan guna menjamin suksesnya pencapaian tujuan. Selain itu koordinasi berhubungan dengan keefektifan organisasi dan unit-unitnya.

Sesuai dengan maksud dari adanya koordinasi diatas, yaitu sebagai penyatu kegiatan yang saling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, maka Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kecamatan Waru tidak dapat mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan yaitu percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan di Kabupaten Sidoarjo sebagai upaya harmonisasi dan sinergi program antara dunia usaha dengan Pemerintah Daerah melalui program kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR), hal tersebut dikarenakan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kecamatan Waru tidak menjalankan koordinasinya dengan baik.

Kemudian menurut Tripathy dan Reddy (1983) dalam Moekijat (1994) ada 9 syarat yang disesuaikan dengan koordinasi Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kecamatan Waru untuk mencapai koordinasi yang efektif, yakni:

a. Hubungan langsung

Dikarenakan tidak adanya hubungan langsung yang dapat tersalurkan diantara setiap anggota Tim Koordinasi Kecamatan Waru, maka koordinasi dikatakan kurang efektif.

b. Kesempatan awal

Tidak adanya rapat dan koordinasi diantara sesama anggota Tim Koordinasi Kecamatan Waru, maka koordinasi menjadi lebih sulit.

c. Kontinuitas

Koordinasi yang dinyatakan sebagai struktur organisasi, berjalan tidak sesuai dengan proses yang bersifat kesinambungan dalam Tim Koordinasi Kecamatan Waru, sehingga koordinasi dinyatakan tidak efektif.

d. Dinamisme

Koordinasi yang tidak berjalan dengan sesuai dalam Tim Koordinasi Kecamatan Waru yang telah disebutkan diatas, maka koordinasi yang terjadi tidak dapat berjalan sesuai yang diharapkan maupun koordinasi yang mampu mengikuti perubahan.

e. Tujuan yang jelas

Adanya tujuan yang ingin dicapai dalam Tim Koordinasi Kecamatan Waru, namun tidak dijalankan dengan baik dan sesuai maka sama saja koordinasi yang ada tidak berjalan dengan efektif.

e. Organisasi yang sederhana

Struktur organisasi yang ada pada Tim Koordinasi Kecamatan Waru memang sederhana, hanya saja anggota di dalamnya tidak bekerja sesuai dengan tugas yang ada, sehingga koordinasi juga berjalan tidak sesuai.

f. Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas

Wewenang dan tanggung jawab yang diberikan telah dijabarkan dan dijelaskan dengan baik kepada masing-masing anggota Tim Koordinasi Kecamatan Waru sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat terlaksana, hanya saja koordinasi di dalamnya tidak berjalan dengan baik, sehingga sama saja koordinasi tidak berjalan dengan efektif.

g. Komunikasi yang efektif

Komunikasi merupakan salah satu persyaratan koordinasi yang efektif, sehingga semua dapat berkoordinasi satu sama lain dengan baik, hanya saja komunikasi yang terjadi pada Tim Koordinasi Kecamatan Waru tidak berjalan dengan baik, oleh karena berimbas juga pada tim koordinasi tersebut menjadi tidak efektif.

h. **Kepemimpinan dan supervisi yang efektif**

Suksesnya koordinasi banyak dipengaruhi oleh hakikat kepemimpinan dan supervisi. Kepemimpinan yang efektif menjamin koordinasi kegiatan orang-orang, baik pada tingkat perencanaan, maupun pelaksanaan. Hanya saja yang terjadi adalah tidak adanya kesadaran akan tanggung jawab yang dimiliki oleh pemimpin, sehingga berimbas juga pada anggota lain yang ada pada Tim Koordinasi Kecamatan Waru, maka koordinasi yang ada menjadi tidak efektif.

Telah disebutkan syarat-syarat koordinasi menurut Tripathy dan Reddy dalam Moekijat (1994) diatas. Berdasarkan syarat-syarat koordinasi yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa koordinasi yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Kecamatan Waru semua tidak sesuai dengan syarat-syarat koordinasi yang disebutkan, sehingga koordinasi yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Kecamatan Waru dianggap tidak efektif.

**3) Koordinasi dengan Bappeda**

Dalam menjalankan koordinasi ada beberapa jenis koordinasi yang diterapkan dalam organisasi. Menurut Hasibuan (2005:86-87) ada dua jenis koordinasi, yaitu koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal. Koordinasi

vertikal (*vertical coordination*). Merupakan kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada dibawah wewenang dan tanggung jawabnya. Sedangkan koordinasi horisontal (*horizontal coordination*) yaitu mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi (aparatus) setingkat.

Menurut jenis koordinasi yang diterapkan antara Bappeda dengan Tim Koordinasi Kecamatan Waru merupakan jenis koordinasi vertikal. Hal tersebut dikarenakan Bappeda merupakan sebuah unit kerja yang bekerja diatas setiap Tim Koordinasi, karena Bappeda memiliki tugas sebagai koordinator setiap Tim Koordinasi yang ditempatkan di setiap kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Sehingga hubungan koordinasi antara Bappeda dengan Tim Koordinasi Kecamatan Waru merupakan jenis koordinasi vertikal.

Kemudian menurut Harold Koontz, Cyril O'Donnell, dan Heinz Weihrich yang dikutip oleh Moekijat (1994:3) koordinasi merupakan pencapaian keselarasan dari usaha individu dan kelompok ke arah pencapaian maksud dan tujuan kelompok. Bappeda Kabupaten Sidoarjo melalui Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kecamatan Waru bersama-sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai upaya percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan di Kabupaten Sidoarjo

sebagai upaya harmonisasi dan sinergi program antara dunia usaha dengan Pemerintah Daerah melalui program kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Hanya saja yang terjadi adalah koordinasi antara pihak Tim Koordinasi Kecamatan Waru dengan Bappeda Kabupaten Sidoarjo tidak memiliki keselarasan satu sama lain dan tidak berjalan dengan sesuai, hal tersebut terjadi dikarenakan banyaknya perusahaan yang tidak melapor ke Tim Koordinasi Kecamatan Waru terlebih dahulu melainkan langsung melaporkannya ke Bappeda. Hal tersebut membuat pencapaian maksud dan tujuan kelompok yang telah ditetapkan diatas tidak dapat tercapai dengan baik.

Selain itu, mengutip Moekijat (1994:34), tujuan dari koordinasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut yang disesuaikan dengan koordinasi antara Bappeda dengan Tim Koordinasi Kecamatan Waru:

- a) Koordinasi bertujuan untuk menyatupadukan seluruh kegiatan untuk menjamin tercapainya suatu tujuan. Tidak adanya penyatupaduan antara kegiatan yang satu dan kegiatan lain yang telah ditetapkan, membuat Tim Koordinasi dengan Bappeda tidak dapat menjamin untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan bersama.
- b) Dengan adanya koordinasi maka memungkinkan hasil pekerjaan secara keseluruhan menjadi lebih maksimal. Seperti yang telah disebutkan diatas, koordinasi antara Bappeda dengan Tim Koordinasi Kecamatan Waru tidak berjalan dengan baik dan sesuai, sehingga hasil pekerjaan yang dicapai menjadi tidak maksimal.

- c) Dengan dilakukannya koordinasi maka organisasi menjadi lebih efektif. Diarenkan tidak adanya koordinasi antara Bappeda dengan Tim Koordinasi Kecamatan Waru, maka keefektifan organisasi dinyatakan kurang.

Berdasarkan tujuan koordinasi yang dikutip oleh Moekijat diatas, menyebutkan bahwa setiap koordinasi Bappeda dengan Tim Koordinasi Kecamatan Waru berjalan tidak sesuai, sehingga bisa dikatakan bahwa koordinasi yang dilakukan antara Bappeda dengan Tim Koordinasi Kecamatan Waru tidak sesuai dengan tujuan koordinasi.

#### 4) Hasil Kinerja

Menurut Adisasmita yang ditulis oleh Zamhariri (2008:102), menyebutkan bahwa pembangunan masyarakat diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, dimana mereka mampu mengidentifikasi kebutuhan dan masalah secara bersama, namun pakar lain memberikan batasan bahwa pembangunan masyarakat adalah perpaduan antara pembangunan sosial ekonomi dan pengorganisasian masyarakat.

Namun, dikarenakan belum adanya koordinasi dan integrasi diantara anggota Tim Koordinasi, maka kinerja Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kecamatan Waru dirasa masih belum maksimal, hal tersebut dikarenakan setiap anggota dalam Tim Koordinasi (*stakeholders*) tidak melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya, yang kemudian berakibat pada tidak tercapainya tujuan Tim Koordinasi yang sebenarnya, yaitu pembangunan tidak

dapat diketahui laporannya secara signifikan oleh Tim Koordinasi sehingga tujuan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan tidak tercapai.

Berdasarkan pendapat Adisasmitha yang ditulis oleh Zamhariri di atas, pembangunan masyarakat di Kecamatan Waru tidak tercipta dengan baik. Hal tersebut dikarenakan pembangunan masyarakat dimana seharusnya masyarakat Kecamatan Waru mampu mengidentifikasi kebutuhan dan masalah secara bersama, namun yang terjadi adalah banyak perusahaan yang tetap saja melaksanakan program TJSLP/CSR nya tanpa melibatkan masyarakat sekitar, mereka langsung melaksanakan sendiri program TJSLP/CSR tanpa dikoordinasikan terlebih dahulu kepada Tim Koordinasi Kecamatan Waru. Sehingga hasil kinerja mengenai pembangunan masyarakat dari Tim Koordinasi Kecamatan Waru tidak tampak.

Kemudian dalam Fahrudin (2011:24-25), pengembangan masyarakat juga mempunyai nilai-nilai yang menentukan fokusnya, berikut merupakan nilai-nilai pengembangan masyarakat di Kecamatan Waru dikaitkan dengan kinerja dari Tim Koordinasi Kecamatan Waru, yaitu antara lain:

- a. Masyarakat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam menentukan keputusan-keputusan yang mampu mempengaruhi kesejahteraan mereka. Masyarakat Kecamatan Waru tidak dilibatkan partisipasinya dalam menentukan keputusan yang mampu mempengaruhi kesejahteraan mereka. Banyak perusahaan di Kecamatan waru yang langsung menjalankan program



TJSLP/CSRnya tanpa berdiskusi dulu dengan masyarakat melalui Tim Koordinasi Kecamatan Waru.

- b. Kebebasan berpartisipasi merupakan suatu cara yang sangat berharga dalam mengendalikan berbagai persoalan masyarakat. Masyarakat di Kecamatan Waru tidak memiliki kebebasan berpartisipasi dalam mengendalikan persoalan yang dihadapinya sendiri.
- c. Masyarakat mempunyai hak untuk berusaha menciptakan lingkungan yang mereka inginkan. Begitupun dengan hak untuk menciptakan lingkungan yang diinginkan, masyarakat di Kecamatan Waru tidak menyalurkan haknya dengan benar.
- d. Masyarakat mempunyai hak untuk menolak suatu lingkungan yang dipaksakan dari luar. Perusahaan yang hendak melaksanakan program TJSLP/CSRnya langsung memberikannya begitu saja kepada masyarakat tanpa didiskusikan terlebih dahulu dengan mereka, sehingga apabila terdapat program yang tidak tepat sasaran bagi masyarakat Kecamatan Waru, maka masyarakat tidak bisa langsung menolaknya.
- e. Peningkatan suatu interaksi manusia dalam suatu masyarakat akan menumbuhkan potensi bagi pengembangan aspek kemanusiaan. Kurangnya interaksi yang terjadi antar masyarakat di Kecamatan Waru menyebabkan kurangnya potensi yang tumbuh bagi pengembangan aspek kemanusiaan.
- f. Tercakup dalam suatu proses interaksi ialah suatu konsep atau pengertian tentang “masyarakat” yang selalu meluas. Yang berkerja dan berinteraksi dalam pembangunan hanyalah perusahaan-perusahaan di Kecamatan Waru,

mereka bekerja sendiri tanpa melibatkan masyarakat maupun pemerintah, sehingga kurang terjadi suatu proses interkasi yang berarti.

- g. Setiap disiplin atau profesi merupakan suatu kontribusi yang sangat berharga (potensial) bagi proses pengembangan masyarakat. Kurangnya kontribusi Tim koordinasi Kecamatan Waru yang tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan, menyebabkan proses pengembangan masyarakat menjadi terhambat.
- h. Motivasi diciptakan dalam diri manusia oleh pergaulan dengan lingkungan. Kurangnya pergaulan antara setiap anggota yaitu, pemerintah, swasta, maupun masyarakat menyebabkan kurangnya motivasi untuk menciptakan pengembangan masyarakat.
- i. Pengembangan masyarakat berkepentingan dengan pengembangan kemampuan manusia dalam mengatasi masalah-masalah di lingkungannya. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, banyaknya perusahaan di Kecamatan Waru yang memberikan program TJSPL/CSRnya langsung kepada masyarakat tanpa mendiskusikan terlebih dahulu dengan masyarakat menjadikan hal tersebut mengurangi pengembangan kemampuan manusia di Kecamatan Waru dalam menangani masalah-masalah di lingkungannya sendiri. Sehingga hal tersebut membuat pengembangan masyarakat di Kecamatan Waru menjadi terhambat.

Berdasarkan nilai-nilai pengembangan masyarakat menurut Fahrudin (2011:24-25) diatas, dapat dinyatakan bahwa pengembangan masyarakat di Kecamatan Waru bisa dikatakan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada

pengembangan masyarakat. Sehingga pengembangan masyarakat di Kecamatan Waru dinyatakan tidak tepat.

**b) Koordinasi dengan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kecamatan Sidoarjo**

**1) Susunan Anggota**

Sama halnya dengan susunan anggota Tim Koordinasi Kecamatan Waru, susunan anggota Tim Koordinasi Kecamatan Sidoarjo diatas juga dibentuk oleh Bappeda melalui Keputusan Bupati Kabupaten Sidoarjo nomor 118 tahun 2013. Dalam susunan anggota tersebut terdiri dari pemerintah yang memiliki jabatan sebagai sekretaris II, kemudian ada tokoh masyarakat sebagai anggota bidang, dan anggota penting lain yang didominasi oleh perwakilan perusahaan-perusahaan di Kabupaten Sidoarjo.

Dengan dibentuknya susunan anggota Tim Koordinasi Kecamatan Sidoarjo yang telah disebutkan, hal tersebut sesuai dengan unsur dalam *Good Governance*. Menurut Taschereau dan Champos, 1997; UNDP, 1997 dalam Thoha yang dikutip oleh Endarti (2003:119), dalam penyelenggaraan *governance* melibatkan tiga unsur utama (domain), yaitu *state* (negara atau pemerintahan), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha), dan *society* (masyarakat), yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing.

Dengan terbentuknya susunan anggota Tim Koordinasi Kecamatan Sidoarjo yang terdiri dari unsur pemerintah sebagai Sekretaris II, unsur swasta yang didalamnya banyak terlibat dalam susunan anggota, kemudian yang terakhir tokoh

masyarakat sebagai unsur masyarakat dalam *Governance*, maka dirasa pelaksanaan *governance* Tim Koordinasi Kecamatan Sidoarjo juga sama halnya dengan Tim Koordinasi Kecamatan Waru yang memiliki ketiga unsur utama *governance* yang sesuai.

## 2) Koordinasi dan Integrasi antar Anggota

Menurut Harold Koontz, Cyril O'Donnell, dan Heinz Weihrich yang dikutip oleh Moekijat (1994:3) Koordinasi merupakan pencapaian keselarasan dari usaha individu dan kelompok ke arah pencapaian maksud dan tujuan kelompok. Selain itu, Moekijat (1994:2) juga menyebutkan bahwa koordinasi adalah penyelarasan secara teratur atau penyusunan kembali kegiatan-kegiatan yang saling bergantung dari individu-individu untuk mencapai tujuan bersama. Koordinasi berhubungan dengan tugas menyatupadukan kegiatan-kegiatan guna menjamin suksesnya pencapaian tujuan. Selain itu koordinasi berhubungan dengan keefektifan organisasi dan unit-unitnya.

Sesuai dengan maksud dari adanya koordinasi diatas, yaitu sebagai penyatu kegiatan yang saling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, maka Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kecamatan Sidoarjo tidak dapat mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan yaitu percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan di Kabupaten Sidoarjo sebagai upaya harmonisasi dan sinergi program antara dunia usaha dengan Pemerintah Daerah melalui program kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR), hal tersebut dikarenakan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab

Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kecamatan Sidoarjo tidak menjalankan koordinasinya dengan baik.

Kemudian menurut Tripathy dan Reddy (1983) dalam Moekijat (1994) ada 9 syarat yang disesuaikan dengan koordinasi Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kecamatan Sidoarjo untuk mencapai koordinasi yang efektif, yakni:

1.) Hubungan langsung

Dikarenakan tidak adanya hubungan langsung yang dapat tersalurkan diantara setiap anggota Tim Koordinasi Kecamatan Sidoarjo, maka koordinasi dikatakan kurang efektif.

2.) Kesempatan awal

Tidak adanya rapat dan koordinasi diantara sesama anggota Tim Koordinasi Kecamatan Sidoarjo, maka koordinasi menjadi lebih sulit.

3.) Kontinuitas

Koordinasi yang dinyatakan sebagai struktur organisasi, berjalan tidak sesuai dengan proses yang bersifat kesinambungan dalam Tim Koordinasi Kecamatan Sidoarjo, sehingga koordinasi dinyatakan tidak efektif.

4.) Dinamisme

Koordinasi yang tidak berjalan dengan sesuai dalam Tim Koordinasi Kecamatan Sidoarjo yang telah disebutkan diatas, maka koordinasi yang terjadi tidak dapat berjalan sesuai yang diharapkan maupun koordinasi yang mampu mengikuti perubahan.

5.) Tujuan yang jelas

Memang terdapat tujuan yang ingin dicapai dalam Tim Koordinasi Kecamatan Sidoarjo, namun tidak dijalankan dengan baik dan sesuai maka sama saja koordinasi yang ada tidak berjalan dengan efektif.

6.) Organisasi yang sederhana

Struktur organisasi yang ada pada Tim Koordinasi Kecamatan Sidoarjo memang sederhana, hanya saja anggota di dalamnya tidak bekerja sesuai dengan tugas yang ada, sehingga koordinasi juga berjalan tidak sesuai dan tidak efektif.

7.) Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas

Wewenang dan tanggung jawab yang diberikan telah dijabarkan dan dijelaskan dengan baik kepada masing-masing anggota Tim Koordinasi Kecamatan Sidoarjo, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat terlaksana, hanya saja koordinasi di dalamnya tidak berjalan dengan baik, sehingga sama saja koordinasi tidak berjalan dengan efektif.

8.) Komunikasi yang efektif

Komunikasi merupakan salah satu persyaratan koordinasi yang efektif, sehingga semua dapat berkoordinasi satu sama lain dengan baik, hanya saja komunikasi yang terjadi pada Tim Koordinasi Kecamatan Sidoarjo tidak berjalan dengan baik, oleh karena berimbas juga pada tidak efektifnya koordinasi Tim Koordinasi Kecamatan Sidoarjo.

### 9.) Kepemimpinan dan supervisi yang efektif

Suksesnya koordinasi banyak dipengaruhi oleh hakikat kepemimpinan dan supervisi. Kepemimpinan yang efektif menjamin koordinasi kegiatan orang-orang, baik pada tingkat perencanaan, maupun pelaksanaan. Hanya saja yang terjadi adalah tidak adanya kesadaran akan tanggung jawab yang dimiliki oleh pemimpin, sehingga berimbas juga pada anggota lain yang ada pada Tim Koordinasi Kecamatan Sidoarjo, maka koordinasi yang ada menjadi tidak efektif.

Telah disebutkan syarat-syarat koordinasi menurut Tripathy dan Reddy dalam Moekijat (1994) diatas. Berdasarkan syarat-syarat koordinasi yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa koordinasi yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Kecamatan Sidoarjo semua tidak sesuai dengan syarat-syarat koordinasi yang disebutkan, sehingga koordinasi yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Kecamatan Waru dianggap tidak efektif. Keadaan tersebut sama halnya dengan yang terjadi pada Tim Koordinasi Kecamatan Sidoarjo.

### 3) Koordinasi dengan Bappeda

Dalam menjalankan koordinasi ada beberapa jenis koordinasi yang diterapkan dalam organisasi. Menurut Hasibuan (2005:86-87) ada dua jenis koordinasi, yaitu koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal. Koordinasi vertikal (*vertical coordination*). Merupakan kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang

ada dibawah wewenang dan tanggung jawabnya. Sedangkan koordinasi horisontal (*horizontal coordination*) yaitu mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi (aparatus) setingkat.

Menurut jenis koordinasi yang diterapkan antara Bappeda dengan Tim Koordinasi Kecamatan Sidoarjo merupakan jenis koordinasi vertikal. Hal tersebut dikarenakan Bappeda merupakan sebuah unit kerja yang bekerja diatas setiap Tim Koordinasi, karena Bappeda memiliki tugas sebagai koordinator setiap Tim Koordinasi yang ditempatkan di setiap kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Sehingga hubungan koordinasi antara Bappeda dengan Tim Koordinasi Kecamatan Sidoarjo merupakan jenis koordinasi vertikal.

Kemudian menurut Harold Koontz, Cyril O'Donnell, dan Heinz Weihrich yang dikutip oleh Moekijat (1994:3) koordinasi merupakan pencapaian keselarasan dari usaha individu dan kelompok ke arah pencapaian maksud dan tujuan kelompok. Bappeda Kabupaten Sidoarjo melalui Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kecamatan Sidoarjo bersama-sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai upaya percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan di Kabupaten Sidoarjo sebagai upaya harmonisasi dan sinergi program antara dunia usaha dengan Pemerintah Daerah melalui program kegiatan *Corporate Social Responsibility*



(CSR). Hanya saja yang terjadi adalah koordinasi antara pihak Tim Koordinasi Kecamatan Sidoarjo dengan Bappeda Kabupaten Sidoarjo tidak mempunyai keseimbangan satu sama lain dan tidak berjalan dengan sesuai, hal tersebut terjadi dikarenakan memang setiap pihak dalam Tim Koordinasi Kecamatan Sidoarjo tidak berjalan sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Hal tersebut membuat pencapaian maksud dan tujuan kelompok yang telah ditetapkan diatas tidak dapat tercapai dengan baik.

Selain itu, mengutip Moekijat (1994:34), tujuan dari koordinasidapat diklasifikasikan sebagai berikut yang disesuaikan dengan koordinasi antara Bappeda dengan Tim Koordinasi Kecamatan Sidoarjo:

- 1) Koordinasi bertujuan untuk menyatupadukan seluruh kegiatan untuk menjamin tercapainya suatu tujuan. Tidak adanya penyatupaduan antara kegiatan yang satu dan kegiatan lain yang telah ditetapkan, membuat Tim Koordinasi dengan Bappeda tidak dapat menjamin untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan bersama.
- 2) Dengan adanya koordinasi maka memungkinkan hasil pekerjaan secara keseluruhan menjadi lebih maksimal. Seperti yang telah disebutkan diatas, koordinasi antara Bappeda dengan Tim Koordinasi Kecamatan Sidoarjo tidak berjalan dengan baik dan sesuai, sehingga hasil pekerjaan yang dicapai menjadi tidak maksimal.
- 3) Dengan dilakukannya koordinasi maka organisasi menjadi lebih efektif. Dikarenakan tidak adanya koordinasi antara Bappeda dengan Tim Koordinasi Kecamatan Sidoarjo, maka keefektifan organisasi dinyatakan kurang.

Berdasarkan tujuan koordinasi yang dikutip oleh Moekijat diatas, menyebutkan bahwa setiap koordinasi Bappeda dengan Tim Koordinasi Kecamatan Sidoarjo berjalan tidak sesuai, sehingga bisa dikatakan bahwa koordinasi yang dilakukan antara Bappeda dengan Tim Koordinasi Kecamatan Waru tidak sesuai dengan tujuan koordinasi.

#### 4) Hasil Kinerja

Menurut Adisasmita yang ditulis oleh Zamhariri (2008:102), menyebutkan bahwa pembangunan masyarakat diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, dimana mereka mampu mengidentifikasi kebutuhan dan masalah secara bersama, namun pakar lain memberikan batasan bahwa pembangunan masyarakat adalah perpaduan antara pembangunan sosial ekonomi dan pengorganisasian masyarakat.

Namun, dikarenakan belum adanya koordinasi dan integrasi diantara anggota Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kecamatan Sidoarjo, maka kinerja Tim Koordinasi Kecamatan Sidoarjo dirasa masih belum optimal, hal tersebut dikarenakan setiap anggota dalam Tim Koordinasi (*stakeholders*) tidak melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya, yang kemudian berakibat pada tidak tercapainya tujuan Tim Koordinasi yang sebenarnya, yaitu pembangunan tidak dapat diketahui laporannya secara signifikan oleh Tim Koordinasi sehingga tujuan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan tidak tercapai.

Berdasarkan pendapat Adisasmita yang ditulis oleh Zamhariri diatas, pembangunan masyarakat di Kecamatan Sidoarjo tidak terlaksana dengan baik. Hal tersebut dikarenakan pembangunan masyarakat dimana seharusnya masyarakat Kecamatan Sidoarjo mampu mengidentifikasi kebutuhan dan masalah secara bersama, namun yang terjadi adalah setiap anggota dalam Tim Koordinasi Kecamatan Sidoarjo tidak melaksanakan tugasnya sesuai tanggung jawab, sehingga hasil kinerja mengenai pembangunan masyarakat dari Tim Koordinasi Kecamatan Sidoarjo tidak tampak. Selain itu, banyak perusahaan yang tetap saja melaksanakan program TJS/SLP/CSR nya tanpa melibatkan masyarakat sekitar, mereka langsung melaksanakan sendiri program TJS/SLP/CSR tanpa dikoordinasikan terlebih dahulu kepada Tim Koordinasi Kecamatan Sidoarjo.

Kemudian dalam Fahrudin (2011:24-25), pengembangan masyarakat juga mempunyai nilai-nilai yang menentukan fokusnya, berikut merupakan nilai-nilai pengembangan masyarakat di Kecamatan Sidoarjo dikaitkan dengan kinerja dari Tim Koordinasi Kecamatan Sidoarjo, yaitu antara lain:

- a. Masyarakat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam menentukan keputusan-keputusan yang mampu mempengaruhi kesejahteraan mereka. Masyarakat Kecamatan Sidoarjo tidak dilibatkan partisipasinya dalam menentukan keputusan yang mampu mempengaruhi kesejahteraan mereka. Hal tersebut dikarenakan tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi Kecamatan Sidoarjo tidak dilaksanakan dengan baik, sehingga masyarakat secara tidak langsung tidak dilibatkan partisipasinya dalam menentukan

keputusan, masyarakat Kecamatan Sidoarjo langsung menerima program TJSLP/CSR yang diberikan oleh perusahaan.

- b. Kebebasan berpartisipasi merupakan suatu cara yang sangat berharga dalam mengendalikan berbagai persoalan masyarakat. Masyarakat di Kecamatan Sidoarjo tidak memiliki kebebasan berpartisipasi dalam mengendalikan persoalan yang dihadapinya sendiri.
- c. Masyarakat mempunyai hak untuk berusaha menciptakan lingkungan yang mereka inginkan. Begitupun dengan hak untuk menciptakan lingkungan yang diinginkan, masyarakat di Kecamatan Sidoarjo tidak menyalurkannya dengan benar.
- d. Masyarakat mempunyai hak untuk menolak suatu lingkungan yang dipaksakan dari luar. Perusahaan yang hendak melaksanakan program TJSLP/CSRnya langsung memberikannya begitu saja kepada masyarakat tanpa didiskusikan terlebih dahulu dengan mereka, sehingga apabila terdapat program yang tidak tepat sasaran bagi masyarakat Kecamatan Sidoarjo, maka masyarakat tidak bisa langsung menolaknya.
- e. Peningkatan suatu interaksi manusia dalam suatu masyarakat akan menumbuhkan potensi bagi pengembangan aspek kemanusiaan. Kurangnya interaksi yang terjadi antar masyarakat di Kecamatan Sidoarjo menyebabkan kurangnya potensi yang tumbuh bagi pengembangan aspek kemanusiaan.
- f. Tercakup dalam suatu proses interaksi ialah suatu konsep atau pengertian tentang “masyarakat” yang selalu meluas. Tugas dan tanggung jawab setiap anggota Tim Koordinasi Kecamatan Sidoarjo belum berjalan dengan sesuai

sehingga koordinasi dan integrasi diantara setiap anggota tidak berjalan dengan baik. Dikarenakan, anggota yang terdiri dari pemerintah, swasta, dan tokoh masyarakat tidak memiliki interaksi dan komunikasi antar satu sama lain.

- g. Setiap disiplin atau profesi merupakan suatu kontribusi yang sangat berharga (potensi) bagi proses pengembangan masyarakat. Kurangnya kontribusi Tim koordinasi Kecamatan Sidoarjo yang tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan, menyebabkan proses pengembangan masyarakat menjadi terhambat.
- h. Motivasi diciptakan dalam diri manusia oleh pergaulan dengan lingkungan. Kurangnya pergaulan antara setiap anggota yaitu, pemerintah, swasta, maupun masyarakat menyebabkan kurangnya motivasi untuk menciptakan pengembangan masyarakat.
- i. Pengembangan masyarakat berkepentingan dengan pengembangan kemampuan manusia dalam mengatasi masalah-masalah di lingkungannya. Pengembangan kemampuan manusia di wilayah Kecamatan Sidoarjo dinyatakan kurang sehingga tidak bisa mengatasi masalah-masalah di lingkungannya sendiri. Hal tersebut dikarenakan tugas dan tanggung jawab Tim Koodinasi Kecamatan Sidoarjo tidak terlaksana dengan baik, selain itu juga banyak perusahaan yang langsung memberikan program TJSLP/CSRnya kepada masyarakat tanpa dirundingkan terlebih dahulu dengan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan masyarakat di Kecamatan Sidoarjo kurang terealisasi.

Berdasarkan nilai-nilai pengembangan masyarakat menurut Fahrudin (2011:24-25) diatas, dapat dinyatakan bahwa pengembangan masyarakat di Kecamatan Sidoarjo bisa dikatakan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada pengembangan masyarakat. Sehingga pengembangan masyarakat di Kecamatan Sidoarjo dikarenakan kinerja Tim Koordinasi Kecamatan Sidoarjo yang belum sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya menyebabkan pengembangan masyarakat di Kecamatan Sidoarjo menjadi tidak tampak dan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada.

**c) Koordinasi dengan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kecamatan Jabon**

**1) Susunan Anggota**

Sama halnya dengan susunan anggota Tim Koordinasi Kecamatan Waru dan Kecamatan Sidoarjo, susunan anggota Tim Koordinasi Kecamatan Jabon diatas juga dibentuk oleh Bappeda melalui Keputusan Bupati Kabupaten Sidoarjo nomor 118 tahun 2013. Dalam susunan anggota tersebut terdiri dari pemerintah yang memiliki jabatan sebagai sekretaris II, kemudian ada tokoh masyarakat sebagai anggota bidang, dan anggota penting lain yang didominasi oleh UMKM karena banyaknya jumlah UMKM di Kecamatan Jabon dan terdapat 2 perusahaan besar di Kecamatan Jabon.

Dengan dibentuknya susunan anggota Tim Koordinasi Kecamatan Jabon yang telah disebutkan, hal tersebut sesuai dengan unsur dalam *Good Governance*. Menurut Taschereau dan Champos, 1997; UNDP, 1997 dalam Thoha yang dikutip

oleh Endarti (2003:119), dalam penyelenggaraan *governance* melibatkan tiga unsur utama (domain), yaitu *state* (negara atau pemerintahan), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha), dan *society* (masyarakat), yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing.

Dengan terbentuknya susunan anggota Tim Koordinasi Kecamatan Jabon yang terdiri dari unsur pemerintah sebagai Sekretaris II, unsur swasta yang terdiri dari perusahaan dan UMKM yang didalamnya banyak terlibat dalam susunan anggota, kemudian yang terakhir tokoh masyarakat sebagai unsur masyarakat dalam *Governance*, maka dirasa pelaksanaan *governance* Tim Koordinasi Kecamatan Jabon juga sama halnya dengan Tim Koordinasi Kecamatan Waru dan Kecamatan Sidoarjo yang memiliki ketiga unsur utama *governance* yang sesuai.

## 2) Koordinasi dan Integrasi antar Anggota

Berbeda dengan Tim Koordinasi Kecamatan Waru dan Tim Koordinasi Kecamatan Sidoarjo yang telah disebutkan diatas. Dengan adanya tugas pokok dan fungsi yang telah dibentuk oleh Bappeda Kabupaten Sidoarjo, Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kecamatan Jabon dirasa sudah menjalankan kinerjanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing hal tersebut terbukti bahwa Tim Koordinasi Kecamatan Jabon telah mengadakan rapat dan pertemuan beberapa kali untuk melakukan koordinasi dan membicarakan mengenai program yang akan dilakukan dalam rangka melakukan percepatan pembangunan. Setiap anggota di dalam Tim Koordinasi Kecamatan Jabon yang

terdiri dari pemerintah, swasta, dan masyarakat telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Sondang P. Siagian yang dikutip Moekijat (1994:6) bahwa koordinasi adalah pengaturan tata hubungan dari usaha bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam usaha pencapaian tujuan bersama pula. Koordinasi adalah suatu proses yang mengatur agar pembagian kerja dari berbagai orang atau kelompok dapat tersusun menjadi suatu kebutuhan yang terintegrasi dengan cara yang seefisien mungkin.

Koordinasi yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Kecamatan Jabon yaitu rapat dan koordinasi bersama sebagai pengaturan tata hubungan dari usaha bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam usaha pencapaian tujuan bersama yaitu percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan di Kabupaten Sidoarjo khususnya di Kecamatan Jabon. Koordinasi dalam Tim Koordinasi Kecamatan Jabon yang mengatur setiap anggota dengan masing-masing tugas yang menjadi tanggung jawabnya telah dilaksanakan dengan baik antara pihak pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Sehingga pembagian kerja yang menjadi tanggung jawab masing-masing pihak menjadi suatu kebutuhan yang terintegrasi dengan cara yang seefisien mungkin.

Kinerja Tim Koordinasi Kecamatan Jabon juga telah sesuai dengan tujuan koordinasi yang disampaikan oleh Moekijat (1994:34) yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:



- a. Koordinasi bertujuan untuk menyatupadukan seluruh kegiatan untuk menjamin tercapainya suatu tujuan. Adanya pertemuan dan rapat diantara anggota Tim Koordinasi Kecamatan Jabon dapat menyatukan setiap kegiatan untuk menjamin tercapainya tujuan. Pemerintah sebagai penyelenggara rapat, swasta memberikan informasi mengenai program TJSLP/CSR yang menjadi tanggung jawabnya, dan masyarakat sebagai pihak yang berinisiatif untuk melakukan pembangunan melalui pembuatan proposal yang diserahkan kepada Tim Koordinasi.
- b. Dengan adanya koordinasi maka memungkinkan hasil pekerjaan secara keseluruhan menjadi lebih maksimal. Koordinasi yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Kecamatan Jabon telah dilaksanakan dengan baik dengan dilakukannya rapat dan pertemuan baik secara formal maupun tidak formal, sehingga tujuan yang ditentukan dalam rangka melakukan percepatan dan perluasan pembangunan di Kecamatan Jabon menjadi lebih maksimal.
- c. Dengan dilakukannya koordinasi maka organisasi menjadi lebih efektif. Dengan diadakannya rapat dan pertemuan antar anggota Tim Koordinasi Kecamatan Jabon sehingga dapat menyatukan kegiatan antar masing-masing anggota dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama, maka hal tersebut membuat Tim Koordinasi Kecamatan Jabon menjadi lebih efektif dalam melakukan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Dapat disimpulkan bahwa Tim Koordinasi Kecamatan Jabon telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan tujuan koordinasi yang telah disebutkan diatas. Kemudian berdasarkan jenis koordinasi Menurut Hasibuan (2005:86-87),

jenis koordinasi yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Kecamatan Jabon yaitu Koordinasi secara horisontal (*horizontal coordination*), yaitu mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi (aparatur) setingkat. Koordinasi yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Kecamatan Jabon yaitu melakukan pengkoordinasian tindakan atau kegiatan penyatuan dan pengarahan yang dilakukan antar sesama anggota yang memiliki jabatan setingkat dalam Tim Koordinasi Kecamatan Jabon yang terdiri dari pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Lalu Sutarto (2002: 152-158) menyebutkan bahwa koordinasi dalam suatu organisasi dapat dilakukan dalam berbagai cara atau bentuk. Cara atau bentuk koordinasi yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Kecamatan Jabon yaitu:

- a. Mengadakan pertemuan informal antara para pejabat. Selain melakukan pertemuan dengan cara rapat, Tim Koordinasi Kecamatan Jabon juga melakukan pertemuan secara informal diluar agenda rapat dikarenakan banyak pihak telah mengenal satu sama lain diluar pekerjaan.
- b. Mengadakan pertemuan formal antara para pejabat yang biasanya dinamakan rapat. Jelas juga disebutkan bahwa Tim Koordinasi juga melakukan koordinasinya dengan mengadakan pertemuan secara formal yang biasanya disebut rapat.

- c. Melalui alat perhubungan. Selain mengadakan pertemuan formal diantara anggota Tim Koordinasi yang biasanya disebut rapat, anggota Tim Koordinasi juga melakukan koordinasi melalui alat perhubungan seperti telepon.

Hal tersebut menyatakan bahwa ada tiga macam bentuk koordinasi yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kecamatan Jabon yaitu mengadakan pertemuan informal antar pejabat, mengadakan pertemuan formal antara pejabat yang biasanya dinamakan rapat, dan koordinasi melalui alat perhubungan.

Lalu yang berikutnya adalah mengenai metode dan teknik koordinasi yang dipakai dalam melakukan kegiatan organisasi Menurut Handayani (1994:124). Metode dan teknik koordinasi yang dipakai oleh Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kecamatan Jabon adalah metode dan teknik koordinasi melalui konsensus yang terdiri dari koordinasi melalui motivasi dan konsensus melalui ide.

- a. Koordinasi melalui motivasi.

Motivasi juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan usaha-usaha koordinasi, terutama dalam organisasi besar dan kompleks yang mempunyai jenis dan fungsi yang beraneka ragam. Motivasi yang dimaksud antara lain dapat berupa kepentingan bersama, bahkan dalam situasi tertentu mempunyai perasaan solidaritas berdasarkan

atas kesetiakawanan atau *esprit de corps*, yang dapat dipergunakan dalam menjamin kelancaran koordinasi. Melalui nilai-nilai ini dapat diharapkan tercapainya konsesnya yang lebih terintegrasi dalam mencapai tujuan bersama.

Tim Koordinasi Kecamatan Jabon mempunyai tugas dan fungsi yang harus dijalankan masing-masing. Tugas dan fungsi yang mereka jalankan mengarah pada tujuan bersama yang telah ditetapkan yaitu percepatan dan perluasan pembangunan, untk mencapai tujuan tersebut Tim Koordinasi Kecamatan Jabon melakukan rapat dan koordinasi untuk mengintegrasikan kegiatan. Namun, tidak hanya dalam pertemuan formal berbentuk rapat, koordinasi juga dilakukan dalam bentuk nonformal melalui pertemuan diluar rapat karena anggota satu sama lain telah mengenal di luar hubungan pekerjaan, koordinasi juga dilakukan melalui alat perhubungan seperti telepon. Hal tersebut dimaksudkan sebagai motivasi untuk mencapai kepentingan bersama yang berdasarkan perasaan solidaritas dan kesetiakawanan yang dapat dipergunakan dalam menjamin kelancaran koordinasi.

b. Konsensus melalui ide

Konsensus melalui ide atau dikatakan koordinasi melalui ide (*corrdition by ideas*), dimaksudkan bahwa setiap orang yang bekerja dalam organisasi berusaha mengidentifikasi dirinya dalam keseluruhan tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi. Walupun sukar bagi individu untuk mengidentifikasi dirinya dalam keanekaragaman tujuan yang

hendak dicapai oleh organisasi, akan tetapi juga membuktikan bahwa metode/teknik ini juga nampaknya berhasil dalam usaha pembangunan.

Setiap anggota dalam Tim Koordinasi Kecamatan Jabon mempunyai tugas dan fungsi masing-masing yang menjadi tanggung jawabnya. Mereka memahami tugas dan fungsi masing-masing, sehingga mereka bekerja dan menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing. Kecamatan sebagai pihak pemerintah mengadakan rapat dan pertemuan untuk melakukan koordinasi dan integrasi antara anggota, swasta sebagai pihak pemberi informasi mengenai bantuan apa saja melalui program TJSLP/CSR yang diberikan kepada masyarakat. Dan masyarakat juga berinisiatif dalam memenuhi kebutuhannya, mereka mengajukan proposal kegiatan kepada Tim Koordinasi Kecamatan Jabon. Dengan adanya pemahaman mengenai masing-masing tugas maka tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai, sehingga metode ini juga dilakukan oleh Tim Koordinasi Kecamatan Jabon dalam menjalankan koordinasinya.

Menurut Tripathy dan Reddy (1983) dalam Moekijat (1994) ada 9 syarat untuk mencapai koordinasi yang efektif, yakni:

a. Hubungan langsung

Tim Koordinasi Kecamatan Jabon juga melakukan hubungan langsung diantara sesama anggotanya untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah direncanakan. Tim Koordinasi Kecamatan Jabon melakukan hubungan diluar rapat dengan cara berkomunikasi via telepon.

b. Kesempatan awal

Tim Koordinasi Kecamatan Jabon melakukan koordinasi pertama kali setelah dilakukan sosialisasi secara langsung oleh Bappeda, sehingga kesempatan awal melakukan koordinasi dapat dicapai dengan lebih mudah.

c. Kontinuitas

Meskipun koordinasi dan integrasi yang dilakukan Tim Koordinasi Kecamatan Jabon jarang dilakukan pertemuan secara formal melalui rapat, namun koordinasi juga dilakukan secara tidak formal diluar rapat secara berkelanjutan untuk mencapai tujuan dan memiliki rasa kesetiakawanan.

d. Dinamisme

Koordinasi yang dilakukan Tim Koordinasi itu tidaklah kaku, karena koordinasi yang dilakukan juga tidak hanya melalui pertemuan secara formal, namun juga melalui pertemuan secara tidak formal.

e. Tujuan yang jelas

Jelas sekali tujuan yang hendak dicapai oleh Tim Koordinasi Kecamatan Jabon sama dengan tujuan Tim Koordinasi di berbagai kecamatan yang lain, yaitu perluasan dan percepatan pembangunan di Kecamatan, sehingga Tim Koordinasi Kecamatan Jabon dapat berjalan efektif karena memiliki tujuan yang hendak dicapai.

f. Organisasi yang sederhana

Struktur organisasi yang dimiliki Tim koordinasi Kecamatan Jabon juga sama dengan struktur organisasi yang dimiliki oleh berbagai Tim

Koordinasi di kecamatan yang lain, struktur organisasi yang dimiliki sangatlah sederhana, mereka terdiri dari ketua dan wakil ketua, sekretaris, bendahara, kepala bidang sosial, kepala bidang fisik prasarana, dan kepala bidang pemberdayaan ekonomi, masing-masing bidang memiliki anggota. Sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan mudah.

g. Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas

Dalam struktur organisasi Tim Koordinasi Kecamatan Jabon yang telah ditentukan diatas, mereka memiliki wewenang dan tanggung jawab masing-masing secara jelas, sehingga mereka dapat bekerja sesuai dengan tujuan.

h. Komunikasi yang efektif

Komunikasi yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Kecamatan Jabon berjalan dengan lancar, komunikasi yang dilakukan melalui rapat untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan tugas masing-masing. Selain itu komunikasi juga dilakukan diluar rapat, sehingga komunikasi dapat berjalan dengan efektif.

i. Kepemimpinan dan supervisi yang efektif

Kepemimpinan dalam Tim Koordinasi Kecamatan Jabon yang dijalankan oleh ketua Perusahaan Gas Negara (PGN). Ketua Tim Koordinasi Kecamatan Jabon juga dirasa telah menjalankan tugasnya dengan baik, contohnya memberikan informasi kepada Tim Koordinasi mengenai program TJSLP/CSR yang akan dilakukan serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan kebutuhannya melalui proposal. Hal

tersebut dapat menjaga dan memelihara semangat kerja dalam Tim Koordinasi.

Berdasarkan syarat-syarat koordinasi menurut Tripathy dan Reddy yang telah disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa koordinasi yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Kecamatan Jabon semua sesuai dengan syarat-syarat koordinasi yang disebutkan, sehingga koordinasi yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Kecamatan Jabon dianggap efektif. Keadaan tersebut tidak sama halnya dengan yang terjadi pada Tim Koordinasi Kecamatan Waru dan Tim Koordinasi Kecamatan Sidoarjo.

### 3) Koordinasi dengan Bappeda

Berdasarkan bentuk Koordinasi Menurut Sutarto (2002:152-158) koordinasi dalam suatu organisasi dapat dilakukan dalam berbagai cara atau bentuk. Bentuk koordinasi yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Kecamatan Jabon dengan Bappeda Kabupaten Sidoarjo yaitu melalui alat perhubungan. Alat perhubungan yang digunakan yaitu melalui internet. Tim Koordinasi memberikan laporan kegiatannya kepada Bappeda Kabupaten Sidoarjo melalui *e-mail* (surat elektronik) pribadi. Koordinasi tetap efektif meski hanya dilakukan melalui alat perhubungan, karena apabila mengandalkan rapat maka laporan dari Tim Koordinasi Kecamatan Jabon tidak akan tepat waktu tersampaikan.

Kemudian, dalam menjalankan koordinasi ada beberapa jenis koordinasi yang diterapkan dalam organisasi. Menurut Hasibuan (2005:86-87) ada dua jenis koordinasi, yaitu koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal. Koordinasi



vertikal (*vertical coordination*) merupakan kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada dibawah wewenang dan tanggung jawabnya. Sedangkan koordinasi horisontal (*horizontal coordination*) yaitu mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi (aparatus) setingkat.

Menurut jenis koordinasi yang diterapkan antara Bappeda dengan Tim Koordinasi Kecamatan Jabon sama halnya dengan koordinasi yang dilakukan dengan Tim Koordinasi di berbagai kecamatan yang lain, yaitu merupakan jenis koordinasi vertikal. Hal tersebut dikarenakan Bappeda merupakan sebuah unit kerja yang bekerja diatas setiap Tim Koordinasi, karena Bappeda memiliki tugas sebagai koordinator setiap Tim Koordinasi yang ditempatkan di setiap kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Sehingga hubungan koordinasi antara Bappeda dengan Tim Koordinasi Kecamatan Jabon merupakan jenis koordinasi vertikal.

Selain itu, Menurut Handyaningrat (1994:124) ada berbagai macam metode dan teknik yang dapat dipakai dalam melakukan kegiatan koordinasi, namun metode yang digunakan oleh Tim Koordinasi Kecamatan Jabon untuk berkoordinasi dengan Bappeda adalah Koordinasi melalui kewenangan. wewenang merupakan salah satu cara untuk menjamin terlaksananya koordinasi dengan baik. Dalam organisasi yang demikian itu perlu diusahakan adanya integrasi dari seluruh jenis dan fungsi-fungsi yang ada, karena setiap jenis dan fungsi hanyalah merupakan sub sistem dari seluruh sistem pelaksanaan tugas pokok organisasi secara keseluruhan.

Bappeda Kabupaten Sidoarjo memberikan wewenang tugas sepenuhnya kepada semua Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) di kecamatan karena Bappeda hanya bertindak sebagai koordinator, Bappeda bertugas sebagai perencana dan pengevaluasi saja, dalam hal ini setiap tim koordinasi memberikan laporan kegiatannya kepada Bappeda. Hal tersebut juga berlaku bagi Tim Koordinasi Kecamatan Jabon, Bappeda memberikan kewenangan tugasnya kepada Tim Koordinasi Kecamatan Jabon dan Tim Koordinasi Kecamatan Jabon melaksanakan tugasnya di kecamatan sesuai dengan tugas masing-masing yang telah jelas diberikan, dan setelah melakukan tugasnya, Tim Koordinasi Kecamatan Jabon memberikan laporan kegiatannya kepada Bappeda.

#### **4) Hasil Kinerja**

Menurut Adisasmita yang ditulis oleh Zamhariri (2008:102), menyebutkan bahwa pembangunan masyarakat diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, dimana mereka mampu mengidentifikasi kebutuhan dan masalah secara bersama, namun pakar lain memberikan batasan bahwa pembangunan masyarakat adalah perpaduan antara pembangunan sosial ekonomi dan pengorganisasian masyarakat.

Hal diatas sama halnya dengan pembangunan masyarakat yang terjadi di Kecamatan Jabon. Masyarakat di Kecamatan Jabon telah mengetahui tugas dan tanggung jawabnya dalam Tim Koordinasi. Sehingga banyak masyarakat yang aktif berinisiatif dalam mengajukan proposal kegiatan kepada Tim Koordinasi Kecamatan Jabon untuk kemudian dapat dipertimbangkan kembali oleh Tim

Koordinasi. Selain itu, kinerja masing-masing anggota dalam Tim Koordinasi Kecamatan Jabon berjalan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Sehingga hal tersebut menyatakan bahwa masyarakat di Kecamatan Jabon telah mampu mengidentifikasi kebutuhan dan masalahnya sendiri secara bersama hingga dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Kemudian dalam Fahrudin (2011:24-25), pengembangan masyarakat juga mempunyai nilai-nilai yang menentukan fokusnya, berikut merupakan nilai-nilai pengembangan masyarakat di Kecamatan Waru dikaitkan dengan kinerja dari Tim Koordinasi Kecamatan Waru, yaitu antara lain:

- a. Masyarakat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam menentukan keputusan-keputusan yang mampu mempengaruhi kesejahteraan mereka. Masyarakat di Kecamatan Jabon mengajukan proposal untuk dapat memenuhi kebutuhan bagi diri mereka sendiri meskipun harus dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Tim Koordinasi Kecamatan Jabon. Hal tersebut menandakan bahwa masyarakat di Kecamatan Jabon mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam menentukan keputusan yang mempengaruhi kesejahteraan mereka sendiri.
- b. Kebebasan berpartisipasi merupakan suatu cara yang sangat berharga dalam mengendalikan berbagai persoalan masyarakat. Kebebasan berpartisipasi yang dilakukan oleh Masyarakat Kecamatan Jabon yaitu melalui pembuatan proposal untuk dapat memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan masalah mereka sendiri yang diajukan kepada Tim Koordinasi Kecamatan Jabon.

- c. Masyarakat mempunyai hak untuk berusaha menciptakan lingkungan yang mereka inginkan. Begitupun dengan hak untuk menciptakan lingkungan yang diinginkan, masyarakat di Kecamatan Jabon menyalurkan haknya dengan benar dengan membuat proposal yang diajukan kepada Tim Koordinasi Kecamatan Jabon.
- d. Masyarakat mempunyai hak untuk menolak suatu lingkungan yang dipaksakan dari luar. Dengan partisipasi masyarakat dalam pembuatan proposal untuk menangani masalah dan memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri maka masyarakat tersebut juga mempunyai hak untuk menolak suatu lingkungan yang dipaksakan tidak sesuai untuk memenuhi kebutuhan dan menangani masalahnya.
- e. Peningkatan suatu interaksi manusia dalam suatu masyarakat akan menumbuhkan potensi bagi pengembangan aspek kemanusiaan. Interaksi antar sesama masyarakat sehingga dapat membentuk suatu proposal yang kemudian dapat diajukan kepada Tim koordinasi Kecamatan Jabon menumbuhkan potensi bagi pengembangan aspek kemanusiaan itu sendiri.
- f. Tercakup dalam suatu proses interaksi ialah suatu konsep atau pengertian tentang “masyarakat” yang selalu meluas. Yang bekerja dan saling berinteraksi dalam mencapai tujuan tidak hanya satu unsur saja, namun semua unsur dari “masyarakat” juga ikut serta dalam mencapai tujuan pembangunan yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat itu sendiri.
- g. Setiap disiplin atau profesi merupakan suatu kontribusi yang sangat berharga (potensi) bagi proses pengembangan masyarakat. Tim Koordinasi Kecamatan

Jabon menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan, baik itu pemerintah, swasta, dan masyarakat itu sendiri. Sehingga kontribusi dari setiap unsur dalam Tim Koordinasi Kecamatan Jabon sangat berharga bagi proses pengembangan masyarakat.

- h. Motivasi diciptakan dalam diri manusia oleh pergaulan dengan lingkungan. Pergaulan dan interaksi yang terjadi antar setiap anggota yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat menambah motivasi untuk dapat menciptakan pengemabnagan masyarakat.
- i. Pengembangan masyarakat berkepentingan dengan pengembangan kemampuan manusia dalam mengatasi masalah-masalah di lingkungannya. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, masyarakat di Kecamatan Jabon telah mampu mengatasi masalah-masalah di lingkungannya sendiri melalui pembentukan proposal yang kemudian nantinya diserahkan kepada Tim Koordinasi Kecamatan Jabon untuk dapat ditindaklanjuti, sehingga hal tersebut membuat pembangunan masyarakat berjalan dengan baik.

Berdasarkan nilai-nilai pengembangan masyarakat menurut Fahrudin (2011:24-25) diatas, dapat dinyatakan bahwa pengembangan masyarakat di Kecamatan Jabon bisa dikatakan sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada pengembangan masyarakat. Sehingga pengembangan masyarakat di Kecamatan Jabon dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai yang menjadi fokusnya untuk dapat berkembang.

Kemudian pengembangan masyarakat juga dapat dilihat dari prinsip-prinsip umumnya menurut Bambang Shergi Laksmono dalam Ed.Fahrudin dalam

Aam Muharam (2011:58-59) yang dikaitkan dengan kinerja Tim Koordinasi Kecamatan Jabon. Kinerja Tim Koordinasi Kecamatan Jabon sesuai dengan beberapa prinsip pengembangan masyarakat:

1. Pengembangan masyarakat merupakan proses perubahan sengaja dan terarah. Tim Koordinasi Kecamatan Jabon sama halnya dengan Tim koordinasi lainnya yang menghendaki tujuan perluasan dan percepatan pembangunan di kecamatan masing-masing, tentu saja masyarakat Kecamatan Jabon yang mengetahui hal tersebut memanfaatkan dengan baik dengan cara mengajukan proposal kegiatan kepada Tim Koordinasi. Oleh karena itu, pengembangan masyarakat di Kecamatan Jabon merupakan proses perubahan yang sengaja dan terarah.
2. Pengembangan masyarakat bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal tersebut sama halnya dengan yang telah disebutkan sebelumnya, masyarakat yang mengajukan proposal kepada Tim Koordinasi Kecamatan Jabon bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri selain mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya.
3. Mengutamakan partisipasi masyarakat. Masyarakat di Kecamatan Jabon telah mengerti kewajiban dan hak yang dimilikinya, mereka memahami hal tersebut dengan cara berpartisipasi membuat proposal yang diajukan kepada Tim koordinais kecamatan Jabon, selain untuk dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, pengajuan proposal tersebut juga untuk mengatasi masalah yang ada pada masyarakat.

Koordinasi yang dilakukan antara Bappeda dengan Tim Koordinasi merupakan koordinasi ketergantungan yang menyatu (*pooled interdependent*). Bappeda melakukan peran koordinasinya dengan mengkoordinasikan seluruh tugas dan kegiatan CSR Kecamatan kepada Tim Koordinasi Kecamatan. Sehingga Bappeda sebagai penanggung jawab utama terhadap semua Tim Koordinasi Kecamatan untuk mencapai satu tujuan akhir yaitu dalam perluasan dan percepatan pembangunan.

Koordinasi antara Bappeda dengan Tim Koordinasi yang diteliti tidak semua berjalan dengan baik, sehingga tidak semua koordinasi dianggap efektif. Koordinasi yang tidak berjalan dengan efektif yaitu Tim Koordinasi Kecamatan Waru dan Tim Koordinasi Kecamatan Jabon. Hal tersebut dikarenakan kedua Tim Koordinasi tersebut tidak memenuhi syarat, tim koordinasi tersebut juga tidak sesuai dengan tujuan koordinasi. Oleh karena itu, hasil kinerja juga tidak terlaksana sesuai dengan tujuan.

Lain halnya dengan Tim Koordinasi Kecamatan Jabon, koordinasi tersebut berjalan dengan efektif antar sesama anggota maupun koordinasi dengan Bappeda dikarenakan sesuai dengan syarat yang ada. Selain itu, metode yang digunakan dalam koordinasinya berupa konsensus melalui motivasi dan ide. Koordinasi yang dilakukan selain melalui rapat, juga melalui alat perhubungan seperti telepon dan surat elektronik (*electronic mail*). Sehingga hasil kinerja yang direncanakan dapat tercapai dengan baik dan sesuai dengan nilai-nilai pengembangan masyarakat.

### **3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Koordinasi Antar Bappeda dengan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)**

#### **a. Faktor Pendukung**

1. Anggota dalam Tim Koordinasi telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan tanggung jawabnya.

Tim Koordinasi yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan tanggung jawabnya hanya Tim Koordinasi Kecamatan Jabon, sedangkan dari Tim Koordinasi Kecamatan Waru dan Tim Koordinasi Kecamatan Sidoarjo belum melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Pihak pemerintah sebagai pemberi fasilitas untuk mengadakan pertemuan dan rapat, kemudian pihak swasta juga telah melaksanakan tugasnya dalam memberikan informasi kepada Tim Koordinasi mengenai program TJSLP/CSR yang akan dilaksanakan, juga tidak lupa memberikan laporan setelah melakukan kegiatan TJSLP/CSR nya. Masyarakat membuat proposal kegiatan pembangunan untuk kemudian diajukan kepada Tim Koordinasi. Semua pihak dalam Tim Koordinasi Kecamatan Jabon saling berpartisipasi dan menjaga komunikasi.

Hal di atas tersebut tertuang dalam Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/1137/404.1.3.2/2013 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan TJSLP atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kecamatan se Kabupaten Sidoarjo mengenai Tugas Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan TJSLP di Kecamatan. Tim Koordinasi Kecamatan Jabon



telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Keputusan Bupati tersebut.

2. Adanya hubungan informal diluar hubungan formal.

Hubungan informal mendukung adanya hubungan formal yang ada karena hal tersebut sangat mendukung sekali kegiatan yang sedang berlangsung. Hubungan informal ini hanya terjadi pada Tim Koordinasi Kecamatan Jabon, sedangkan Tim Koordinasi Kecamatan Waru dan Tim Koordinasi Kecamatan Jabon tidak didukung dengan hubungan informal.

Pihak kecamatan seringkali menyediakan fasilitas dengan mengundang semua anggota Tim Koordinasi Kecamatan Jabon untuk mengadakan rapat dan pertemuan dalam rangka koordinasi dan integrasi, namun seringkali yang terjadi adalah banyak dari pihak yang diundang dalam rapat terhalang oleh kegiatan lain yang mendadak, sehingga hal tersebut menjadi penghalang untuk dapat bertemu dan membicarakan mengenai program yang akan dilaksanakan, sehingga adanya hubungan informal diluar hubungan formal (rapat) dapat membantu mempermudah pekerjaan yang berdampak pada tercapainya tujuan yang telah ditetapkan bersama.

**b. Faktor Penghambat**

1. Tim Koordinasi tidak Menjalankan Tugas Sesuai dengan Tanggung Jawab yang Dimiliki

Kurangnya komunikasi dan integrasi antar anggota dalam tim Koordinasi terjadi pada Tim Koordinasi Kecamatan Waru dan Tim Koordinasi Kecamatan Sidoarjo merupakan salah satu penyebab Tim Koordinasi tidak menjalankan

tugas sesuai dengan tanggung jawab yang dimilikinya. Sehingga, kurangnya koordinasi dan integrasi antara sesama anggota dalam Tim Koordinasi Kecamatan Waru dan Tim Koordinasi Kecamatan Sidoarjo berakibat pada tidak berjalannya tujuan yang telah ditetapkan bersama sehingga Tim Koordinasi tidak berjalan dengan baik dan lancar. Hal di atas juga menandakan bahwa setiap anggota tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan benar. Oleh karena itu, apabila koordinasi dan integrasi kurang dalam kinerja Tim Koordinasi, hasil kinerja tim koordinasi belum dapat dilihat hasilnya.

Dari kejadian tersebut, peneliti berpendapat bahwa perlu adanya penerapan *reward and punishment* oleh Bappeda kepada setiap Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan kegiatan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kecamatan agar semua anggota dalam Tim Koordinasi dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Apabila Tim Koordinasi menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka tujuan yang ditetapkan bersama dapat tercapai dan hasil kinerja dapat dinikmati bersama.

## 2. Terkendala masalah dana

Faktor penghambat ini dirasakan oleh Tim Koordinasi Kecamatan Sidoarjo. Tim Koordinasi Kecamatan Sidoarjo berpikir menyatakan bahwa dalam mengadakan rapat dan pertemuan dalam rangka koordinasi, Tim Koordinasi Kecamatan Sidoarjo terkendala dalam masalah dana. Tentu saja hal tersebut berakibat fatal pada kinerja Tim Koordinasi, karena Tim Koordinasi tidak bisa mengadakan rapat dan pertemuan yang kemudian berdampak pada

kurangnya koordinasi dan integrasi, sehingga semua elemen dalam Tim Koordinasi bisa dikatakan tidak berjalan dan tidak berfungsi dengan baik.

Hambatan tersebut sangat mengganggu kinerja Tim Koordinasi dalam menjalankan tugasnya sehingga tujuan yang ditetapkan tidak dapat tercapai dengan sesuai. Memang dalam Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/1137/404.1.3.2/2013 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan TJLSP atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kecamatan se Kabupaten Sidoarjo tidak disebutkan mengenai pendanaan yang diberikan kepada Tim Koordinasi untuk membantu berjalannya Tim Koordinasi, sehingga seharusnya Bappeda sebagai pembentuk Tim Koordinasi dapat memberikan pendanaan kepada Tim Koordinasi untuk dapat bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya. Namun Tim Koordinasi Kecamatan Waru dan Tim Koordinasi Kecamatan Sidoarjo seharusnya dapat menjalankan tugasnya dengan baik meskipun tidak adanya pendanaan yang diberikan oleh Bappeda, karena Tim Koordinasi Kecamatan Jabon dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab tanpa ada pendanaan khusus dari Bappeda.

### 3. Kesibukan masing-masing anggota Tim Koordinasi.

Faktor penghambat ini dirasakan oleh Tim Koordinasi Kecamatan Jabon. Kesibukan masing-masing anggota Tim Koordinasi terkadang menghambat kinerja Tim Koordinasi itu sendiri. Apabila akan diadakan rapat dan pertemuan dalam rangka koordinasi dan integrasi, seringkali anggota yang diundang jarang hadir dikarenakan kesibukan dari masing-masing pihak, terutama dari pihak perusahaan. Pihak kecamatan sebagai fasilitasi mengundang

setiap anggota dalam Tim Koordinasi, namun yang terjadi banyak dari anggota tersebut tidak hadir untuk memenuhi undangan rapat.

Dari kejadian tersebut, peneliti berpendapat bahwa perlu adanya penerapan *reward and punishment*. Namun, penerapan sistem tersebut tidak langsung diberikan oleh Bappeda. Hal tersebut dikarenakan semua kinerja Tim Koordinasi Kecamatan diserahkan kepada pihak kecamatan, maka sistem *reward and punishment* diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing Tim Koordinasi Kecamatan, sehingga Bappeda tidak terlibat dalam hal ini. Apabila anggota dalam Tim Koordinasi tersebut tidak dapat menjalankan tugasnya karena kesibukan masing-masing maka sistem *reward and punishment* dapat diterapkan oleh masing-masing Tim Koordinasi Kecamatan tergantung bagaimana mereka menjalankannya, karena hal tersebut sudah diserahkan secara langsung kepada pihak Kecamatan.

Bappeda telah memberikan sosialisasi kepada masing-masing kecamatan di mengenai Keputusan Bupati beserta Pedoman dan petunjuk teknis Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan TJSLP (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan) di Kabupaten Sidoarjo yang seharusnya dihadiri oleh setiap anggota dalam Tim Koordinasi, namun sayangnya pihak perusahaan/swasta tidak banyak yang datang dalam sosialisasi tersebut, sehingga perusahaan tidak mengetahui mengenai fungsi sebenarnya dibentuk Tim Koordinasi tersebut. Oleh karena itu, perusahaan/swasta banyak yang berpikiran negatif terhadap pemerintah.

Dalam melakukan koordinasi antara Bappeda dengan Tim Koordinasi Kecamatan yang diteliti, jelas terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi koordinasi tersebut. Faktor pendukung yang terdiri dari (1) Anggota dalam Tim Koordinasi telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan tanggung jawabnya dan (2) adanya hubungan informal diluar hubungan formal. Kemudian faktor penghambat koordinasi antara Bappeda dengan Tim Koordinasi lebih banyak dibandingkan dengan faktor pendukung, yaitu terdiri dari (1) kurangnya komunikasi dan integrasi antar anggota dalam Tim Koordinasi, (2) terkendala masalah dana, dan (3) kesibukan masing-masing anggota tim koordinasi.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah diuraikan sesuai dengan fokus yang telah ditetapkan, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan, antara lain sebagai berikut:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan mempunyai berbagai macam fungsi dalam melaksanakan tugasnya. Dalam melaksanakan salah satu fungsi tersebut, Bappeda melaksanakan peran sebagai perencana, sebagai koordinator, dan sebagai pengevaluasi dari Tim Koordinasi Kecamatan. Selain itu tujuan utama dibentuknya Tim Koordinasi yaitu untuk percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan di Kabupaten Sidoarjo yang mempunyai sasaran tersendiri dalam mencapai tujuan, hal tersebut sesuai dengan manfaat koordinasi dan sesuai unsur-unsur pembangunan. Selain itu Tim Fasilitasi CSR dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan tujuan koordinasi. Tim Fasilitasi sebagai aktor pembentuk Tim Koordinasi kecamatan memiliki tugas pokok dan susunan keanggotaan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188 tahun 2012. Selain itu, terdapat mekanisme prosedur yang dilakukan dalam pembentukan Tim

Koordinasi tersebut, pertama melakukan kajian, kedua melakukan pembentukan regulasi, dan ketiga melakukan penguatan dan optimalisasi terhadap Tim Koordinasi Kecamatan yang sesuai dengan tujuan dan manfaat koordinasi.

2. Koordinasi antara Bappeda dengan Tim Koordinasi di Kecamatan menampilkan hasil koordinasi yang berbeda di masing-masing kecamatan yang diteliti, dua kecamatan memiliki hasil yang sama yaitu Kecamatan Waru dan Kecamatan Sidoarjo, sedangkan Kecamatan Jabon menampilkan hasil koordinasi yang berbeda dengan dua kecamatan tersebut. Kecamatan Waru dan Kecamatan Sidoarjo dikatakan sama karena kurang adanya integrasi antar sesama anggota dalam Tim Koordinasi sehingga juga berpengaruh pada koordinasinya dengan Bappeda dan hasil kinerja yang telah dicapai. Hal tersebut dikarenakan kedua Tim Koordinasi selain koordinasi yang dijalankan tidak efektif karena tidak memenuhi syarat, tim koordinasi tersebut juga tidak sesuai dengan tujuan koordinasi. Oleh karena itu, hasil kinerja juga tidak terlaksana sesuai dengan tujuan. Namun hal tersebut berbeda dengan Kecamatan Jabon, koordinasi berjalan dengan efektif antar sesama anggota maupun koordinasi dengan Bappeda dikarenakan sesuai dengan syarat yang ada. Selain itu, metode yang digunakan dalam koordinasinya berupa konsensus melalui motivasi dan ide. Koordinasi yang dilakukan selain melalui rapat, juga melalui alat perhubungan seperti telepon dan surat elektronik (*electronic mail*). Sehingga hasil kinerja yang direncanakan dapat tercapai dengan baik dan sesuai dengan nilai-nilai pengembangan

masyarakat. Selain itu, Koordinasi antara Bappeda dengan Tim Koordinasi Kecamatan sesuai dengan koordinasi ketergantungan yang menyatu (*pooled interdependent*).

3. Adapun faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi koordinasi Bappeda dengan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) yaitu:

- a. Faktor Pendukung koordinasi yaitu terdiri dari: (1) anggota Tim Koordinasi telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dan (2) adanya hubungan informal anggota diluar hubungan formal.
- b. Kemudian faktor penghambat koordinasi antara Bappeda dengan Tim Koordinasi lebih banyak dibandingkan dengan faktor pendukung, yaitu terdiri dari (1) kurangnya komunikasi dan integrasi antar anggota dalam Tim Koordinasi, (2) terkendala masalah dana, dan (3) kesibukan masing-masing anggota tim koordinasi.

## **B. Saran**

Dalam melakukan koordinasi antara Bappeda dengan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kecamatan Sidoarjo masih terdapat berbagai macam kendala dan hambatan, oleh karena itu, peneliti memberikan beberapa rekomendasi agar pelaksanaan dapat berjalan efektif dan efisien:

1. Dari tiga kecamatan yang dilakukan penelitian, dua kecamatan tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan. Hal tersebut dikarenakan akibat tidak adanya sanksi yang



mengatur dalam regulasi yang telah dibentuk yaitu Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/1137/404.1.3.2/2013 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJLSP) di Kecamatan Se Kabupaten Sidoarjo. Oleh karena itu, perlu adanya pasal yang menangani masalah sanksi, agar setiap anggota Tim Koordinasi di Kecamatan tersebut menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan.

2. Pihak dari Tim Koordinasi diharuskan lebih aktif dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, bukan hanya satu pihak namun juga semua pihak yang terlibat karena itu semua sudah terdapat dalam regulasi yang diatur. Pihak tersebut yaitu pihak dari perusahaan, pihak pemerintah kecamatan, maupun pihak dari masyarakat itu sendiri. Hal tersebut dapat dilakukan misalnya dengan cara saling melakukan komunikasi dan memberikan motivasi mengenai tugas pokok dan fungsi antar sesama anggota dalam Tim Koordinasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin. 2012. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Ambarini, Nur Sulistyo B. 2010. *Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Instrumen Hukum Ekonomi di Era Globalisasi*. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10 (3): 315-326
- Anonim. *Kabupaten Sidoarjo*. (Online), [www.eastjava.com](http://www.eastjava.com), diakses pada 24 Februari 2014
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo. 2010. *Struktur Organisasi*. (online) [www.bappeda.sidoarjo.kab.go.id/](http://www.bappeda.sidoarjo.kab.go.id/), diakses pada 12 Maret 2014
- Batubara, Alwi Hasyim. 2006. *Konsep Good Governance dalam Konsep Otonomi Daerah*. *Jurnal Analisis Administrasi dan Kebijakan*. 3 (1). 1-6
- Bimaryanto, Dedi. 2007. *Koordinasi Perencanaan Pembangunan dalam Proses Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Daerah*. Malang
- Cahyandi, Hanafie Ariza. 2009. *Peranan Bappedab dalam Proses perencanaan Pembangunan Dearah (Studi pada Badan Perencanaan Kabupaten Malang)*. Malang
- Diklat Kepemimpinan Aparatur Pemerintah Tingkat IV. 2014. *Bahan Ajar Koordinasi dan Kolaborasi*. Jakarta
- Dwiyanto, Agus. 2011. *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Endarti, Esa Wahyu. 2005. *Aplikasi Prinsip Good Governance dalam Sektor Publik*. *Jurnal Administrasi Publik*. 2 (1). 117-126
- Fahrudin, Adi EDITOR. 2011. *Pemberdayaan Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Bandung: Humaniora
- George, Rickhy. 2013. *Implementasi Corporate Social Responsibility di PT. Pembangkit Jawa Bali Unit Pembangkit Gresik*. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*. 1 (1): 157-165
- Gunawan, Alex. 2008. *Membuat Program CSR Berbasis Pemberdayaan Partisipatif*. Yogyakarta
- Handyaningrat, Soewarno. 1994. *Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: CV. Haji Masagung

- Hidajah, Siti Hidajatul. 2004. *Birokrasi dan Pembentukan Civil Society*. Surabaya: Pukad-Hali
- Humas DPRD Sidoarjo. 2013. *CSR Perusahaan Se-Kabupaten Sidoarjo, Untuk Kesejahteraan Rakyat Kota Delta* (online), [dprd-sidoarjo.go.id](http://dprd-sidoarjo.go.id), diakses pada 4 Juni 2013
- Huraerah, Abu. 2008. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat, Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora
- Jatmiko, Indra. 2011. *Kajian Citra Perusahaan Melalui Kegiatan Corporate Social Responsibility pada Bank "X" Bogor*. Bogor
- Keputusan Bupati Sidoarjo No. 188 tahun 2012 tentang Sekretariat Tetap (SEKTAP) Tim Fasilitasi Program Kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) Kabupaten Sidoarjo pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2012.
- Keputusan Bupati Sidoarjo No. 188 tahun 2013 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) di Kecamatan se Kabupaten Sidoarjo.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Kholishoh, Khilda. 2010. *Pendayagunaan Dana CSR (Corporate Social Responsibility) PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TBK Melalui Program mitra Binaan*. Jakarta
- Lako, Andreas. 2011. *Dekonstruksi CSR & Reformasi Paradigma Bisnis & Akuntansi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mindarti, Lely Indah. 2007. *Revolusi Administrasi Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Modul Diklat Kepemimpinan Tingkat II. 2008. *Kajian Paradigma, Paradigma Pembangunan, Paradigma Administrasi Publik, Paradigma pembangunan Sosial Ekonomi Politik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Kedeputan Bidang Diklat Spimnas.
- Moekijat. 1994. *Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis)*. Bandung: Penerbit Mandar Maju
- Moleong, Lexy. J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Peraturan Bupati No. 40 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 2 tahun 2013 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Wilayah Kabupaten Sidoarjo
- Peraturan Bupati Sidoarjo No.55 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo
- Peraturan pemerintah No.8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
- Pudjianto, Bambang. Dkk. 2009. *Analisis Potensi Penerapan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dalam Pengembangan Infrastruktur Transportasi di Perkotaan (Studi Kasus kota Semarang)*. Jurnal Teknik. 3 (3). 147-155
- Satropoetro, Santoso. 1988. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Percetakan Offset Alumni.
- Sedarmayanti. 2004. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*. Bandung: Mandar Maju.
- Siagian, Sondang P. 2009. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sumarto, Hetifah Sj. 2004. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance, 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sumarwoto, Otto. 2006. *Pembangunan Berkelanjutan: antara Konsep dan Realitas*. Bandung: Universitas Padjajaran
- Suryono, Agus. 2010. *Dimensi-dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang: UB Press
- Susanto, Bambang dan Mohammed Ali Berawi. 2012. *Perkembangan Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Berbasis Kerjasama Pemerintah Swasta di Indonesia*. Jurnal Transportasi. 12 (2). 93-102.
- Susiloadi, Priyanto. 2008. *Implementasi Corporate Social Responsibility untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan*. Jurnal Spirit Publik. 4 (2): 123-130
- Sutarto. 2002. *Dasar-dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

- Syafiie, Inu Kencana, dkk. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Syafrudin, Ateng. 1993. *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tome, Abdul Hamid. 2012. *Reformasi Birokrasi dalam Rangka mewujudkan Good Governance ditinjau dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010*. 20 (3). 132-147.
- Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Utomo, Adi Nugroho, dkk. 2010. *Peraturan saja tidak Cukup, Pelajaran dari Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) di Taman Nasional Kutai dan Gagasan Perbaikan ke depan* (online), [www.cifor.org](http://www.cifor.org), diakses pada 6 Oktober 2013.
- Wibisono, Yusuf. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*. Gresik: Fascho Publishing.
- Widodo, Joko. 2007. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Malang: Anggota IKAPI.
- Zamhariri. 2008. *Pengembangan masyarakat: Perspektif Pemberdayaan dan Pembangunan*. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. 4 (1). 101-110
- Zubaedi. 2007. *Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Grup.

# LAMPIRAN – LAMPIRAN





**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 JALAN PUTAT INDAH NO.1 TELP. (031) - 5677935, 5681297, 5675493  
 SURABAYA - (60189)

Surabaya, 11 April 2014

Kepada

Nomor : 070 / 2916 / 203.3 / 2014  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : 1 (satu) berkas  
 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Yth. Bupati Sidoarjo  
 Cq. Kepala Bakesbang dan Politik  
 di  
SIDOARJO

Menunjuk surat Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang tanggal 7 April 2014 Nomor : 4689/UN10.33/PG/2014 perihal Riset/Survey, bersama ini terlampir disampaikan dengan hormat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur tanggal 11 April 2013 Nomor : 070/ 2915 / 203.3/2014 atas Zaskya Rizky Karundini, dengan judul proposal "Peran oordinasi Bappeda dalam meningkatkan Pembangunan Masyarakat (Studi pada Bappeda dan Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJLSP) pada 3 Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo)", untuk mendapatkan tindak lanjut dari instansi tujuan.

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.

an. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 PROVINSI JAWA TIMUR  
 Kepala Bidang Budaya Politik

**EDDY SUPRIYANTO, S.STP., M.PSDM.**

Rembina

NIP. 19750319 199511 1 002

**Tembusan :**

- Yth. 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
 Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas  
 Brawijaya Malang di Malang.



## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Bappeda

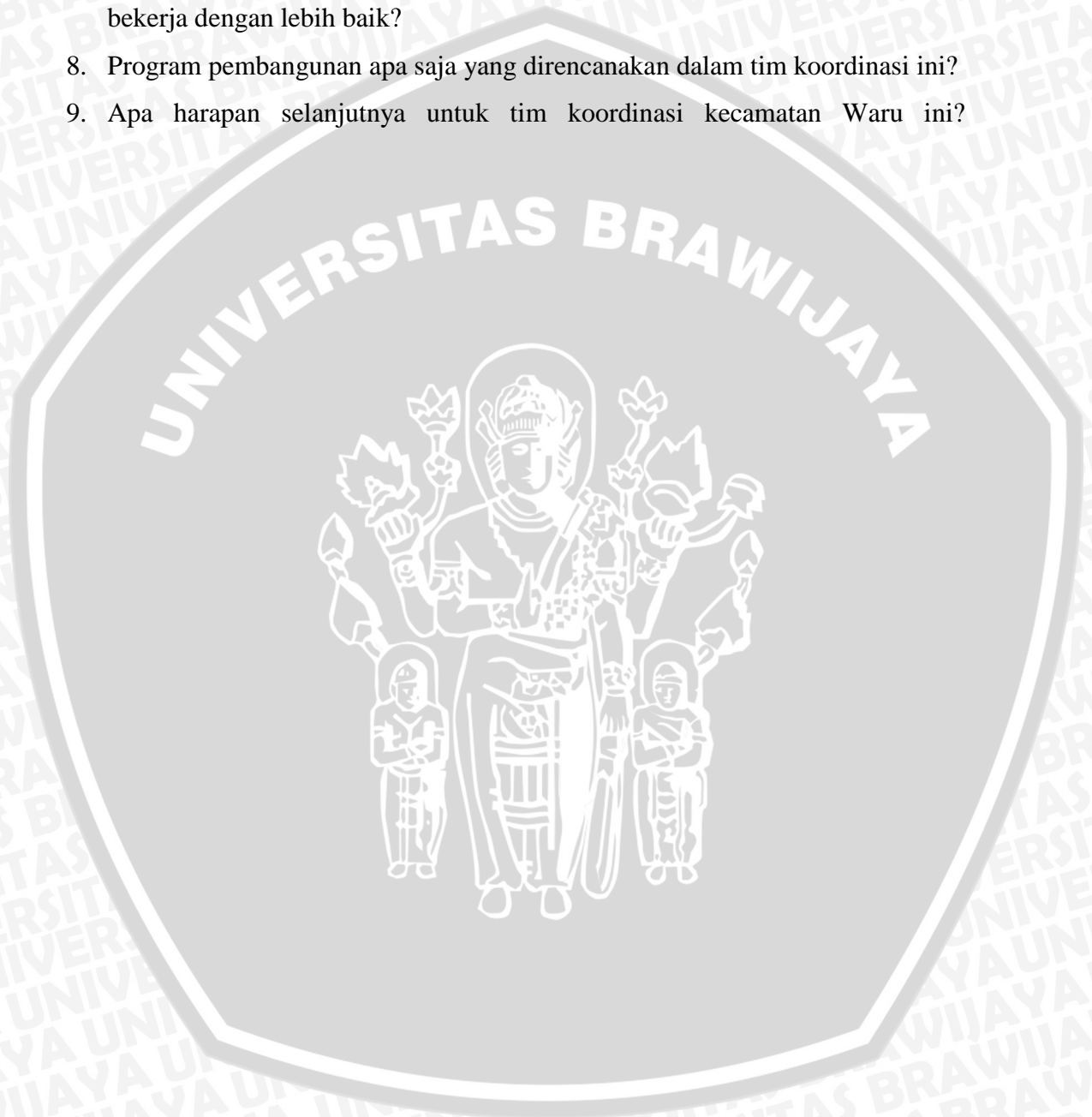
1. Apa saja peran Bappeda Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan Pembangunan?
2. Sejak kapan terbentuk tim koordinasi?
3. Mengapa Bappeda membentuk tim koordinasi?
4. Apa tujuan dan sasaran Bappeda dalam membentuk tim koordinasi?
5. Siapa saja aktor/pihak yang terlibat dalam pembentukan tim koordinasi?
6. Bagaimana prosedur pembentukan tim koordinasi(awal mula terbentuknya tim koordinasi)?
7. Apakah ada hambatan dalam pembentukan tim koordinasi?
8. Dimanakah tim koordinasi ditempatkan setelah terbentuk?
9. Apa langkah Bappeda selanjutnya setelah tim koordinasi terbentuk?
10. Apa tugas dan peran dari tim koordinasi tersebut?

### B. Tim Koordinasi Pengelolaan Program dan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)

1. Apakah tim koordinasi kecamatan Waru sudah diberikan sosialisasi mengenai tugas dan kinerja tim koordinasi oleh Bappeda?
2. Bagaimana tanggapan/reaksi baik dari pemerintah kecamatan, perusahaan, serta masyarakat di kecamatan Waru dengan adanya pembentukan tim koordinasi ini?
3. Setelah adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Bappeda mulai sejak kapan kah tim koordinasi kecamatan bekerja dan melakukan tugasnya?
4. Dengan berbagai tugas, pokok, dan fungsi apakah tim koordinasi sudah menjalankan kinerjanya sesuai dengan tupoksi?
5. Anggota yang terdiri dari pemerintah, swasta, dan masyarakat sendiri apakah masing-masing anggota tersebut berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing?



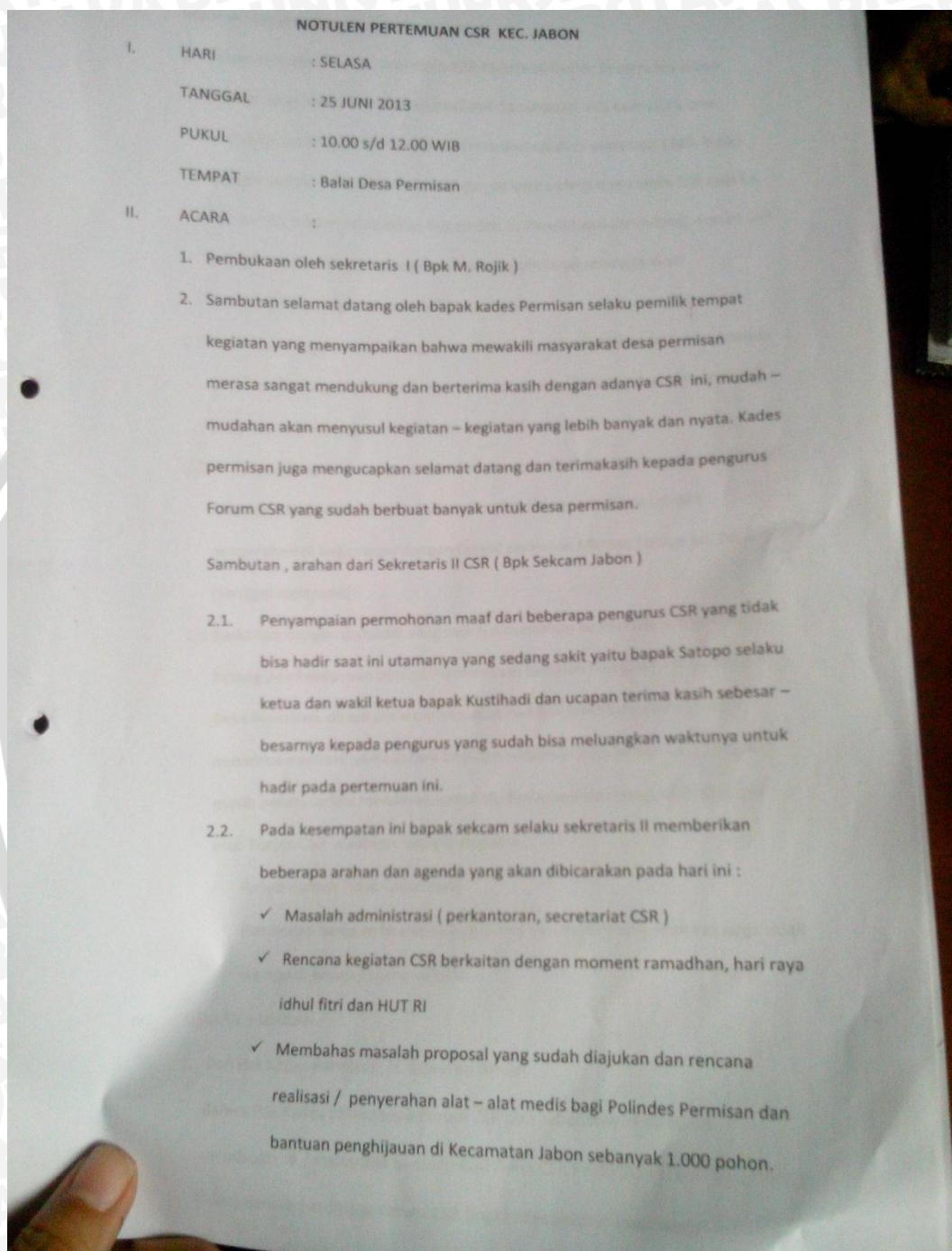
6. Apakah dalam bekerja tim koordinasi menemukan hambatan-hambatan yang berarti?
7. Atau apakah mungkin ada faktor pendukung yang membuat tim koordinasi bekerja dengan lebih baik?
8. Program pembangunan apa saja yang direncanakan dalam tim koordinasi ini?
9. Apa harapan selanjutnya untuk tim koordinasi kecamatan Waru ini?



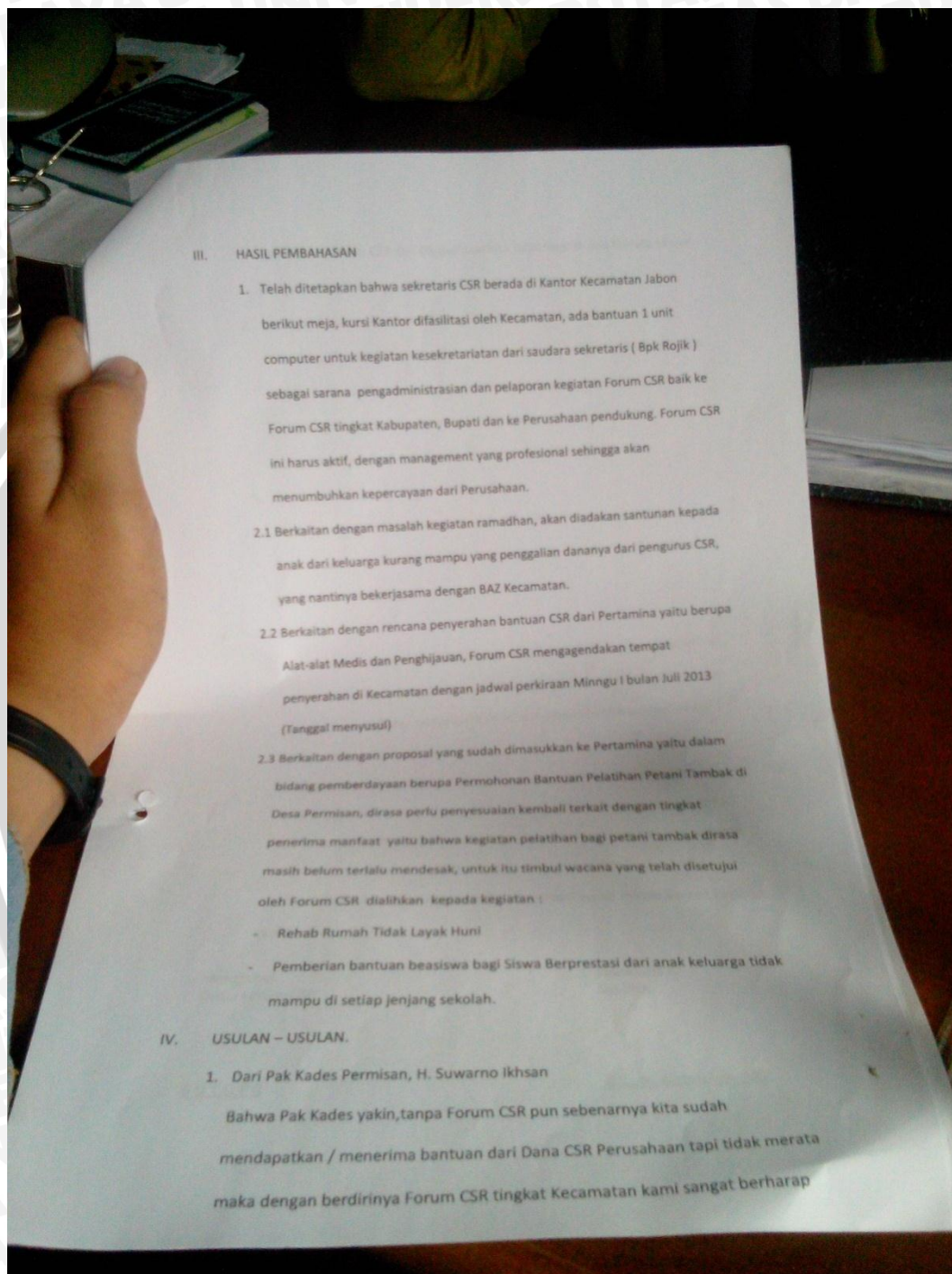
**MONITORING PROGRAM CSR BANTUAN PERTAMINA GAS  
TAHUN 2013**

NO	Nama Program	Lokasi	Jumlah	Sasaran Penerima Manfaat	Status
1	Bantuan Perlengkapan Lab. Komputer	Desa Keboguyang	15 unit komputer lengkap	Sekolah & siswa, siswi Madrasah Ibtidaiyah ( MI )	Selesai, Pebruari 2012
2	Bantuan sapi & kandang	Desa Tanjungsari	2 ekor Sapi	Kelompok Tani Samudra Hijau Kec. Jabon	Selesai, Pebruari 2012
3	Bantuan Kecamatan	SDN Permisan SDN Kupang SDN Jabon	53 Ea 214 Ea 6 Ea	Sekolah & siswa, siswi Sekolah Dasar	Selesai, Maret 2012
4	Bantuan Pohon Produktif	Desa Permisan	250 pohon	Masyarakat. Desa Permisan	Selesai, Pebruari 2013
5	Bantuan Pohon Produktif	Kecamatan Jabon	1000 pohon	Masy Lingkungan Kec. Jabon, Sidoarjo	Selesai, Juli 2013
6	Bantuan Sarana Kesehatan	PonKesDes Desa Permisan	1 unit	Masyarakat Desa setempat, terutama Desa di Lingkungan Permisan	Selesai, Juli 2013
7	Bantuan Computer & Printer	TK Dharma Wanita Persatuan Desa Permisan	1 Unit	Sekolah & siswa, siswi TK Darma Wanita	Belum
8	Bantuan sapi bergulir	-Desa Tanjungsari -Desa Permisan	8 ekor 8 ekor	Kelompok Tani Samudra Hijau Kelompok Tani Sumber Rejeki	Belum

## Notulen Pertemuan CSR Kabupaten Sidoarjo



## Notulen Pertemuan CSR Kabupaten Sidoarjo



## Notulen Pertemuan CSR Kabupaten Sidoarjo

agar dana bantuan CSR dari Perusahaan bisa lebih terarah dan merata sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bisa dikelola dengan lebih baik.

2. Dari Bpk. H. Mustofa, Koord. Bidang Fisik Prasarana dan Sarana

Diharapkan Forum CSR yang sudah terbentuk ini bisa berperan aktif utamanya melalui Forum ini bisa jemput bola ke Perusahaan-perusahaan yang ada, dan juga menghimbau bahwa dalam pembuatan proposal kita benar-benar memperhatikan aspek kebenaran dari tujuan proposal dikirim.

3. Dari Bapak Mustamir, Anggota bidang Sosial

Himbauan dengan terbentuknya Forum CSR, maka kita sebagai pengurus hendaknya punya Komitmen yang kuat, Juga punya Solidaritas, Integritas dan professional yang tinggi.

### V. KESIMPULAN

- Kunci kesuksesan dan keberhasilan kerja dari Forum CSR ini antara lain adalah pada Management yang professional dan juga kebersamaan antara pengurus, saling bahu-membahu, punya komitmen bersama untuk melangkah positif dalam membantu masyarakat miskin.
- Dengan adanya Forum CSR ini kegiatan yang selama ini tidak terpantau dan terlupakan, akan menjadi teradministrasi dan dilaporkan dengan baik, serta kegiatan yang selama ini terkesan kurang terarah akan menjadi lebih baik dan tertip dengan pelayanan 1 (satu) pintu melalui sekretariat Forum CSR.

Demikian notulen kegiatan dibuat sebagai acuan melaksanakan kegiatan dan laporan.

Mengetahui,  
Ketua Forum CSR

Sekretaris II,  
Sekcam

SUTOPO

Drs. H. Suparman, MSI

**Daftar Hadir Sosialisasi Perda dan Perbup oleh Bappeda Kabupaten  
Sidoarjo Tentang CSR di Kecamatan Jabon**

DAFTAR HADIR KEGIATAN SOSIALISASI PERDA dan PERBUP TTB CSR

HARI : KAMIS  
TANGGAL : 19 DESEMBER 2013  
TEMPAT : PENDEREP KEC. JABON

NO	NAMA	ALAMAT	T.TD
1.	Anindita Etri Wulandari	Pertogas JBT	1.
2.	M. MUSTOLIM	Kebungayon 9	2.
3.	MUTA		3.
4.	Imroatul Ustyanah	Permisian	4.
5.	H. KHUSBERI	KEMANG PADO CV. KLUNGAS	5.
6.	Agus	Kedung Pandan	6.
7.	H. SHOLIKIN	PERMISIAN	7.
8.	M. S. P. I.	Jabon	8.
9.	M. S. P. I.	Jabon	9.
10.	A. Rokman	Kumpang	10.
11.	Fachrudin	Bt. Teko	11.
12.	M. Nuhul A	Permisian	12.
13.	Martan. K.	Dusun Sali	13.
14.	H. M. P. J.		14.
15.	Mukasan	Kumpang	15.
16.	ANANG S	Semambung	16.
17.	ROSYON	babod	17.

Daftar Hadir Pertemuan Pengurus Tim Koordinasi Kecamatan Jabon

DAFTAR HADIR PERTEMUAN PENGURUS FORUM CSR  
 HARI : SELASA  
 TANGGAL : 25 JUNI 2013  
 TEMPAT : BALUK DESA PERMISAN

NO	NAMA	ALAMAT	TTD / NO. HP
1	Dr. H. Supriatman	Jeleneh Jabon	
2	Dr. H. Sunardi	Kan. Ekowati	
3	H. S. Ichsan	Kades Permisian	
4	IRJIN	PEK DES PERMISAN	
5	SUMARNO	PER DES PERMISAN	
6	M. TAHYA		
7	MASHUDI		
8	NAWAIB		
9	ABD. MAJID		
10	NADUL QUTIB		
11	ABDUL MANTOHUB	RIO I	
12	H. SUDIKIN	PERMISAN RIO 3	
13	Mustamir	Sukri Sukri / Kuryy	
14	H. Mustofa	PANJUNG JAR	
15	H. AB. FADHIL	Permisian	
16	H. ABD. SYUAM	BALONG TANI	
17	ROZUL	Jabon Sek. FCSR	
18	H. ANUNG ABDUL AJI	Kupang Jabon	
19			
20			

**Daftar Hadir Kegiatan Penyerahan Bantuan CSR oleh PT. Pertamina Gas di  
Kecamatan Jabon**

DAFTAR HADIR KEGIATAN PENYERAHAN BANTUAN CSR  
HARI : RABU  
TANGGAL : 3 JULI 2018  
TEMPAT : RUKA KEC. JABON

NO	NAMA	ALAMAT	TTD	NO
1.	Dr. Erik Erwan	PKM Jabon	1. [Signature]	1.
2.	Fitriah Luyah	-	2. [Signature]	2.
3.	S. ROZIK	Seli Forum	3. [Signature]	3.
4.	Muhammad	Seksi Sosial	4. [Signature]	4.
5.	H. Nusrifa	- Jember	5. [Signature]	5.
6.	Eryng Setyanah	BLH Kab. Sidoarjo	6. [Signature]	6.
7.	Endang Budisah	-	7. [Signature]	7.
8.	Murfa Muzdalifah	-	8. [Signature]	8.
9.	Muhammad	Bromo Prisma	9. [Signature]	9.
10.	Usman	-	10. [Signature]	10.
11.	S. Um Astuti	Potager	11. [Signature]	11.
12.	Andik Wahyu W.	Potager	12. [Signature]	12.
13.	Budiand	Kampung	13. [Signature]	13.
14.	S. ROZIK	Permisus	14. [Signature]	14.
15.	Mr. Musta	-	15. [Signature]	15.
16.	Muhammad	KALIPATI TANI	16. [Signature]	16.
17.	Muhammad W.	Dusun H. SARI	17. [Signature]	17.



## CURRICULUM VITAE

Nama : Zaskya Rizky Karundini  
 Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 10 Oktober 1992  
 Agama : Islam  
 Alamat Asal : Jln. H. Abd. Rahman No.164A,



RT 03/RW 02, Desa  
 SedatiGede, Kec.Sedati, Kab.  
 Sidoarjo, Jawa Timur  
 Fakultas/Jurusan : Fakultas Ilmu Administrasi/ Administrasi Publik  
 NIM : 105030101111120  
 Email : zkarundini@gmail.com / kzaskia@ymail.com

Pendidikan :

- 2010-2014 : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang
- 2007-2010 : SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo, Sidoarjo
- 2004-2007 : SMP Negeri 2 Waru, Sidoarjo
- 1998-2004 : SD Negeri 1 Sedati Gede, Sidoarjo

### Pengalaman Organisasi:

No	Periode	Organisasi	Jabatan
1	2010-2011	Marching Band Ekalavya Suara Brawijaya Universitas Brawijaya	Staf Departemen Administrasi Dan Organisasi
2	2011-2012	Marching Band Ekalavya Suara Brawijaya Universitas Brawijaya	Kepala Departemen Administrasi dan Organisasi
3	2012-2013	Marching Band Ekalavya Suara Brawijaya Universitas Brawijaya	Kepala Bidang Jaringan Relasi Perusahaan Departemen Bisnis

## Prestasi

No	Tahun	Prestasi
1	2011	Juara Umum <i>Blast Open Marching Competition</i> 2010 di GOR Ken Arok, Malang, Jawa Timur.
2	2013	Peringkat 7 Divisi Utama <i>Grand Prix Marching Band XXIX-2013</i> di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta

